

# **POLITIK KARTEL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

## **KOTA BLITAR TAHUN 2015**

**(Studi antar Partai Politik pada pemenagan Muh. Samanhudi Anwar dan Santoso dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Blitar Tahun 2015)**

### **SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan minat utama Reformasi Pemerintahan

Oleh :

**Rizki Adi Nugroho**

**NIM. 125120600111034**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**



**POLITIK KARTEL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

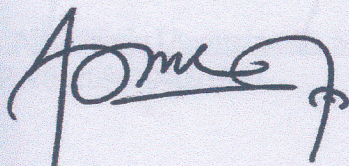
**Disusun oleh:**

**RIZKI ADI NUGROHO**

**125120600111034**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:**

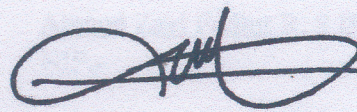
**Pembimbing Utama**



**Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si**  
**NIP. 2012096704091002**

**Tanggal 8 Januari 2018**

**Pembimbing Kedua**



**Ahmad Zaki Fadlur R, S.IP., MA**  
**NIP.-**

**Tanggal 8 Januari 2018**



**POLITIK KARTEL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**Rizki Adi Nugroho**

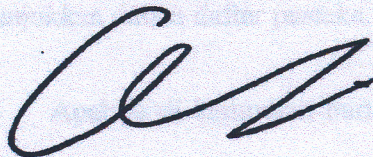
**NIM. 125120600111034**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik

Pada tanggal: 04 Januari 2018

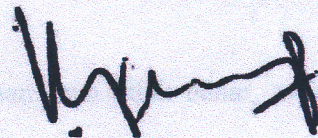
Tim Penguji:

Ketua Majelis Sidang Penguji



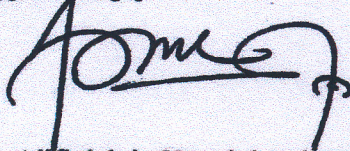
Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, S.IP., M.Si  
NIP. 2010088511111001

Sekretaris Majelis Sidang Penguji




Barqah Prantama, S.AP., M.AP  
NIP.-

Anggota Penguji I



Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
NIP. 2012096704091002

Anggota Penguji II



Ahmad Zaki Fadlur R., S.IP., MA  
NIP.-

Malang, 08 Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Enti Lufindo, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 196908141994021001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Veteran, Malang, 65145, Indonesia  
Telp. : +62341 575755; Fax : +62-341-570038  
Website: [www.fisip.ub.ac.id](http://www.fisip.ub.ac.id) Email: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 089 /UN10.F11.15/PP/2018

Lampiran : 1 halaman

Perihal : Hasil *Scanning* Plagiasi

Berdasarkan hasil *scanning* terhadap karya ilmiah mahasiswa:

Nama : Rizki Adi Nugroho  
NIM : 125120600111034  
Jurusan/Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015

Kami selaku tim deteksi plagiasi menyatakan bahwa karya tersebut mempunyai tingkat plagiasi sebesar:

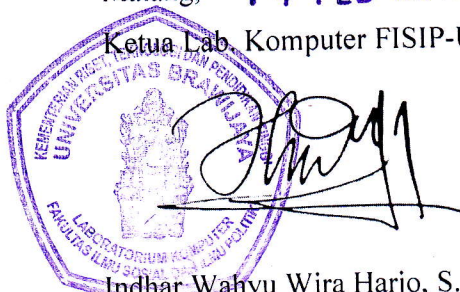
No.	Data Base	Hasil
1	Online	4%
2	Perpustakaan FISIP UB	10%
Rerata		7.0%

sehingga dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan Yudisium pada Jurusan/Prodi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 FEB 2018

Ketua Lab. Komputer FISIP-UB



Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos., MA.  
NIK. 201201860915 1 001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Adi Nugroho, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Yang lahir di Kinali pada tanggal 04 Desember 1994 dari pasangan Bapak Drs. H. Suparyana dan Hj. Nurdiyanti.

Jenjang karir akademis penulis dimulai dari SDN 13 Kinali, Bangun Rejo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat selesai di Tahun 2006, kemudian dilanjutkan di SMP Nurul Ikhlas, Pincuran Tinggi X Koto, Tanah Datar lulus Tahun 2009, setelah itu melanjutkan kembali di SMA Nurul Ikhlas ditempat yang sama dan lulus pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2012 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Brawijaya. Masuk melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur ujian tulis.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis sempat mengikuti beberapa kegiatan di bidang aktivitas Universitas, yakni Unit Aktifitas Bulutangkis Universitas Brawijaya (UABT). Selain itu penulis juga aktif di ke-organisasian Muhammadiyah, salah satu-nya kepengurusan di Muhammadiyah Kecamatan Kinali, Kabupaten Psaman Barat, Sumatera Barat. Tidak hanya itu, penulis pun pernah mengikuti sejumlah aktivitas penelitian, baik yang dilakukan oleh konsultan internal kampus, maupun institusi pemerintah seperti Komisi Pemlihan Umum (KPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Kesbangpol Linmas Prov. Jawa Tengah.



## PERNYATAAN

Nama : Rizki Adi Nugroho

NIM : 125120600111034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015 adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Apa bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 08 Januari 2018

Yang Menbuat Pernyataan,

Rizki Adi Nugroho

NIM. 125120600111034



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmadnya-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi dengan judul ***“Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015 (Studi antar Partai Politik Pada Pemenagan Muh. Samanhudi Anwar dan Santoso Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Blitar Tahun 2015)”*** ini ditulis sebagai salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Strata 1 (satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang. Tulisan ini merupakan sebuah pemaparan tentang pandangan studi terkait kartelisasi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kota Blitar Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Joko Purnomo, S.IP., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dan kritik sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
2. Ibu Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Ahmad Zaki Fadlu Rohman selaku dosen pembimbing kedua, yang sedikit banyaknya telah memberikan banyak sekali pelajaran, bimbingan, dan arahan baik sebelum proses skripsi dilakukan, saat berlangsungnya, hingga setelah dilaksanakannya skripsi ini.
3. Kepada jajaran Pemerintah Daerah Kota Blitar, KPU Kota Blitar, DPC PDIP Kota Blitar, DPC Partai Demokrat, DPC PKS, DPD Partai Golkar, DPD Partai Nasdem, dan DPD Partai Gerindra. Yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi pada penelitian ini.



4. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan serta bantuan tiada henti-hentinya.
5. Bapak Junaedi yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan penelitian skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas masukan dan bantuannya.
7. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih bagi semua orang yang telah membantu dalam proses skripsi ini.

Malang, Februari 2018

Penulis

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:*

*“kapan Skripsimu selesai”*

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah anehnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Meskipun itu harus terselesaikan tidak tepat waktu.*



## **ABSTRAK**

**Rizki Adi Nugroho, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2017. Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015. Tim Pembimbing: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Ahmad Zaki Fadlu Rohman, S.IP.,MA**

Pelaksanaan pilkada Kota Blitar serentak pertama kali diikuti pencalonan kembali petahana Muh. Samanhudi Anwar. Tingginya survei popularitas dan elektabilitasnya membuat mendapatkan dukungan dari delapan partai politik yakni, PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Geindra, PKS dan PAN. Kedelapan partai politik memperlihatkan karakteristik partai kartel yakni dengan menghindari persaingan dengan berkoalisi tanpa ideologi dan menggantinya menjadi koalisi serba bisa/pragmatis serta dengan pertimbangan rasionalitas. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis refleksi sistem kartel partai politik pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015, serta mengetahui penyebab pragmatisme partai dalam rekrutmen kandidat kepala daerah. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan teori yang digunakan adalah Demokrasi Elektoral, serta konsep partai kartel yang diadaptasi dari Katz dan Mair serta Ambardi. Sedangkan metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menghasilkan dua poin. Pertama, telah terjadi kartel politik di Kota Blitar ditandai meleburnya ideologi partai dan koalisi serba bisa. Kedua, bahwa pragmatisme partai didasarkan atas tidak ingin mengambil resiko kalah bersaing, namun ingin tetap memaksimalkan potensi kemenangan.

**Kata Kunci:** Samanhudi Anwar, Petahana, Partai Kartel, Pragmatisme, Ideologi

## ABSTRACT

***Rizki Adi Nugroho, Govermental Science, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, University of Brawijaya, Malang, 2017. The Political Party Cartelization in the Election of Regional Head Blitar in 2015. Supervisor: Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Ahmad Zaki Fadlu Rohman, S.IP.,MA***

*The first synchronously Blitar General Election of Regional Head in 2015 has been coloured by renomination of an incumbent, called Muh. Samanhudi Anwar. His political survey such as popularity and electability has elevated across the time, made him get plenty of supports from eight political parties, such as PDIP, Democratic party, National Democratic (Nasdem), Group Work's party (Golkar), people's conscience party (Hanura), Great Indonesian movement party (Gerinda), PKS, and PAN. The eight political parties show the characteristic of the cartel party by avoiding competition with a coalition without ideology and replacing them into all-round/pragmatic coalitions and with the consideration of rationality. The purpose of the research is to analyze the reflection of the political party cartelization in the Election of Regional Head Blitar in 2015. And to know the cause of the pragmatism in the recruitment of candidates for regional head. The type of this research is descriptive qualitative. The theoretical approach used is Electoral Democracy, as well as the concept of cartel parties adapted from Katz and Mair and Ambardi. While this research data collection method is interview, observation, and documentation. The results yield two points. First, there has been a political cartel in Blitar City marked by the melting of party ideology and all-round coalitions. Secondly, party pragmatism is based on not wanting to take on the risk of competing, but wanting to keep maximizing the potential of victory.*

***Keywords:*** Samanhudi Anwar, Petahana, Kartel Party, Pragmatism, Ideologi



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xi
 BAB. I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Studi Tedahulu.....	13
2.2 Dasar Teoritis.....	15
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	24
BAB. III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Desain Penelitian.....	26
3.3 Lokasi dan Obyek Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Analisis Data.....	32
BAB. IV GAMBARAN UMUM PILKADA KOTA BLITAR.....	34
4.1 Profil Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar.....	34
4.2 Profil Pemilihan Legislatif Kota Blitar.....	44
4.3 Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015.....	50

4.4 Gambaran Umum Partai Pengusung dan Pendukung Petahana.....	53
<b>BAB. V POLITIK KARTEL PADA PILKADA KOTA BLITAR TAHUN 2015.....</b>	<b>65</b>
5.1 Meleburnya Basis Ideologi dan Perilaku Koalisi Serba Bisa.....	65
5.2 Orientasi office-seeking dalam Perekrutan Kandidat.....	91
5.3 Kampanye Capital Intensive.....	98
<b>BAB. VI SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>111</b>
A. SIMPULAN.....	111
B. SARAN.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kursi Legislatif Partai Politik Pengusung Petahana.....	8
Tabel 1.2 Partai Politik pengusung calon Wali dan Wakil Walikota.....	9
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Dimensi perilaku partai politik.....	19
Tabel 3.1 Data Narasumber Wawancara.....	34
Tabel 4.1 Walikota Blitar Tahun 2000-2015.....	35
Tabel 4.2 Perolehan suara calon Wali dan Wakil Walikota Tahun 2010.....	38
Tabel 4.3 Partai pengusung calon Wali dan Wakil Walikota Tahun 2015.....	41
Tabel 4.4 Hasil suara pasangan calon Wali dan Wakil Walikota Tahun 2015.....	42
Tabel 4.5 Perolehan kursi Partai Politik Tahun 2004.....	44
Tabel 4.6 Perolehan kursi Partai Politik Tahun 2009.....	46
Tabel 4.7 Perolehan kursi Partai Politik Tahun 2014.....	48
Tabel 4.8 Pengurus DPC PDIP Kota Blitar 2015.....	57
Tabel 5.1 Tipologi koalisi Partai Politik .....	89
Tabel 5.2 Laporan Dana Kampanye Samanhudi Anwar.....	101
Tabel 5.3 Tim kampanye Samanhudi Anwar.....	108

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Alur Pemikiran Penelitian.....	24
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ajang dimana politisi bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam mencapai sebuah kekuasaan atau kepemimpinan. Persaingan untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat juga dilakukan dengan cara menggandeng seluruh partai politik daerah. Sehingga, individu dalam upaya melenggangkan kekuasaannya sangat dominan peranannya. Namun, merapatnya hampir seluruh barisan partai politik di suatu daerah kepada satu calon individu menimbulkan praktik kartel dalam sistem partai politik tersebut. Kartel adalah sebuah istilah baru dalam ranah politik nusantara. Kartel adalah suatu kecenderungan perilaku para elit yang sedang berkuasa untuk melenggangkan kekuasaan melalui cara-cara terselubung.

Tahun 2015 telah membawa warna baru bagi perpolitikan di Indonesia. Indonesia melakukan konsolidasi demokratisasi yang ditandai dengan Pemilu Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Ini merupakan pemilu pertama yang demokratis dirasakan Indonesia dengan penyelenggaraannya dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Berbagai macam partai politikpun muncul dengan membawa berbagai macam *platform*-nya, ada yang membawa ideologi agama dan ada pula yang sekuler. Penegasan ideologi dilakukan oleh partai politik guna mendulang suara dari para pemilih. Menariknya, ketika memasuki proses

penyelenggaraan pemilu, persaingan *platform* partai politik yang dikumandangkan seakan berhenti. Berbagai perbedaan ideologi dan tujuan dari partai politik kini bukanlah hal yang penting lagi. Koalisi yang terbentuk pun melibatkan semua peserta partai politik yang mencakup partai Islam maupun moderat.<sup>1</sup>

Perbedaan ideologi hanya menjadi alat jual guna mendulang suara pemilih, tetapi tidak berlaku ketika masuk ke dalam pemerintahan. Dodi Ambardi<sup>2</sup> berpendapat bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Ia juga membuktikannya dengan menunjukkan ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap *permisif* dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ini khususnya, sangat berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Kartel dalam politik berbeda dengan kartel dalam ekonomi. Dan Slater<sup>3</sup> menjelaskan, dalam ilmu ekonomi, kartel berbeda dari pasar bahwa mereka akan menghancurkan pesaing dan mencekik pendatang baru yang potensial di pasar.

---

<sup>1</sup>[https://www.kompasiana.com/boni\\_bon2/politik-kartel-di-indonesia\\_5510237d813311d434bc6244](https://www.kompasiana.com/boni_bon2/politik-kartel-di-indonesia_5510237d813311d434bc6244). Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009, hal 3

<sup>3</sup> Dan Slater, “*Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition*.” *Indonesia*, volume 78 (October 2004), 61-92

Dalam politik, kartel berbeda dengan koalisi bahwa mereka meng-*kooptasi* semua partai politik besar kedalam sebuah aliansi nasional yang luas, dan meminggirkan partai-partai kecil yang berada di luar dalam prosesnya. Walaupun ini merupakan bentuk ideal untuk mencapai stabilitas, namun hal tersebut justru akan menjadi sebuah masalah dalam representatif.

Dodi Ambardi<sup>4</sup> menjelaskan bahwa kartel ini dilakukan oleh partai politik demi menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagai kepentingannya. Kelangsungan hidup partai politik ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan yang dimaksud Ambardi bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan *rente/rent seeking*. Tindakan seperti ini tidak dapat dimungkinkan bila partai politik memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen.

Partai kartel dapat menjelaskan dengan baik alasan mengapa partai politik menggunakan cara kartel. Sudah jelas dalam sistem demokrasi bahwa ada sebagian partai yang akan masuk dalam pemerintahan, sedangkan yang lainnya akan terlempar keluar. terdapat partai yang takut akan terlempar dari jabatannya akibat berubahnya suara pemilih. Namun dalam model politik kartel, tidak akan ada partai besar yang terlempar dari kekuasaan. Hal ini mengakibatkan semakin

---

<sup>4</sup> Kuskridho Ambardi, *Op Cit*



tidak jelas antara partai politik di pemerintahan dan partai politik yang menjadi oposan.<sup>5</sup>

Pilkada langsung merupakan bentuk amanat normatif atas pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dan partisipatif yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah. Melalui Undang-Undang diatas selanjutnya menjadi dasar terbentuknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama di tahun 2005 yang dimulai dengan keberadaan partai politik yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Pilkada langsung ini pun berlanjut hingga 9 Desember 2015, yang mana dengan format baru dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia.

Pilkada serentak ini sendiri dilaksanakan di 269 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota, yang akan memilih kepala daerah untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Jawa Timur ini sendiri di ikuti oleh 19 Kabupaten/Kota,<sup>7</sup> yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar,

---

<sup>5</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-itu-politik-kartel/12433/2>. Diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 09.30 WIB.

<sup>6</sup> [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA\\_BLITAR\\_7\\_2010.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BLITAR_7_2010.pdf), Pemerintah Kota Blitar, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

<sup>7</sup> Sindonews.com/read/10677929/23/19/-kabupaten-kota-di-jawa-timur-gelar-pilkada-serentak. Diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 09.30 WIB.

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Ngawi. Seiring dengan itu, sejumlah nama calon kepala daerah juga bermunculan, mulai dari calon petahana yang didukung dengan banyak partai sampai dengan calon independen yang syarat administratifnya dengan mengumpulkan KTP masyarakat sesuai ketentuan.

Pada fenomena pilkada serentak ini terdapat kecenderungan bahwasanya petahana kembali mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota di akhir masa jabatannya. Hal ini berlaku pula di Kota Blitar, pelaksanaan pilkada Kota Blitar Tahun 2015 kembali diikuti oleh petahana Samanhudi Anwar yang berpasangan dengan Santoso. Berkaitan dan berkenaan dengan hasil dari kinerja kepemimpinannya selama satu periode sebelumnya, membuatnya mendapat dukungan dari delapan partai politik yakni PDIP, Nasdem, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Hanura, dan Demokrat.<sup>8</sup>

Merapatnya hampir seluruh partai politik kepada calon individu petahana bukan tanpa alasan kongkrit. Lingkaran Surver Indonesia (LSI) menyebut fenomena banyaknya petahana menang di pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota serentak 2015 disebabkan beberapa hal. Faktor popularitas dan keuntungan memimpin selama lima tahun menjadi beberapa hal yang menyebabkan calon petahana ini meraih sukses kembali di periode kedua dia menjabat. Kemampuannya menggerakkan tokoh informal maupun formal di daerahnya, mampu menjangkau seluruh segmen pemilih, serta segi financial yang jauh lebih

---

<sup>8</sup><http://pdipperjuangan-jatim.com/pasangan-samsons-daftar-pilkada-kota-blitar/>. Pasangan Samson's Daftar Pilkada Serentak. Diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 11.30 WIB.

siap.<sup>9</sup> Itulah yang membuat petahana berbeda dengan calon penantanganya. Tentunya atas dasar pertimbangan tersebut alasan mengapa partai politik beramai-ramai memberikan dukungan kepada calon individu petahana dalam pilkada.

Fenomena petahana menjadi idola pada tautan electoral seperti pada pilkada Kota Blitar secara teoritis dijelaskan oleh Stone (2010).<sup>10</sup> Stone (2010) mengungkapkan kemenangan petahana didasarkan kapasitas dan kapabilitas diri yang telah ditunjukkan petahana selama menjabat. Stone melihat karakteristik petahana, terkait dengan kualitas kepemimpinan, seperti karakter pribadi, kinerja, keterampilan, kemampuan bekerja dengan pemimpin lain, dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Hasilnya tren petahana jadi idola, hingga hasil pemilu mengikuti kualitas petahana selama masa kerja sebelumnya.

Namun demikian, keunggulan calon petahana diatas bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan, justru hal diatas menimbulkan permasalahan baru. Masalah tersebut muncul akibat dari adanya sikap pragmatisme sebagian besar partai politik yang memilih main aman dengan berkompetisi melawan petahana dalam pilkada. Partai politik cenderung melakukan koalisi pragmatis dengan tidak memperdulikan latar belakang ideologis antar partai, serta hanya mendukung satu calon yakni petahana, tanpa adanya mengusung kandidat lain dari kader masing-masing partai yang memiliki potensial.

---

<sup>9</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1068430/12/ini-penyebab-banyak-incumbent-menang-di-pilkada-1449742769>, diakses pada 12 April 2016 pukul 08.45 WIB.

<sup>10</sup>Walter J. Stone. *Incumbency Reconsidered: Prospects, Strategic Retirement, and Incumbent Quality in U.S. House Elections*, The Journal of Politic, 2010 Volume 72, No. 1, pp. 178-190.

Sikap pragmatis partai politik tersebut muncul pada pilkada serentak yang diselenggarakan pada Desember 2015. Hal ini dialami di beberapa daerah di Jawa Timur, yang mana pada kontestasi tersebut partai politik beramai-ramai mengusung satu calon untuk maju sebagai kepala daerah. Sebut saja petahana Kabupaten Lamongan (Fadeli - Kartika) yang diusung dan didukung oleh 9 partai politik, diantaranya partai Demokrat, PKB, PDI-P, PAN, Gerindra, partai Golkar, PKS dan Hanura. Petahana Kabupaten Ngawi (Budi Sulistiyono – Ony Anwar) yang diusung dan didukung oleh 9 partai politik, diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, PAN, Hanura, dan Demokrat. Serta petahana Kota Blitar (Samanhudi Anwar - Santoso) yang diusung dan didukung oleh 8 partai politik, diantaranya PDIP, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, Hanura, dan Partai Demokrat.<sup>11</sup> Hanya PKB dan PPP yang memperoleh masing-masing 3 (tiga) kursi legislatif tidak ikut dalam mendukung pasangan samanhudi-santoso pada pilkada Kota Blitar. Namun, PKB dan PPP pun juga tidak mengusung calon lain pada pilkada di Kota Blitar ini.

---

<sup>11</sup><http://pdipperjuangan-jatim.com/pasangan-samsons-daftar-pilkada-kota-blitar/>. Pasangan Samson's Daftar Pilkada Serentak. Diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 11.30 WIB .

Berikut adalah tabel mengenai peroleh kursi legislatif partai politik pendukung petahana Samanhudi Anwar pada pilkada Kota Blitar:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kursi Legislatif Partai Politik Pengusung dan pendukung**  
**Petahana<sup>12</sup>**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase (%)
1.	PDI-P	10	40%
2.	Nasdem	1	4%
3.	PKS	1	4%
4.	Golkar	1	4%
5.	Gerindra	3	12%
6.	Demokrat	2	8%
7.	Hanura	1	4%
8.	PAN	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>76%</b>

Sumber: KPUD Kota Blitar Tahun 2015.

---

<sup>12</sup> Keterangan: Dari total jumlah kursi sebanyak 25 di DPRD Kota Blitar, calon petahana Samanhudi Anwar didukung delapan partai politik mayoritas di Kota Blitar dengan total kursi di DPRD sebanyak 19 Kursi. Hanya **PKB dan PPP** yang memperoleh masing-masing tiga kursi (**enam kursi total keseluruhan/24% kursi legislatif**) tidak ikut dalam mendukung pasangan samanhudi-santoso pada pilkada Kota Blitar. Namun, PKB dan PPP pun juga tidak mengusung calon lain pada pilkada di Kota Blitar ini.



Berikut pasangan yang maju dalam pemilihan kepala daerah serentak Kota Blitar Tahun 2015:

**Tabel 1.2**  
**Pasangan Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015**

Nomor Urut	Nama Pasangan Kandidat	Partai Pengusung
1.	Mochsin dan Dwi Sumardianto	(Perseorangan)
2.	Muh. Samanhudi Anwar dan Drs. H. Santoso, M.Pd	PDI-P, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, Dan Partai Demokrat.

Sumber: *KPUD Kota Blitar Tahun 2015*.

Berdasarkan koalisi pragmatis yang dibangun oleh partai politik diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengusung calon petahana yang memiliki banyak keuntungan politis dan materil, mampu mengesampingkan garis ideologi partai dalam membangun sebuah koalisi. Adanya sikap permisif (serba membolehkan) dalam pembentukan koalisi, serta tidak adanya oposisi, dan kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai kelompok, menandakan bahwasanya sistem kepartaian yang berjalan pada tautan elektoral pilkada ini berjalan layaknya kartel. Jikalau ada partai lain yang mengusung calon lain dari non-kader, maka partai tersebut dikatakan sebagai partai pemburu rente (*rent-seeking*), yaitu partai memberikan harga sewa kendaraan untuk kandidat lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009, hal 3.

Politik kartel terjadi ketika kekuatan-kekuatan besar politik (parpol dan kandidat) dalam sistem politik, dimana masing-masing aktor tersebut memiliki kekuatan untuk menghalangi dan meminggirkan kekuatan-kekuatan politik baru untuk dapat memasuki ruang politik yang ada. Dalam beberapa hal, politik kartel banyak bekerja di arena pilkada. Proses pencalonan kepala daerah kerap kali diwarnai praktik persekongkolan antar partai politik. Mengapa politik kartel perlu diwaspadai terutama dalam konteks pilkada? Sebab cara kerja politik kartel tidak berkontribusi positif bagi pengembangan demokrasi lokal. Secara prosedural sistem ini kelihatan demokratis. Tetapi secara substansial, sistem ini justru mematikan demokrasi.<sup>14</sup>

Studi ini memperlihatkan bahwa persaingan antar partai di satu arena bisa berhenti atau menghilang diarena yang lain. Hilangnya persaingan antar partai tersebut diikuti dengan munculnya sistem kepartaian yang berbasis kartel. Pentingnya isu persaingan atau kartelisasi partai sangat jelas. Sistem kepartaian yang kompetitif merupakan pilar demokrasi agar sistem ini berjalan secara bermakna, terutama bagi negara demokratis. Logikanya, persaingan yang keras dan sehat dapat memunculkan oposisi yang kredibel. Oposisi ini pada gilirannya dapat menjalankan fungsi pengawasan, dimana partai-partai penguasa senantiasa diawasi guna mencegah mereka melakukan berbagai aktivitas yang melanggar hukum. Dalam sistem kepartaian yang terkartel, karena persaingan antar partai

---

<sup>14</sup>

<http://laparsulsel.or.id/2010/02/17/politik-kartel-dan-politik-bossism-dalam-pilkada/>. Politik Kartel dan Politik Bossism dalam Pilkada, oleh Abdul Karim Direktur Eksekutif LAPAR SULSEL. Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

digantikan kolusi dan oposisi absen, maka kita tidak mungkin berharap pengawasan dapat dijalankan.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka isu penting dalam penulisan ini adalah mengetahui cara terbentuknya politik kartel yang dilakukan partai politik pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Penulisan ini nantinya juga akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai kontestasi kedua pasangan calon pada pilkada Kota Blitar,<sup>15</sup> dan bagaimana kekuatan politik kartel menegaskan dominasi calon petahana Samanhudi Anwar – Santoso yang diusung dan didukung oleh 8 (delapan) partai parlemen Kota Blitar yang memenangkan pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana terbentuknya Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

Menganalisis terbentuknya Politik Kartel Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015.

---

<sup>15</sup><http://library.umn.ac.id/jurnal/public/uploads/papers/pdf/9727b66d710a27d7855315c5109e685.pdf>. Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, Pemilu 2014: Kartelisasi Elite Versus Representasi Publik. Diakses Pada 14 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang bisa dilihat dari sisi akademis maupun praktis, antarlain:

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

1. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi pembanding juga referensi bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi penulis secara khusus dan bagi perkembangan keilmuan secara umum, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

1. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencegah lahirnya politik kartel dari dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk politik kartel yang terjadi di pemerintahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Terdahulu

Studi penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penelitian. Penelitian terdahulu digunakan penulis untuk mengetahui perkembangan politik kartel yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia serta mencari apa yang baru dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam tabel 2.1 mengenai penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**

#### **Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1.	The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin <sup>16</sup> (Ambardi, 2008)	Penelitian deskriptif kualitatif melacak perilaku dan interaksi antar partai yang bergerak menuju ke arah kartel pada sistem kepartaian di Indonesia Era Reformasi	Setelah pemilu 1999, muncul sistem kepartaian yang terkartelisasi. Persaingan antar partai berhenti setelah pemilu dan tautan electoral berhenti ketika pembentukan kabinet berlangsung. Partai politik di Indonesia pun	Disertasi Ambardi memunculkan sistem kartel pada tatanan pemilu, sedangkan penelitian ini bermula pada kartelisasi partai yang terjadi saat pilkada.

<sup>16</sup> [http://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10\\_ACCESSION\\_NUM:osu1211901025](http://etd.ohiolink.edu/ap/10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:osu1211901025). The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and its Origin, Author: Kuskrido Ambardi. Diakses pada 13 Desember 2017, pukul 21.00 WIB.



			gagal menciptakan sistem kepartaian yang kompetitif.	
2.	Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015  (Ananda Putri, 2015)	<i>Descriptive-explanatory</i> dengan pendekatan kualitatif mengenai alasan dibalik sikap pragmatis partai politik dalam rekrutmen elit daerah yang memiliki kolerasi dengan kehadiran partai kartel.	Telah ditemukannya indikasi kartel partai politik pengusung dan pendukung petahana Herman HN. Kartel politik yang diciptakan terjadi dalam wujud meleburnya basis ideologi anatar partai dan nilai-nilai <i>platform</i> partai dalam mengusung petahana Herman HN pada Pilkada Kota Bandar Lampung.	Indikator terbentuknya jaringan kartel partai politik yang terjadi antara Pilkada Kota Bandar Lampung Dengan pilkada Kota Blitar Tahun 2015.

Sumber: Hasil olahan penulis 2017

Pada penelitian terdahulu, penelitian yang sangat dan dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian terkait kartelisasi partai politik ini terletak pada penelitian Ambardi dan Ananda Putri. Perbedaan dengan penelitian Disertasi Ambardi terletak pada tingkat elektoralnya. Jika Ambardi memfokuskan pada sistem kartel tingkat nasional, maka pada penelitian ini penulis memfokuskan pada tingkat proses elektoral daerah. Penelitian Ambardi ini mengarah pada ideologi dan konteks struktur politik Era Reformasi. Sedangkan, penelitian ini mencoba menggali apa yang kurang dari penelitian Ambardi, yakni dinamika

antara aktor (dalam hal ini petahana kepala daerah Kota Blitar serta para petinggi partai), sistem dan struktur internal partai. Sehingga penelitian ini tidak hanya meneliti partai politik pengusung kepala daerah melainkan seluruh jaringan yang telah membentuk kartel. Penelitian Ambardi ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis persoalan kartelisasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kota Blitar. Peneliti dapat menganalisa perbedaan kartelisasi yang terjadi di ranah pilkada dengan ranah pemilu yang Ambardi teliti dalam disertasinya.<sup>17</sup>

Selanjutnya, perbedaan penelitian dari Ananda Putri terletak pada indikator penelitian. Indikator terbentuknya jaringan kartel partai politik yang terjadi antara Pilkada Kota Bandar Lampung dengan pilkada Kota Blitar Tahun 2015 tentunya berbeda. Penelitian Ananda putri ini mampu memberikan bantuan penulis terhadap penelitian ini, yang mana penulis dapat mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja penyebab kartel ini muncul pada pemilihan kepala daerah. Serta membandingkan persoalan kartelisasi yang muncul di Kota Blitar dengan penelitian Ananda Putri.<sup>18</sup>

## 2.2 Dasar Teoritis

Pemilu yang bebas adalah satu-satunya kriteria untuk mengetahui apakah suatu sistem kepartaian kompetitif atau tidak. Kita akan kehilangan pemahaman tentang sifat interaksi antar partai di arena yang lain. Jika kita hanya bersandar pada definisi ini saja kita tidak dapat membandingkan dengan jelas antara

---

<sup>17</sup>Kuskridho Ambardi, *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*, Disertation, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, The Ohio State University 2008.

<sup>18</sup>Ananda Putri Sujatmiko, *Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2016.

persaingan dengan kartelisasi. Sejauh pemilu digelar secara bebas, kita segera dapat menyatakan bahwa sistem kepartaian di Indonesia adalah kompetitif dan kemungkinan jauh dari praktik kartel.

Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya dan ini kemudian menjadi identitas partai. Ideologi yang dianut oleh partai bersangkutan dapat digunakan untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Hal yang sama seperti diuraikan oleh De Swaan yang menekankan betapa pentingnya ideologi partai dalam pembentukan koalisi. Akan tetapi, dalam konteks koalisi yang terbentuk pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015 pragmatisme politiklah yang menjadi faktor terbentuknya politik kartel pada partai politik.<sup>19</sup>

### 2.2.1 Demokrasi Elektoral

Membicarakan masalah kartel partai dalam demokrasi electoral sangatlah terkait dengan krisis kepercayaan dalam demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat tiga penyebab alasan mengapa proses demokrasi menjadi macet. **Pertama**, saluran aspirasi publik tidak diperhatikan oleh para pemangku pejabat publik ketika menjalankan roda pemerintahan. Para pejabat publik berkembang menjadi elite oligarkis yang lebih mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok di atas kepentingan publik. **Kedua**, tidak adanya agen penghubung yang menjembatani antara kepentingan publik dengan pemerintah. Adapun partai

---

<sup>19</sup> <http://www.jadwalresmi.com?2015/11/hitung-cepat-hasil-pilkada-blitar.html>. Hitung Cepat Hasil Pilkada Blitar 2015-2016 Jawa Timur. Diakses pada 13 Desember 2017, pukul 21.34 WIB.



politik yang selama ini menjembatani kurang begitu memiliki peranan signifikan dalam memberikan aspirasi. **Ketiga**, munculnya perilaku *kleptokrat* yang dilakukan oleh para pemangku jabatan publik. Dalam hal ini, perilaku *kleptokrat* sendiri ditunjukkan dengan adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para elite dalam menjarah anggaran publik. Hal tersebut tentu sudah menyalahi arti demokrasi sendiri dengan menjadikan demokrasi sebagai ajang unjuk kekuasaan pribadi dan kelompok.<sup>20</sup>

Kartel sendiri merupakan istilah baru dalam lanskap sosial dan politik di Indonesia. Karena kartel berasal dari bahasa ekonomi yang mengindikasikan adanya partisipasi kekuasaan ekonomi dalam suatu kelompok berikut dengan regulatornya. Istilah kartel dalam politik Indonesia sendiri pertama kali digunakan oleh Slater (2004) yang menyebutkan kartel sebagai usaha untuk membangun aliansi kekuasaan antara partai pemenang dengan partai yang kalah dalam pemilu demi harmonisasi kekuasaan.<sup>21</sup> Mengacu pada sistem kepartaian, dimana fenomena yang terjadi ini dapat dijelaskan kedalam teori *cartelized party system* atau sistem kartelisasi partai. Kontruksi teori politik kartel ini dikembangkan pertama kali oleh Richard S Katz dan Peter Mair yang awalnya digunakan untuk menganalisa perkembangan baru dalam sistem kepartaian.<sup>22</sup> Partai pemenang membutuhkan suara partai yang kalah untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan meminimalkan suara kritis dari pihak yang kalah terhadap jalannya pemerintahannya.

---

<sup>20</sup><http://library.umn.ac.id/jurnal/public/uploads/papers/pdf/9727b66d710a27d7855315c5109e685.pdf>. Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, Pemilu 2014: Kartelisasi Elite Versus Representasi Publik. Diakses Pada 14 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Adapun karakteristik mendasar dari pada kelompok kartel sendiri kemudian meniadakan adanya batasan antara pemenang dan oposisi. Konteks ideologi dan program partai menjadi tidak penting untuk dibicarakan dan konsekuensi untuk masuk pemerintahan terbuka bagi semua partai asal masuk menjadi anggota koalisi. Bagi publik, pemilu merupakan bentuk instrumen representasi suara mayoritas yang perlu diperjuangkan dan direalisasikan. Namun, justru dalam proses tersebut terjadi proses pembajakan oleh para elite. Esensi demokrasi yang ingin direalisasikan dalam tatanan sistem demokrasi perwakilan justru tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Posisi kartel yang sedemikian kuat sendiri sudah membuat posisi publik kian terjepit dalam dalam memperjuangkan aspirasi dalam pemilu. Dengan menguatnya kartel tersebut, jika sudah demikian, maka makna pemilu sebagai sarana suksesi kekuasaan justru semakin terkaburkan.<sup>23</sup>

Sartori membahas istilah sistem kepartaian yang kompetitif dan non-kompetitif dalam satu rangkaian. Menurutmya, suatu sistem kepartaian itu non-kompetitif jika, dan hanya jika, sistem itu tidak menghendaki adanya persaingan (antar partai) dalam pemilu.<sup>24</sup> Dengan kata lain, persaingan bermula ketika prinsip-prinsip pemilu dilanggar. Di sisi lain, kartel bisa dilihat sebagai lawan persaingan, dan bisa didefinisikan sebagai situasi dimana partai politik melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan programatis mereka demi sesuatu yang lain. Dan situasi ini memungkinkan karena semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Batas ideologi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

menjadi kabur, dan ideologi tidak menjadi penentu perilaku partai. Akibatnya, oposisi tidak dikenali lagi.<sup>25</sup>

**Tabel 2.3**

**Dimensi Perilaku Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Kompetitif vs  
Sistem Kepartaian Terkartelisasi**

Dimensi	Sistem Kepartaian Kompetitif	Sistem Kepartaian Terkartelisasi
 Ideologi dan program partai	Faktor penting dalam menentukan perilaku partai <sup>a</sup>	Faktor yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai <sup>b</sup>
 Perilaku koalisi	Cenderung membentuk koalisi berdasarkan ideologi atau program	Longgar dan <i>promiscuous</i> dalam membentuk koalisi <sup>b</sup>
 Oposisi	Ada dengan demarkasi yang relatif jelas <sup>a</sup>	Tidak ada <sup>b</sup>
 Dampak menang dan kalah dalam pemilu pada pembentukan pemerintahan	Konsekuensial	Inkonsekuensial <sup>b</sup>
 Metode dalam menangani isu-isu kebijakan	Dijalankan oleh masing-masing partai	Dijalankan oleh berbagai partai sebagai kelompok tunggal

<sup>a</sup> Diadaptasi dari karakterisasi partai-partai kartel Katz dan Mair (1995-1996)

<sup>b</sup> Diadaptasi dari sistem kepartaian Sartori

Sumber: Ambardi, 2009:29

Secara sistem, kartel tercipta dari sistem demokrasi yang belum sempurna.

Perumpamaan demokrasi sebagai manifestasi *one man, one vote, one value* masih dipahami secara literal dan tekstual, tanpa pernah ada usaha untuk memahami muatan aspirasi yang ingin diperjuangkan. Hal inilah yang menjadikan demokrasi,

<sup>25</sup> [dosen.uta45jakarta.ac.id/download.php?file=PDF%20Kuliah%20Umum%20Esty%20LIP%20L.pdf](https://dosen.uta45jakarta.ac.id/download.php?file=PDF%20Kuliah%20Umum%20Esty%20LIP%20L.pdf). Esty Ekawati. "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia pada Pilpres 1999, 2004, 2009 dan 2014", Diakses pada 13 Desember 2017, pukul 23.45 WIB.

secara sistem, lebih dipahami sebagai cara mencari kuasa dengan menggunakan popularitas dan materialitas saja. Secara struktur, kartel juga mengubah demokrasi menjadi ajang patronase kekuasaan.<sup>26</sup>

Kartel sendiri merupakan bentuk dari pada embrio reorganisasi elite yang ingin mempertahankan cara-cara politik predatorisme. Mereka memanfaatkan celah keluguan publik dalam melihat demokrasi sebagai alat perjuangan. Mayoritas penduduk Indonesia masih melihat bahwa demokrasi masih dipahami secara terbatas. Bagi masyarakat, proses demokrasi lebih dimaknai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mereka belum mengerti adanya proses advokasi terhadap kepentingan mereka ke dalam ranah publik. Celah itulah yang kemudian dimanfaatkan dalam kerangka pragmatisme politik yang dilakukan oleh parpol dan elite, terutama para kandidat pada pilkada.<sup>27</sup>

Pemahaman demokrasi yang melulu dipahami secara formal ini yang mengebiri hak dan kewajiban masyarakat. Pemilu kemudian hanya dipahami secara formal sebagai manifestasi demokrasi oleh publik. Adanya model pemilihan langsung yang mulai dijalankan pada tahun 2004 merupakan hal baru dalam eksperimentasi demokrasi Indonesia. Dalam konteks tersebut, demokrasi masih dianggap awam dalam pendidikan politik Indonesia secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia tengah memasuki periode rekonsiliasi dan konsolidasi paska konflik sekaligus transisi demokrasi. Maka konteks pemilu

---

<sup>26</sup><http://library.umn.ac.id/jurnal/public/uploads/papers/pdf/9727b66d710a27d7855315c5109e685.pdf>. Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, Pemilu 2014: Kartelisasi Elite Versus Representasi Publik. Diakses Pada 14 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*,



langsung kemudian masih dianggap sebagai suatu selebrasi politik semata yang dilakukan oleh elite dan masyarakat.<sup>28</sup>

Dikarenakan sifatnya yang masih eksperimentatif, maka proses demokrasi elektoral pada akhirnya mulai mengenalkan istilah-istilah baru guna meningkatkan kualitas pemilu seperti *threshold* (bilangan pembagi pemilih), baik itu *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold*. Implementasi kebijakan elektoral tersebut dirasa urgen dan signifikan mengingat konteks multipartai di Indonesia mempunyai indikasi patologis yakni hanya mengejar *rente* kekuasaan dan berebut materi anggaran. Asumsi tersebut sebenarnya tidaklah salah mengingat esensi pendirian partai adalah mewujudkan aspirasi publik dalam ranah kebijakan dan pemerintahan.<sup>29</sup>

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis.<sup>30</sup> Demokrasi empirik-minimalis berpijak pada gagasan Shumpeter, Shumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat.<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa esensi dari demokrasi adalah suatu kekuasaan yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki legitimasi dimata masyarakat (rakyat) melalui sistem yang kita maknai dengan pemilu. Berkaitan dengan kedudukan warga negara, mereka mempunyai hak yang digunakan secara periodik untuk memilih

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*, Bandung: Humaniora, 2008, hlm, 38.

<sup>31</sup> Lary Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hlm, 9.

pihak-pihak tertentu yang di pilihnya dan kemudian dapat menggunakan legitimasi tersebut dengan mengatasnamakan kehendak dari warga (rakyat).

Sama halnya dengan Huntington juga menganut pijakan yang sama yaitu menekankan pemilu yang kompetitif sebagai esensi dari demokrasi.<sup>32</sup> Hal lain juga disebutkan bahwa bahwa demokrasi adalah membatasi pihak-pihak tertentu dalam menjalankan kekuasaannya. Ketika pemerintah terpilih (periode sebelumnya) kalah maka diwajibkan menyerahkan kekuasaannya. Disini mengapa pemilu menjadi tolak ukur demokrasi? Karena dengan adanya pemilu maka terdapat kompetisi dalam memperbutkan kekuasaan. Ketika muncul istilah kompetisi maka hal ini dapat dipahami dengan tidak adanya pihak yang mendominasi dalam penentuan siapa yang berhak memegang legitimasi politik (Kekuasaan). Dengan adanya kompetisi maka hal ini menunjukkan adanya beberapa pihak yang mempunyai kesempatan yang sama lalu kemudian bersaing dalam kompetisi tersebut (pemilu).<sup>33</sup>

Hal seperti ini tentunya tidak bisa terwujud apabila partai politik bergerak menuju kearah kartel. Dalam hal ini kompetisi diarena pemilu tidak dapat berjalan secara kompetitif. Hilangnya arena persaingan diikuti dengan munculnya sistem kepartaian yang berbasis kartel. Pentingnya isu persaingan atau kartelisasi partai sangat jelas. Arena persaingan yang kompetitif merupakan pilar demokrasi agar sistem ini berjalan secara bermakna, terutama bagi negara demokratis. Logikanya, persaingan yang keras dan sehat dapat memunculkan oposisi yang kredibel. Oposisi ini pada gilirannya dapat menjalankan fungsi pengawasan, dimana partai-

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 34.

partai penguasa senantiasa diawasi guna mencegah mereka melakukan berbagai aktivitas yang melanggar hukum. Dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi, karena persaingan antar partai digantikan kolusi dan oposisi absen, maka kita tidak mungkin berharap pengawasan dapat dijalankan. Meskipun ada persaingan disitu, yang terjadi adalah persaingan tidak seimbang dimana pihak lawan tidak mempunyai peluang dan kesempatan yang sama kerana lawan lainnya di dukung oleh seluruh partai politik, sehingga peluang memperebutkan kekuasaan semakin kecil.

Pandangan yang lebih moderat kemudian coba diberikan oleh Larry Diamond yang pada dasarnya sepakat definisi minimalis yang diberikan oleh Schumpeter akan tetapi konsep minimalis tersebut Larry menyebutnya dengan demokrasi elektoral.<sup>34</sup> Menurut Larry Diamond konsep minimalis tentang demokrasi elektoral juga mengakui tingkat kebebasan tertentu (berbicara, pers, organisasi dan berserikat) agar kompetisi dan partisipasi menjadi lebih bermakna.<sup>35</sup>

Konsep demokrasi elektoral atau bisa disebut sebagai demokrasi prosedural seperti yang dibahas diatas menyisakan kerisauan terutama pada tataran empiris. Menurut Gerald F. Gaus salah satu dari kelemahan demokrasi minimalis adalah membolehkan bentuk-bentuk demokrasi yang sangat lemah.<sup>36</sup> Kemudian selanjutnya konsep demokrasi normatif-minimalis, demokrasi substantif atau demokrasi liberal. Konsep tersebut merupakan perluasan dari demokrasi elektoral atau minimalis yang kemudian mencoba menjawab

---

<sup>34</sup>Suyatno, (2008), *Op.Cit*, hlm, 43.

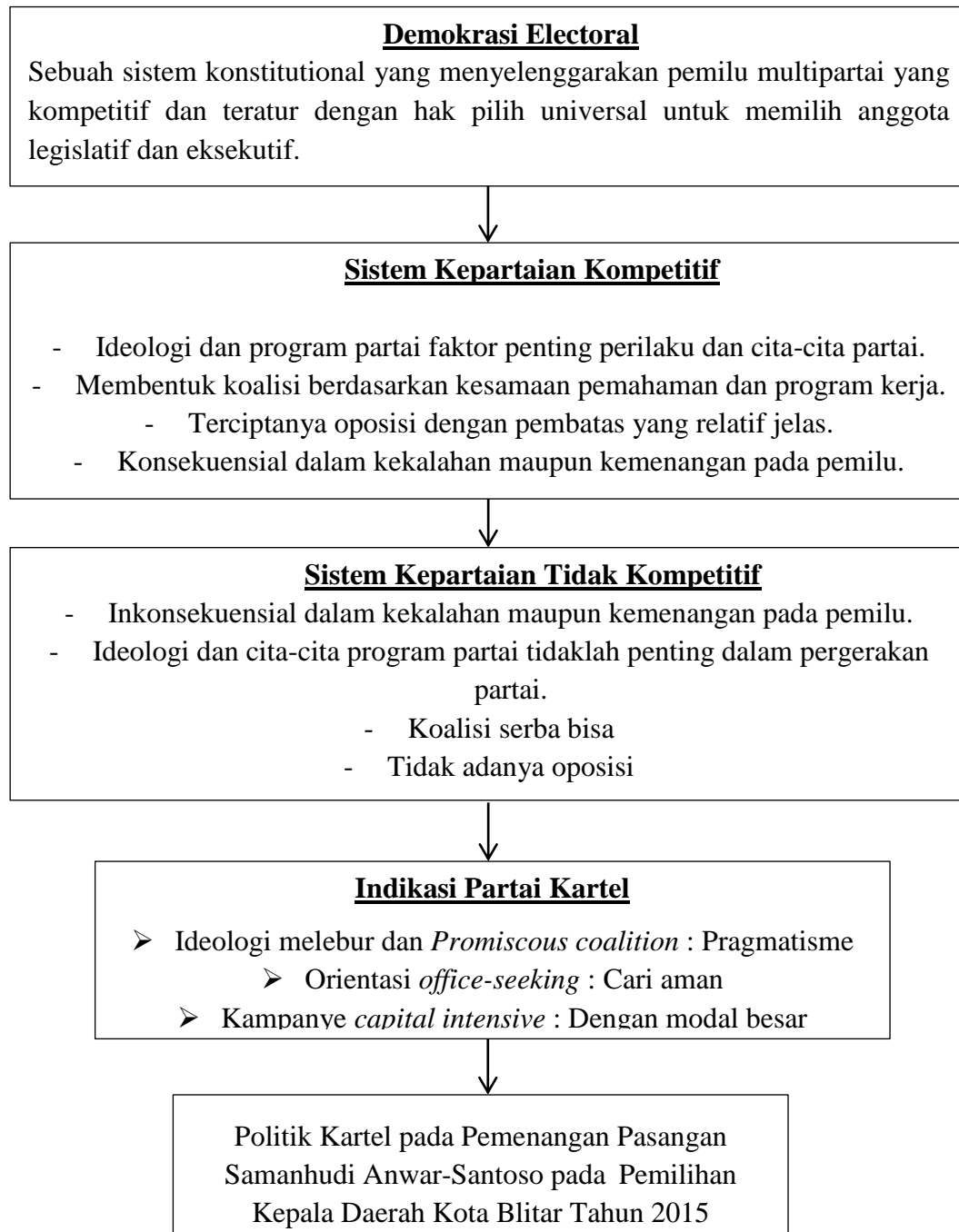
<sup>35</sup>Larry Diamond (2003), *Op.Cit*, hlm, 9.

<sup>36</sup>Gerald F. Gaus et. All, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm, 342.

kerancuan-kerancuan tersebut yang kemudia mempertanyakan kembali makna kebebasan dan kedaulatan warga yang dihadapkan demokrasi.

### 2.3 Kerangka Alur Pemikiran Penelitian

#### Bagan 2.3 Krangka Alur Pemikiran Penelitian



Sumber: Hasil olahan penulis (2017)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode ini sendiri bisa dikatakan sebagai prosedur atau tata cara yang tersusun secara sistematis untuk mengulas atau mengetahui sesuatu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena pemilihan metode penelitian secara garis besar dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian metode yang digunakan tersebut dengan objek yang akan diteliti.<sup>37</sup> Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

##### **3.1.1 Kualitatif**

Penelitian ini dikategorikan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>38</sup> Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomena yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm 7

<sup>38</sup>Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta:1988, hlm 63

<sup>39</sup><http://slideplayer.info/slide/2937851/>. Penelitian Kualitatif, Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

Kajian penelitian kualitatif berawal dari kelompok ahli sosiologi ‘mahzab Chicago’ pada 1920-1930 yang menggaris bawahi pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kelompok kehidupan manusia. Pada waktu yang sama, kelompok ahli antropologi menggambarkan *outlined* dari metode karya lapangan, yang melakukan pengamatan langsung ke lapangan, untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat lokal. Suatu kumpulan istilah, konsep, asumsi yang kompleks dan saling terkait melingkupi istilah kualitatif.<sup>40</sup>

Metode yang diambil penulis adalah dengan menggunakan metode “*explanatory*” yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, serta metode “*indepth interview*” yaitu wawancara secara mendalam dengan sumber atau responden. Wawancara secara mendalam ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui persoalan yang terjadi dari kasus yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Selain itu metode ini di kombinasikan dengan pengumpulan dokumen tertulis, media cetak atau surat kabar, yang mana ini bisa melengkapi sumber data yang diperoleh.

### 3.2 Desain Penelitian

Menurut Neuman,<sup>41</sup> terdapat tujuh langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian kualitatif. Pertama, mengetahui inti permasalahan. Pada penelitian ini, inti permasalahan merefleksikan terjadinya fenomena partai kartel di tingkat lokal Kota Blitar, yakni dengan menyatunya sejumlah partai besar dengan ideologi yang berbeda-beda dan mendukung calon petahana atas asumsi

---

<sup>40</sup>Agus Salim, *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm.33

<sup>41</sup>Neuman W. Laurence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Whitewater:University of Wisconsin, 2011, hlm. 15



pragmatisnya, melalui mekanisme pilkada serentak 2015. Kedua, mengadopsi perspektif penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksplanatif guna mengidentifikasi refleksi sistem kartelisasi partai politik dalam melakukan rekrutment elit politik. Ketiga, melakukan desain penelitian yakni melalui penelitian kualitatif. Keempat, mengumpulkan data penelitian. Data penelitian dalam hal ini dikumpulkan dari observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi guna memperkuat dugaan berdasarkan idealitas teori. Kelima, menganalisis data. Keenam, proses interpretasi data dengan menafsirkan data. Ketujuh, yakni mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain.

### **3.3 Lokasi dan Obyek Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Blitar dengan berbagai tempat yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah petahana pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015 Samanhudi Anwar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah relasi antar partai politik parlemen Kota Blitar yang terindikasi membentuk sistem kartel pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Oleh karena itu lokasi penelitian ini bertempat di Kota Blitar.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Dalam sebuah penelitian, data menjadi instrumen yang penting karena menjadi kumpulan keterangan tentang objek yang sedang diteliti.<sup>42</sup> Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

---

<sup>42</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hlm, 123.

dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif mencakup dua jenis data, yakni data utama atau data primer dan data tambahan atau data sekunder.<sup>43</sup> Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut, yakni data primer dan data sekunder.

### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.<sup>44</sup> Penulis akan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*), serta observasi langsung oleh penulis. Saat menetapkan informan, penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian. Maka dari itu, pencarian informan yang tepat sangat penting dalam penelitian ini guna mengetahui langsung penyebab partai-partai mendukung petahana Samanhudi Anwar.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder.<sup>45</sup> Selain itu data sekunder dibedakan atas dua jenis data yaitu; *Pertama*, internal data diperoleh dari dalam, misalnya dari instansi. *Kedua*, eksternal data yang diperoleh dari luar lembaga instansi.<sup>46</sup> Biasanya bentuk dari data sekunder internal ini berupa dokumentasi maupun arsip-arsip resmi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka data yang akan digunakan penulis adalah arsip-

---

<sup>43</sup>Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm, 157.

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit*, hlm, 128.

<sup>45</sup>*Loc., Cit*

<sup>46</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm, 55.

arsip resmi dari masing-masing partai politik dan instansi terkait. Sedangkan data eksternal yang dapat mendukung penelitian ini penulis mencoba berusaha mendapatkannya di media-media seputar pemberitaan pilkada Kota Blitar.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk lebih memahami apa saja yang dimaksud dari teknik pengumpulan data yang digunakan penulis disini, berikut penulis jelaskan satu persatu dari penggunaan teknik pengumpulan data.<sup>47</sup>

#### 3.5.1 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau pihak yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>48</sup> Pengertian lain dari metode wawancara adalah metode yang mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap muka dengan orang itu.<sup>49</sup> Wawancara juga didefinisikan sebagai suatu pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.<sup>50</sup>

Dalam wawancara perlu juga diperhatikan bentuk-bentuk wawancara yang dipilih dalam penelitian. *Pertama*, wawancara sistematis. Wawancara sistematis

---

<sup>47</sup> <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. Hendryadi, Metode Pengumpulan Data. Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 00.00 WIB.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm 129.

<sup>50</sup> Lisa Horizon, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm, 150.

adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. *Kedua*, wawancara terarah. Wawancara terarah dilakukan dengan cara bebas, tapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan oleh pewawancara sebelumnya. *Ketiga*, wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal. Wawancara ini menggunakan *guidetertentu* dan semua pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan pada saat pewawancara bersama-sama responden.<sup>51</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model atau jenis wawancara terarah untuk mengulas tentang penelitian ini. Wawancara terarah biasanya akan lebih luwes digunakan dalam mewawancarai responden terkait permasalahan yang pewawancara tanyakan. Tidak adanya batasan konteks permasalahan yang bisa di wawancarai menjadikannya metode ini sangat cocok ketika harus digunakan untuk mewawancarai responden atau narasumber, terutama partai politik yang akan dijadikan objek penelitian. Selain itu, jenis wawancara ini memberikan alur yang bebas terhadap respon yang diberikan responden atau narasumber.

Selain wawancara terarah, wawancara mendalam juga peneliti gunakan dalam pengumpulan data disini. Wawancara jenis ini memberikan kemungkinan terhadap jawaban panjang lebar dari terwawancara. Selain itu juga, wawancara ini menggunakan sampel informan yang sedikit. Dimana, wawancara mendalam

---

<sup>51</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit*, hlm, 135.

adalah tentang mendengar responden atau narasumber berbicara untuk memperoleh suatu wawasan tentang pandangan mereka, dan bagaimana mereka memandang segala hal bagaimana adanya.

Selain metode yang telah dijelaskan, untuk menetapkan narasumber dalam wawancara nantinya peneliti menggunakan teknik penentuan narasumber. Hal ini bertujuan agar informan yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian atau bisa dikatakan penunjukan narasumber khusus yang dirasa dapat memberikan informasi terkait penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian tentang Kartelisasi partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015, penulis memilih narasumber wawancara yang dirasa dapat memberikan keterangan terkait penelitian ini. Adapun narasumber yang ditetapkan pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Narasumber Wawancara**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Muh. Samanhudi Anwar	Petahana, Walikota Blitar 2016-2020
2	Santoso	Wakil Walikota Blitar 2016-2020
3	Sugeng Praptono	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Kota Blitar
4	Mashudi	Komisioner KPUD Kota Blitar
5	Hardi Husodo/Dodok	Ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar
6	Tan Ngi Hing	Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Blitar
7	Leo Sudilaksono	Ketua DPD PKS Kota Blitar
8	Muchson	Ketua DPD Partai Nasdem Kota Blitar
9	Ridho Handoko	Sekretaris DPC Partai Demokrat

10	Muchsin	Calon Walikota Blitar Pilkada Tahun 2015 Jalur Independent
11	Attho Urrohman	Ketua DPD Partai Hanura Kota Blitar Periode 2010-2015
12	Totok Sugiarto	Sekretaris DPC PKB Kota Blitar
13	Rachmad Fauzi	Sekretaris DPD PPP Kota Blitar

Sumber: *Hasil Olahan Peneliti, 2017*

### 3.5.2 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis. Studi ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.<sup>52</sup> Pada teknik pengumpulan data dokumentasi ini, data yang didapat bersumber dari data tertulis, seperti dokumen resmi dari instansi terkait, buku, jurnal, produk Undang-Undang dan lain-lain yang terkait penelitian ini. seperti laporan KUPD Kota Blitar dari Tahun 2010-2015. Sehingga data tersebut nantinya akan disesuaikan oleh penulis dalam subjek penelitian ini untuk dapat diolah sebagai data penelitian.

### 3.6 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, maka dalam suatu penelitian tahap berikutnya yang dilaksanakan adalah tahapan analisis data. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik. Terdapat beberapa teknik dalam analisis data, salah satunya adalah model alir (*flow model*) model alir ini terbagi menjadi tiga tahapan

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, hlm143.



analisis data yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>53</sup> *Pertama*, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. *Kedua*, penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang diterapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Agus Salim, *Op. Cit.* hlm, 21.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 22-23.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PILKADA KOTA BLITAR**

Pada kajian sebelumnya, peneliti telah memaparkan penggambaran dari bentuk politik kartel, baik dari aspek teoritis hingga praktik yang didukung dengan penelitian lebih lanjut dalam lingkup nasional. Kemudian, peneliti juga sudah menjabarkan metode serta metodologi yang akan digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini. Sehingga, pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan gambaran umum obyek penelitian, yakni terkait pelaksanaan pilkada Kota Blitar termasuk para kandidat pilkada, serta objek pada penelitian ini yaitu partai pengusung PDIP dan partai pendukung petahana Samanhudi Anwar yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.

#### **4.1 Profil Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar**

Kota Blitar memiliki tiga kecamatan yang sekaligus menjadi tiga daerah pemilihan pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan. Kecamatan atau daerah pemilihan tersebut diantaranya Sukorejo, Sananwetan, dan Kepanjenkidul. Dari keseluruhan kecamatan tersebut terdiri dari 21 kelurahan yang terbagi 7 kelurahan setiap kecamatan.

Pilkada di Kota Blitar sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat pertamakali dilaksanakan pada Tahun 2005. Pada tahun sebelumnya pemilihan Walikota Blitar ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan pilkada di Kota Blitar terakhir diselenggarakan pada Tahun 2015. Sejak dilaksanakannya pilkada langsung yang dipilih oleh masyarakat di Kota Blitar pada

Tahun 2005 hingga 2015, tercatat selalu memunculkan 2 periode kepemimpinan jabatan setiap petahana Walikota mencalonkan diri kembali.

Djarot Saiful Hidayat dan Samanhudi Anwar merupakan kandidat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Blitar sehingga mampu menjadi kepala daerah selama 2 periode terus-menerus. Serta dengan partai pengusung pemenang yang sama yakni PDIP.

**Tabel 4.1**

**Nama Walikota, Kota Blitar Tahun 2000 - 2015**

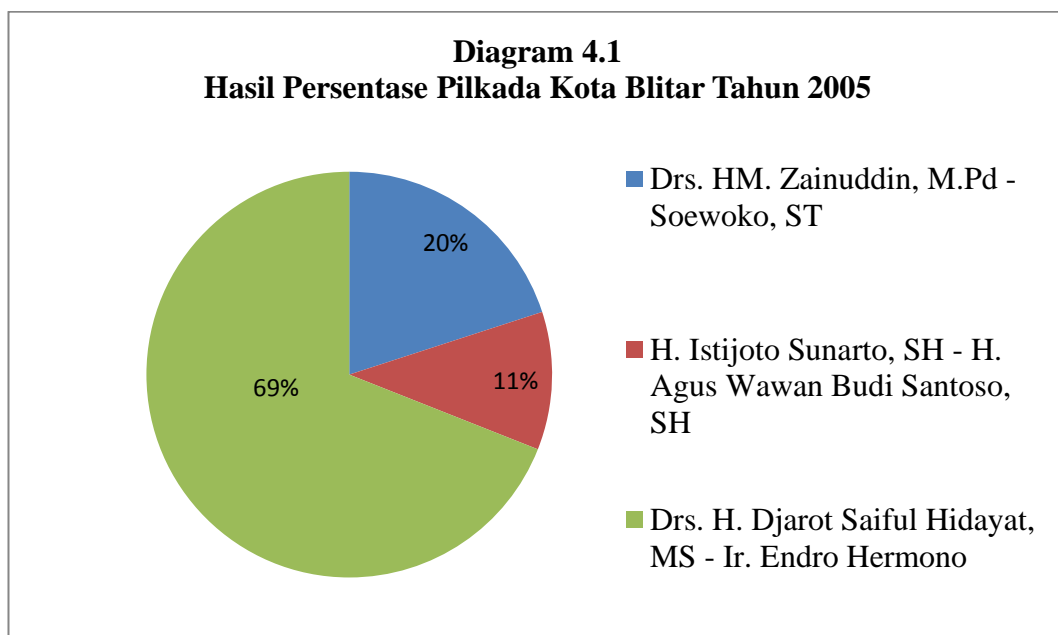
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
1.	Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS.	Walikota Blitar	2000 – 2005 dan 2005 – 2010 (2 periode)
2.	Muhammad Samanhudi Anwar, SH, MM.	Walikota Blitar	2010 – 2015 dan 2015 –2020 (2 periode)

Sumber: *Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017*

**a. Pilkada Kota Blitar Tahun 2005**

Tahun 2005 merupakan tahun pertama kalinya pemilihan kepala daerah di Kota Blitar diselenggarakan dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Ada 3 pasangan calon Walikota Blitar yang mengikuti pilkada Tahun 2005. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 96.573 pemilih yang terbagi atas 344 Tempat

Pemungutan Suara (TPS)<sup>55</sup>. Dari hasil rekapitulasi 69.573 pemilih menggunakan hak suaranya dalam pilkada Kota Blitar Tahun 2005. Berikut merupakan persentase perolehan suara dari 3 pasangan calon Walikota Blitar pada pilkada Tahun 2005.



Sumber: *Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar Tahun 2017*

Dari hasil pilkada Kota Blitar Tahun 2005 jabatan Walikota Blitar dengan masa jabatan Tahun 2005-2010 kembali dimenangkan oleh Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS dengan pasangan Wakil Walikotanya yakni Ir. Endro Hermono. Pasangan ini diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat. Sebelumnya Djarot Saiful Hidayat telah menjabat sebagai Walikota Blitar pada masa jabatan Tahun 2000-2005 yang mana pemilihannya melalui penunjukan pemerintah pusat. Sehingga dengan kemenangan pada pilkada Tahun 2005 menjadikan periode kedua Djarot Saiful Hidayat menjabat sebagai Walikota Blitar.

<sup>55</sup>Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Blitar.

### **b. Pilkada Kota Blitar Tahun 2010**

PDIP kembali mengukuhkan dominasinya dalam pemilihan Walikota Blitar Tahun 2010-2015. Meski sempat tertantang oleh Partai Demokrat pada pelaksanaan pemilu Tahun 2004-2009. Namun di tahun ini Partai Demokrat hanya menempati urutan ke-Tiga.<sup>56</sup> Rivalitas antara PDIP dengan Partai Demokrat di Kota Blitar ini cukup menarik karena terdapat pengaruh dari dua tokoh besar. Yakni sosok mantan Presiden RI-1 Soekarno sebagai ikon PDIP. Hubungan antara Soekarno dengan PDIP terjadi tidak secara langsung, melainkan ideologi dari PDIP sebagai partai nasionalis berazaskan Marhainisme. Marhainisme<sup>57</sup> sendiri merupakan ideologi yang dikembangkan oleh Soekarno. Ideologi ini menentang penindasan manusia atas manusia, dan bangsa atas bangsa. Dengan tetap memegang prinsip inilah PDIP Kota Blitar mampu mengambil suara hati masyarakat Kota Blitar. Kedua, tokoh yang mempengaruhi suara Partai Demokrat di Kota Blitar adalah sosok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yodhoyono, yang ibundanya Habibah bermukim di Kota Blitar.

Pada pilkada Kota Blitar Tahun 2010 ini, PDIP berkoalisi dengan PKB, dengan mengusung Samanhudi Anwar – Purnawan Buchori. Total suara yang diperoleh adalah sebesar 31.994 dari total 75.523 suara sah. Yang sekaligus dengan hasil ini membuat pasangan Samanhudi Anwar – Purnawan Buchori menempati urutan pertama dari hasil pilkada 2010. Urutan kedua justru diraih pasangan Anang Triono – Bambang Gunawan dengan 17.684 suara. Yang

---

<sup>56</sup><http://regional.kompas.com/read/2010/05/27/2025713/PDIP.Menang.di.Blitar.Demokrat.Nomor.3>. Diakses pada tanggal 3Desember 2016 pukul 09.30 WIB

<sup>57</sup><http://gmni.ft.ugm.tripod.com/marhaenisme.html>. Diakses pada tanggal 3Desember 2016 pukul 09.30 WIB

mengejutkan justru pasangan ini bukan diusung oleh Partai Demokrat, tetapi Partai Golkar dan PKNU. Posisi ketiga ditempati pasangan Heru Sunaryanta – Sholih Muadi yang diusung oleh Partai Demokrat dengan total mengumpulkan suara sebesar 16.841 suara. Di peringkat keempat, terdapat pasangan Endro Purnomo – Azhar Anwar yang diusung oleh Partai PPP dan PKS dengan total meraup 7.638 suara. Pasangan terakhir yang mendapatkan suara terkecil adalah calon dari jalur perseorangan, yaitu Zainudin – Masrukin yang hanya mengumpulkan 1.636 suara saja.

Berikut ini merupakan pasangan calon Pilkada Kota Blitar tahun 2010 beserta hasil perolehan suara.

**Tabel 4.2**

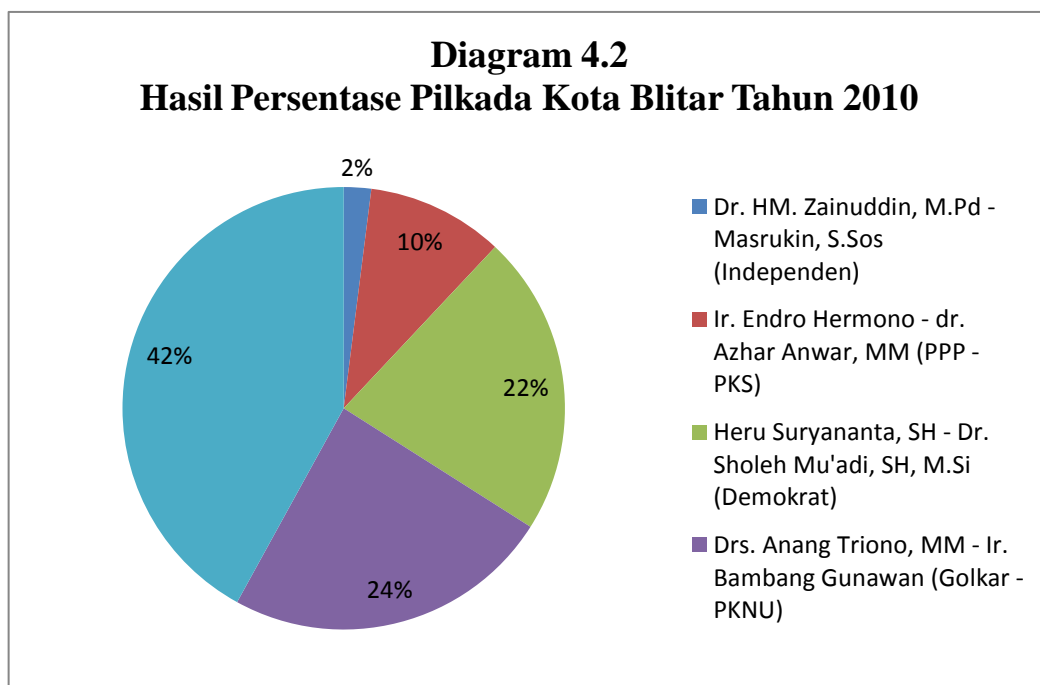
**Rekapitulasi Perolehan Suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2010**

No	Pasangan Calon	Kecamatan			Jumlah (%)
		Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
1	H. Endro Hermono dan Azhar Anwar	1.966	2.137	3.265	7.368 (9,75%)
2	Muh. Samanhudi Anwar dan Purnawan Buchori	12.469	9.216	10.309	31.994 (42,36%)
3	Anang Triono dan Bambang Gunawan	4.767	6.194	6.723	17.684 (23,41%)
4	HM. Zainudin dan Masrukin	477	410	749	1.636 (2,16%)
5	Heru Sunayanta dan Sholih Mu'adi	6.575	4.257	6.009	16.841 (22,29%)
Jumlah Suara Sah		26.254	22.214	27.055	75.523 (100%)
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		893	640	995	2528

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017



Hasil pilkada Kota Blitar Tahun 2010 dimenangkan oleh Muh. Samanhudi Anwar yang diusung oleh PDIP. Hal ini merupakan kemenangan kedua PDIP pada penyelenggaraan pilkada di Kota Bliatar. Sebelumnya pada pilkada tahun 2005, PDIP dengan mengusung Djarot Saiful Hidayat sebagai Walikota Blitar Tahun 2005-2010 juga berhasil menang. Sebelum mencalonkan diri sebagai Walikota Blitar Tahun 2010, Samanhudi Anwar sendiri merupakan Ketua DPRD Kota Blitar Tahun 2004-2009 dengan parpol pemsung PDIP. Samanhudi Anwar mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam parlemen ketika ia menjabat sebagai Ketua DPRD, sehingga ia mampu memenangkan pilkada Kota Blitar Tahun 2010. Djarot Saiful Hidayat sendiri tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Walikota Blitar karena telah menjabat selama 2 periode yakni pada Tahun 2000-2005 dan 2005-2010.



Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017

### **c. Pilkada Kota Blitar Tahun 2015**

Dari hasil Rapat Pleno KPU Kota Blitar, pasangan Muh. Samanhudi Anwar – Santoso (Samson) dan pasangan Muchsin – Dwi Sumardianto (Sinar), secara resmi telah ditetapkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 dengan peraturan KPU No.9 Tahun 2015 pasal 67 ayat 2.<sup>58</sup> Dari hasil rapat pleno, hanya terdapat dua pasangan calon saja yang akan maju dalam pilkada Kota Blitar yakni pasangan Samanhudi Anwar-Santoso dan Muchsin-Dwi Sumardianto. Terdapat penurunan jumlah kompetitor pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015. Dari yang tadinya Tahun 2010 berjumlah 5 pasangan calon yang akan maju, kini hanya ada 2 pasangan calon saja yang maju. Hal ini tidak terlepas dari pesimisnya pasangan calon lain yang ingin maju, yang harus berhadapan dengan petahana Samanhudi Anwar. Sehingga tidak banyak pasangan yang berani maju pada pilkada Tahun 2015. Bahkan partai politik tidak ada satu pun yang berani mencalonkan ataupun mengusung calon dari kader partai atau dari masyarakat umum kecuali PDIP sendiri.

Lebih lanjut daftar nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015 beserta dengan nomor urutnya, telah dipublikasikan oleh KPU Kota Blitar di Kantor KPU sendiri dan Media Kota Blitar. Hal ini untuk disosialisasikan langsung kepada masyarakat Kota Blitar sesuai dengan

---

<sup>58</sup>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada <http://kpu.blitarkota.go.id/>. Diakses pada 3 Desember 2016 pukul 20.00 WIB.

Pengumuman KPU Kota Blitar Nomor: 550/KPU-Kota-014.329960//VIII/2015.<sup>59</sup>

Hal ini disampaikan kepada masyarakat agar mengetahui siapa saja yang akan mencalonkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015.

Pilkada Tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia. Kota Blitar ikut serta dalam Pilkada serentak tahun 2015 dikarenakan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Blitar telah habis pada bulan Agustus 2015. Pilkada Kota Blitar tahun 2015 diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Mochsin - Dwi Sumardianto dari perorangan atau independent dan Muh. Samanhudi Anwar - Santoso dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

**Table 4.3**  
**Partai Pengusung Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015**

Nomor Urut	Nama Pasangan Kandidat	Partai Pengusung
1	Mochsin dan Dwi Sumardianto	(Perseorangan)
2	Muh. Samanhudi Anwar dan Drs. H. Santoso, M.Pd	PDIP , Nasdem , Gerindra, PKS, Golkar, PAN, Hanura, dan Demokrat.

Sumber: *KPU Kota Blitar Tahun 2015.*

---

<sup>59</sup>Surat Keputusan KPU Kota Blitar dengan Nomor: 550/KPU-Kota-014.329960//VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015.

- Keterangan: Hanya **PKB dan PPP** yang tidak ikut dalam mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso pada pilkada Kota Blitar. Namun, PKB dan PPP pun juga tidak mengusung calon lain pada pilkada di Kota Blitar ini.

Bergabungnya hampir seluruh Partai Politik Kota Blitar yang ikut mendukung petahana Samanhudi Anwar jelas tidak memungkinkan celah kemenangan bagi pasangan Muchsin dan Dwi Sumardianto yang berangkat dari jalur perseorangan/*independent*. Hal tersebut pun dibuktikan dengan hasil pilkada serentak di Kota Blitar Tahun 2015.

**Tabel 4.4**

**Rekapitulasi Perolehan Suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015**

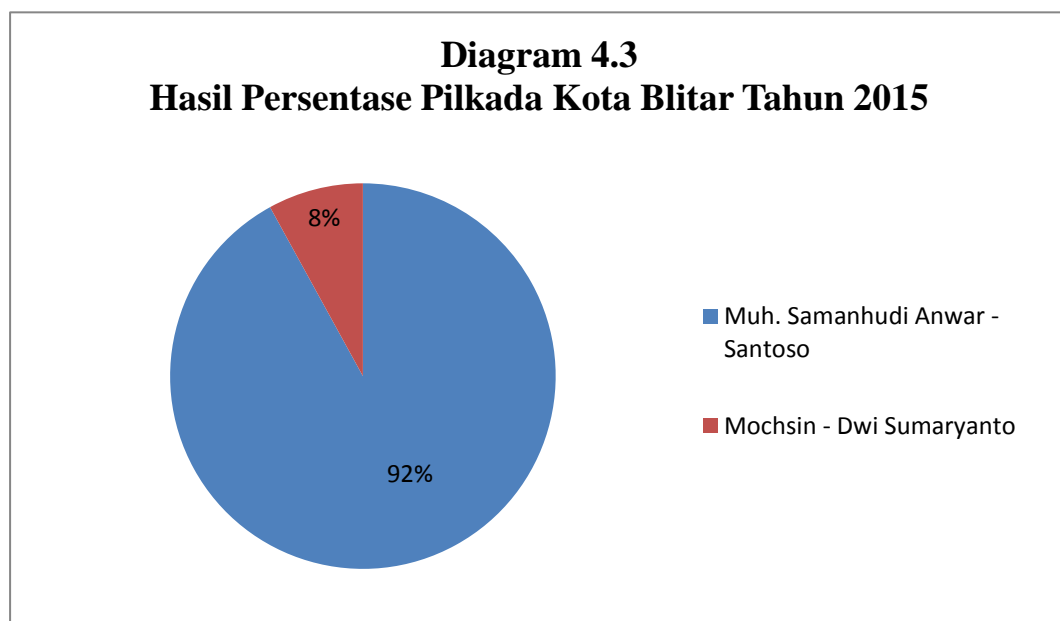
No	Pasangan Calon	Kecamatan			Jumlah
		Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
1	Muchsin dan Dwi Sumardianto	1.614	1.966	2.103	5.683 (8%)
2	Muh. Samanhudi Anwar dan Santoso	24.015	19.059	24.860	67.934 (92%)
Jumlah Suara Sah		25.629	21.025	26.963	73.617 (100%)
Jumlah Suara <b>Tidak Sah</b>		1.046	1.320	1.406	3.772

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017

Hasil Pilkada tahun 2015 merupakan hasil mutlak kemenangan Samanhudi Anwar dalam menjabat sebagai kepala daerah di Kota Blitar untuk periode kedua yakni 2016-2021. Perjuangan Samanhudi Anwar dalam Pilkada tahun 2015 dirasa tidak terlalu berat dikarenakan popularitasnya yang tinggi di masyarakat. Hal tersebut juga membuat koalisi parpol pendukungnya yang secara keseluruhan dari parlemen mendukungnya, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai

Persatuan Pembangunan (PPP). Lawan pasangan calon Samanhudi Anwar dalam Pilkada tahun 2015 dirasa juga tidak terlalu berat dikarenakan berasal dari jalur perorangan atau *independen*. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Pilkada sebelumnya pasangan calon walikota yang berasal dari jalur perorangan mendapatkan hasil tidak memuaskan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Blitar.

Berikut ini merupakan hasil persentase perolehan suara pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2015.



Sumber: *Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar Tahun 2017.*

Dengan perolehan hasil persentase suara sebesar 92%, ini menjadikan rekor baru dalam hasil penyelenggaraan pilkada yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Sebelumnya pernah ada hasil persentase besar yang didapat oleh Joko Widodo ketika menjadi calon Walikota Solo dengan perolehan sebesar 91% suara. Namun, rekor itu patah oleh pasangan Samanhudi Anwar dan Santoso pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2015-2020.

## 4.2 Profil Pemilihan Legislatif Kota Blitar

### a. Pemilihan Legislatif Tahun 2004

Pemilihan wakil rakyat Kota Blitar pada tahun 2004 diikuti oleh 24 parpol.

Jumlah kursi DPRD terbanyak diraih oleh PDIP yakni 7 kursi dengan mendapat 21.116 suara. Total kursi DPRD pada Pileg tahun 2004 ialah 25 kursi.

**Tabel 4.5**

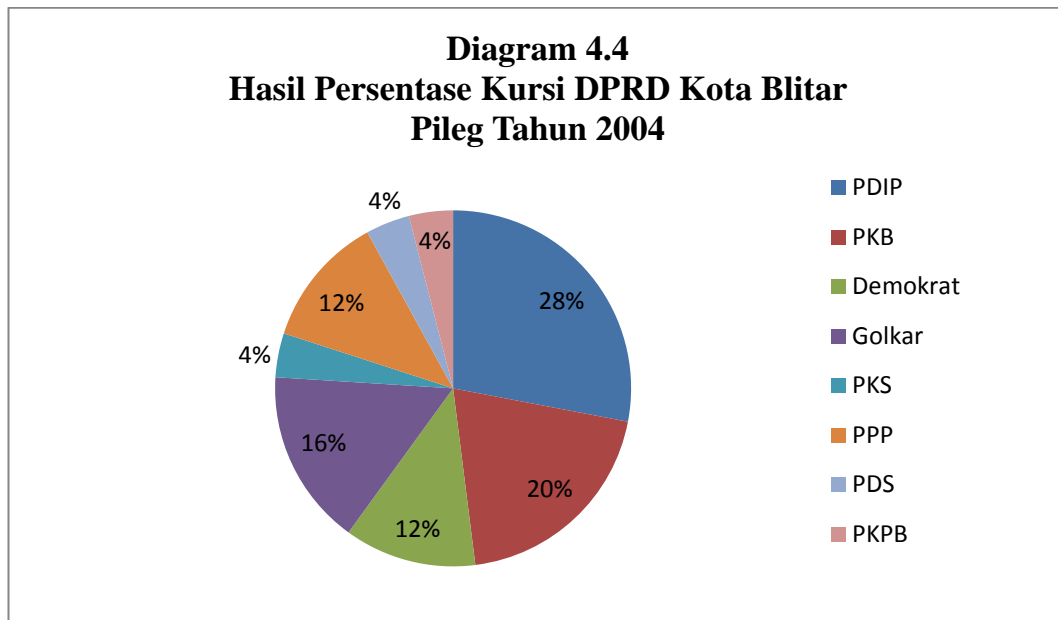
### Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2004

No	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah	Jumlah Kursi
		Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan		
1	PDIP	8.388	6.151	6.577	21.116	7
2	PKB	3.821	3.802	2.906	10.529	5
3	Golkar	3661	3.310	5.486	12.457	4
4	Demokrat	2.130	2.345	3.516	7.997	3
5	PPP	1.338	1338	919	4.118	3
6	PKS	-	-	1.177	1.177	1
7	Partai Damai Sejahtera	947	-	-	947	1
8	Partai Karya Peduli Bangsa	-	-	906	906	1
<b>Jumlah Suara / Kursi</b>		<b>20.285</b>	<b>17.424</b>	<b>20.518</b>	<b>59.247</b>	<b>25</b>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017



Berikut hasil persentase kursi yang didapatkan oleh parpol pada Pileg tahun 2004 di Kota Blitar.



Sumber: *Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017*

#### **b. Pemilihan Legislatif Tahun 2009**

Dari survei yang dilakukan lembaga-lembaga nasional tahun 2007-2009, menunjukkan tiga tempat teratas kemungkinan partai yang akan berebut kekuasaan yaitu PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Apa yang dijadikan tolak ukur oleh lembaga-lembaga nasional tersebut kiranya juga berpengaruh terhadap hasil Pileg di Kota Blitar Tahun 2009. Adapun, hanya Partai Golkar saja yang meleset dari perkiraan persaingan Pileg di Kota Blitar.

Pileg Tahun 2009 pemilihan DPRD Kota Blitar diikuti oleh 38 parpol. Dengan perolehan kursi terbanyak oleh PDIP dan Partai Demokrat dengan masing-masing 6 kursi. Total perolehan suara pada kedua parpol tersebut berbeda, PDIP dengan 17.876 suara dan Partai Demokrat 16.527 suara. Jumlah perolehan

kursi yang sama merupakan pengaruh politik nasional yang pada tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Republik Indonesia.

**Tabel 4.6**

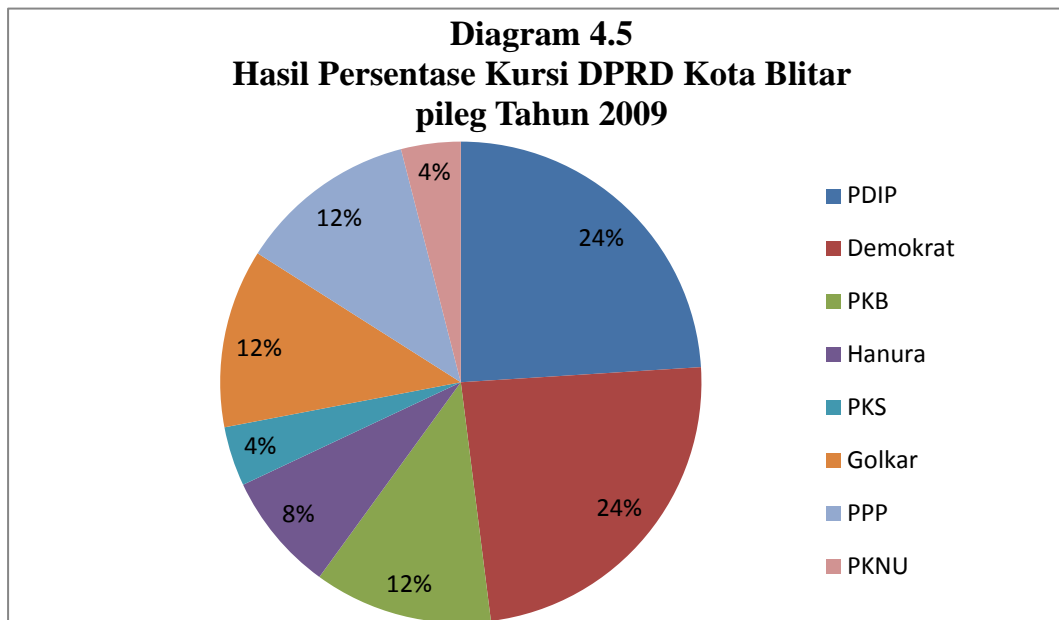
**Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2009**

No	Nama Partai	Jumlah	
		Suara	Kursi
1	Partai Hanura	3.920	2
2	Partai PKS	2.506	1
3	Partai PKB	6.889	3
4	Partai Golkar	4.252	3
5	Partai PPP	3.831	3
6	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.742	1
7	Partai Demokrat	16.527	6
8	Partai PDIP	17.876	6
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>57.543</b>	<b>25</b>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017

Pada Pileg Tahun 2009 ini, perolehan jumlah kursi PDIP menurun dibandingkan pada Pileg Tahun 2004. Pengaruh dari hal ini disebabkan dari kemenangan Partai Demokrat di tingkat Nasional dari kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia. Disisilain,

ada kabar pada saat itu terdapat penurunan kepercayaan publik mengenai kinerja dari Partai PDIP Kota Blitar sendiri.



Sumber: Hasil Olahan Penulis dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar Tahun 2017

### c. Pemilihan Legislatif Tahun 2014

Pada Pileg Tahun 2014 untuk Dapil Satu wilayah Kecamatan Sukorejo, dengan jumlah penduduk 44.631 jiwa memperoleh jatah 9 kursi di DPRD. Dapil Dua wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, dengan jumlah penduduk 38.397 jiwa mendapat jatah 7 kursi. Kemudian Dapil Tiga wilayah Kecamatan Sananwetan, dengan jumlah penduduk 49.873 jiwa mendapatkan jatah 9 kursi DPRD. Ini mengacu sesuai dengan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.<sup>60</sup>

<sup>60</sup><http://daerah.sindonews.com/read/724087/23/kpu-blitar-hitung-data-pemilih-pileg-2014>. Diakses pada 9 Desember 2016 pukul 21.00 WIB.

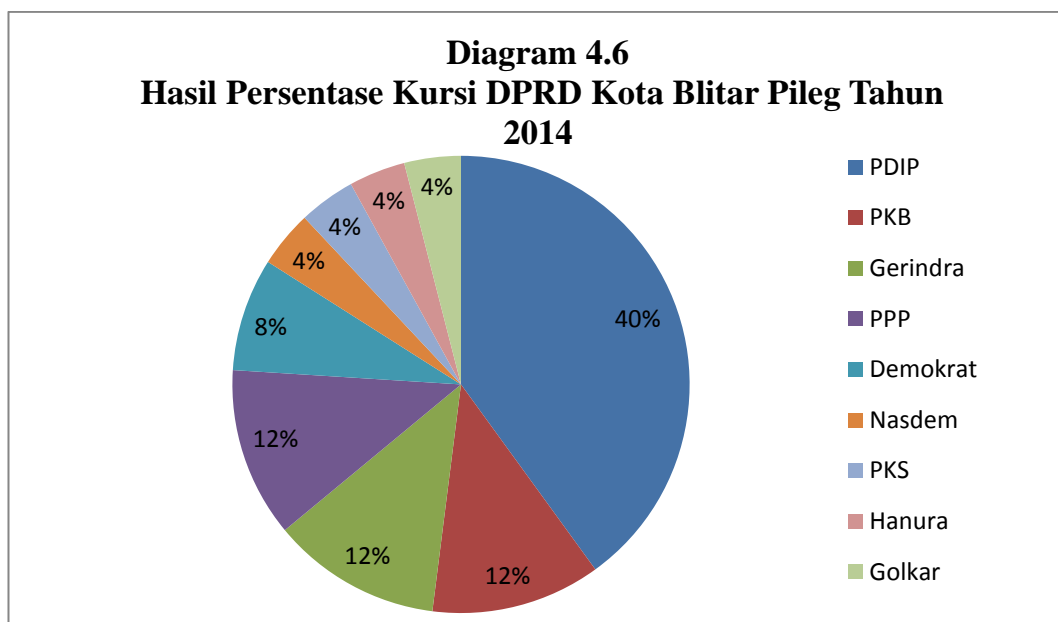
**Tabel 4.7**  
**Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan**  
**Umum Kota Blitar Tahun 2014**

No	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah	Jumlah Kursi
		Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan		
1	PDIP	10.253	11.346	13.312	34.911	10
2	PKB	2.259	2.072	3.108	7.439	3
3	Partai Golkar	1.049	419	1.498	2.996	1
4	Partai Demokrat	1.998	874	2.232	5.104	2
5	PPP	2.601	1.556	2.124	6.281	3
6	PKS	581	596	1.669	2.846	1
7	Partai Gerindra	6.884	3.315	1.656	11.855	3
8	Partai Nasdem	387	2.117	892	3.396	1
9	Partai Hanura	814	412	1.762	2.988	1
10	PAN	-	-	-	-	-
11	PBB	-	-	-	-	-
12	PKPI	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Suara / Kursi</b>		<b>27.984</b>	<b>23.939</b>	<b>29.896</b>	<b>81.819</b>	<b>25</b>

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017*

Pileg Tahun 2014 diikuti 15 parpol dengan perolehan kursi terbanyak dimiliki oleh PDIP. Pileg Tahun 2014 merupakan kemenangan PDIP terbesar dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan wakil rakyat di Kota Blitar. PDIP pada Pileg Tahun 2014 mendapatkan 10 kursi DPRD Kota Blitar. Pengaruh tingginya popularitas kepala daerah Samanhudi Anwar serta sebagai ketua Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) juga berdampak pada perolehan kursi yang diraih PDIP pada Pileg Tahun 2014 di Kota Blitar. PDIP dengan perolehan kursi DPRD Kota Blitar terbanyak pada Pileg tahun 2014 sangat terimplementasi dengan rendahnya jumlah kursi parpol lainnya. Selain PDIP parpol peserta Pileg tahun 2014 di Kota Blitar hanya mampu memperoleh 3 kursi dibawah peringkat jumlah kursi PDIP. Parpol dengan perolehan masingmasing 3 kursi DPRD Kota Blitar dimiliki PKB, PPP, dan Gerindra.



Sumber: *Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar Tahun 2017.*

Berdasarkan perolehan kursi pada Pileg tahun 2014 dengan kursi terbanyak dimiliki PDIP maka suasana parlemen dan eksekutif di Kota Blitar dapat dikontrol dengan mudah. Parpol penguasa mampu meluncurkan kebijakan yang dapat menunjang pembangunan di Kota Blitar. Hal ini menunjukan mayoritas masyarakat Kota Blitar setuju dengan visi-misi PDIP sebagai parpol penguasa dalam menjalankan kebijakan pembangunan.

Pileg tahun 2014 dan Pilkada tahun 2015 merupakan implementasi perjuangan dari PDIP dalam memimpin Kota Blitar. Perolehan jumlah kursi legislatif terbanyak dengan 10 kursi dan jumlah perolehan suara yang mutlak pada Pilkada 2015 mencapai 92% merupakan kemenangan PDIP khususnya DPC Kota Blitar. Dibawah pimpinan Samanhudi Anwar sebagai ketua DPC mampu meningkatkan popularitas PDIP di Kota Blitar.

#### **4.3 Profil Calon Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015**

##### **a. Mochsin dan Dwi Sumardianto**

Pasangan Mochsin dan Dwi Sumardianto merupakan pasangan yang maju melalui jalur independent dalam pemilihan kepala daerah Kota Blitar Tahun 2015. Pasangan yang disingkat *Sinar* ini, memiliki tujuh belas ribu fotocopy masyarakat pendukung untuk memuluskan jalannya pasangan ini dalam pertarungan Pilkada kota Blitar. Mochsin sendiri memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan dikenal dekat dengan petahana Samanhudi Anwar. Mochsin juga merupakan aktivis salah satu LSM yang adadi Kota Blitar.

Muchsin mengatakan motivasinya maju sebagai calon Walikota Blitar melawan Petahana Samanhudi Anwar hanya sebatas naluri dan mengikuti bisikan batin. Ada suara bawah sadar yang katanya meminta dirinya maju sebagai calon Walikota Blitar pada Pilkada serentak Tahun 2015 ini. Bisikan juga yang menuntunnya memilih Dwi Sumardianto, Yakni seorang pekerja studio foto di Kota Blitar sebagai pasangannya.

Meskipun ada jejak pendapat dari para politisi menyangkut majunya pasangan Mochsin dan Dwi Sumardianto identik dengan pasangan boneka, tetapi hal itu justru dibantah oleh Mochsin sendiri. Ia menampik tuduhan calon boneka. Alasannya, kalau hanya menjadi calon boneka, dia tidak akan repot-repot mengumpulkan dukungan 17 ribu fotocopi KTP masyarakat Kota Blitar. Muchsin benar benar ingin maju dalam pertarungan pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Oleh sebab itu ia menyiapkan visi dan misinya pada pilkada Kota Blitar.

Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi pasangan ini adalah “Mewujudkan Masyarakat Kota Blitar yang Sejahtera, Mandiri, dan Aman”, serta Memajukan Bumi Bungarno.

b. Misi

1. Memakmurkan masyarakat melalui ekonomi pro rakyat.
2. Sekolah gratis, harga pangan murah.
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan masyarakat.

**b. Samanhudi Anwar dan Santoso**

Samanhudi Anwar merupakan calon petahana yang maju pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015, ia didampingi oleh Santoso. Samanhudi Anwar juga merupakan ketua DPC Partai PDIP Kota Blitar. Samanhudi dikenal juga sebagai tokoh Nahdlatul Ulama Kota Blitar, bahkan orang tua nya pernah menjabat sebagai ketua Tanfidziah NU. Awal karier ke-politikannya dimulai sejak tahun 1999, yang pada saatitu Samanhudi menjabat sebagai anggota dewan dari partai PDIP di Kota Blitar. Di bawah kepemimpinannya, untuk tahun lalu Kota Blitar

meraih empat penghargaan yakni Adipura kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Smart Nation (Kota Pintar) dari lembaga City Asia, Profesionalisme Award dari Provinsi Jawa Timur dan Kota Sehat (Swasti Saba Wiwerda) dari Kementerian Kesehatan RI. Sebagai kepala daerah, dirinya juga pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kraya Bakti tahun 2015 dari Presiden Jokowi.

Sementara wakil Samanhudi sendiri, yakni Santoso merupakan mantan Sekretaris Daerah Kota Blitar. Santoso sendiri menjabat sebagai setda tatkala Samanhudi masih menjabat sebagai Walikota periode pertama. Samanhudi dan Santoso langsung diusung oleh partai utama yakni PDIP dengan sepuluh kursi, serta didukung Partai Nasdem, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PAN. Visi dan Misi dari pasangan petahana ini adalah sebagai berikut:

a. Visi

“APBD Pro Rakyat”

b. Misi

“Dengan Dilandasi Semangat Nasionalis dan Religius Mengarah Kepada Pembangunan Berwawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, Melalui Penerapan Sistem Pendidikan dan Perekonomian Serta Kehidupan Sosial yang Berbasis Kerakyatan Ditunjang Oleh Penerapan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif Berdasarkan Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Secara Konsisten”



#### 4.4 Gambaran Umum Partai Pengusung dan Partai Pendukung Petahana

Pada konteks ini, terdapat pemisahan teoritis antara partai pengusung dan pendukung. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang<sup>61</sup> Pasal 40 (1), bahwa partai pengusung adalah partai yang bisa mengusulkan pasangan calon dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Sedangkan makna partai pendukung tidak dijelaskan secara konseptual dan eksplisit, namun dapat dimaknai sebagai partai atau gabungan partai yang mendukung kontestan pemilihan umum.

Adapun pada deskripsi obyek penelitian kali ini, penulis akan membagi partai berdasarkan penggolongan partai pengusung dan partai pendukung petahana Samanhudi Anwar beserta ideologinya. Ideologi dalam sebuah partai politik merupakan hal wajib, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal. Menurut Prasetya (2011:35) ideologi partai adalah sebagai berikut:

“Ideologi partai akan memmerjelas bentuk dari sebuah partai politik dalam memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu dilakukan, dan lain sebagainya. Dengan dasar idiologi lah partai itu akan bergerak melalui program kebijakan partai yang

---

<sup>61</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.”<sup>62</sup>

Oleh sebab itu, melihat korelasi yang kuat terkait ideologi partai dan pembahasan sistem kartelisasi partai politik dalam konteks penelitian, berikut penulis sajikan gambaran umum objek penelitian partai tersebut terkait ideologi yang dianut oleh masing-masing partai:

#### **4.4.1 Partai Pengusung Petahana**

##### **a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : Partai Nasionalis-Marhaenis**

Berdasarkan apa yang telah tertuang pada AD/ART PDI Perjuangan No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015, Pasa 5 Ayat 1 PDI-Perjuangan menyatakan ideologi yang dianut yakni “Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945”.

Masih dalam anggaran dasar partai, PDIP juga menyantumkan jati diri partai berupa “Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial” yang memperkuat posisinya sebagai kelanjutan partai Nasionalis-Marhaenisme (Pasal 5 ayat 2 AD PDIP). Selain itu, materi kaderisasi anggota partai yang dicantumkan pada Pasal 83 ayat (2) ART PDIP, terdiri dari lima pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung. Salah satu di antaranya yakni Marhaenisme sebagai teori perjuangan tahun 1965. Sehingga, tak heran bahwa PDIP kerap kali dikatakan sebagai partai warisan Nasionalis-Marhaenisme. Sukarno (2014), Marhaenisme diterjemahkan sebagai cara dan asas perjuangan yang menghendaki hilangnya setiap kapitalisme

---

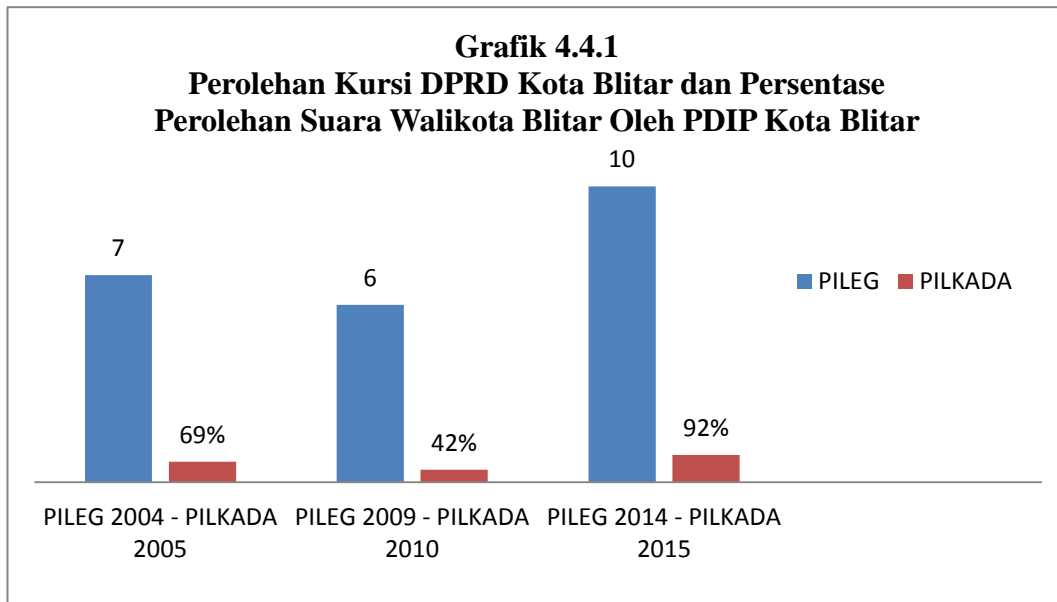
<sup>62</sup>Imam Yudhi Prasetya, “Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 2011. Vol. 1, No. 1, hlm 35.

dan imperialisme. Perjuangan Marhaenisme adalah perjuangan mewujudkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

#### **b. Hubungan PDIP dan Kota Blitar**

Berbicara mengenai Kota Blitar tak terlepas hubungannya dengan salah satu parpol di Indonesia yakni PDIP. Kota Blitar sendiri sudah menjadi basis dari partai berlogo banteng tersebut. Mengapa demikian, dalam sejarah penyelenggaraan pileg dari tahun 2004 yang diikuti 24 parpol, tahun 2009 dengan 38 parpol, dan tahun 2014 dengan 15 parpol, PDIP selalu mendominasi perolehan kursi di DPRD Kota Blitar. Meskipun berhadapan dengan partai agamis seperti PKB, PPP, PKS, PKNU, nyatanya tak ada yang mampu menggoyang kekuatan PDIP. Padahal, penduduk Jawa Timur dikenal dengan basis Nahdatul Ulama terbesar, namun hal demikian tidak berpengaruh pada penduduk Kota Blitar yang terkenal loyal dengan partai berazaskan nasionalis.

Berikut adalah ringkasan kemenangan PDIP di Kota Blitar:



Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Rekapitulasi data KPU Kota Blitar, 2017

Kemenangan PDIP pada pilkada serentak Tahun 2015 dengan kembali mengusung Samanhudi Anwar merupakan kemenangan terbesar dalam sejarah PDIP pada keikutsertaan penyelenggaraan pemilihan umum. Memperoleh suara sebesar 92% dengan hanya dua pasangan calon Walikota Blitar pada pilkada serentak 2015. Hal ini meningkat drastis dibandingkan periode 2010-2015 yang mana PDIP mengusung Samanhudi Anwar hanya memperoleh suara sebesar 42%. Ini disebabkan ketatnya persaingan dengan lima pasangan calon Walikota Blitar.

Untuk perolehan kursi DPRD Kota Blitar, PDIP juga sulit untuk dikalahkan. Hanya Partai Demokrat pada periode 2009 yang dapat menyamai perolehan kursi DPRD Kota Blitar berjumlah enam kursi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh kemenangan SBY pada Pilpres. Namun, lagi-lagi sejarah tercipta pada PDIP Kota Blitar. Yang mana pileg tahun 2014 PDIP berhasil

mengantongi 10 kursi legislatif. Menyebabkan PDIP saat ini menguasai jumlah kursi di DPRD Kota Blitar.

PDIP memang merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia. PDIP sendiri-pun mengklaim memiliki basis pemilih loyal di beberapa daerah di Indonesia. Maka tak heran, di beberapa wilayah di Indonesia PDIP mampu memenangkan kontestasi Pemilu maupun Pileg yang diselenggarakan di Indonesia. Kekuatan yang sinergis antara daerah ke pusat membuat PDIP kini menjadi lawan politik yang cukup diperhitungkan. Hal ini juga didukung dengan pilpres 2014, PDIP yang mencalonkan calon utama yakni Joko Widodo berhasil memenangkan pilpres 2014. Struktur kepengurusan PDIP terdiri dari tingkat pusat (DPP), tingkat Provinsi (DPD), dan tingkat Kabupaten/Kota (DPC). DPC PDIP Kota Blitar beralamatkan di JL. Dr. Wahidin No.11, Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Berikut ini merupakan struktur kepengurusan DPC PDIP Kota Blitar Tahun 2015 – 2020.

**Tabel 4.8**

**Struktur Kepengurusan DPC PDIP Kota Blitar Tahun 2015 - 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Muh. Samanhudi Anwar	Ketua
2	Drs. Zaenal Efendi	Wakil Ketua Bidang Kehormatan
3	Drs. Sugeng Prapto	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi
4	Henry Pradipta Anwar	Wakil Ketua Bidang Organisasi
5	Said Novandi, ST	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6	Sukardji	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik

7	Island Gatot Imbata	Wakil Ketua Bidang Ekonomi
8	Dedik Hendarwanto, ST	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9	Indri Kuswati	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak
10	Glebot Arijanto	Sekretaris
11	Drs. Siswandi Irianto	Wakil Sekretaris Bidang Internal
12	Lisi Sri Sumiarsih	Wakil Sekretaris Bidang Program
13	Sutanto, SH	Bendahara
14	Drs. Syahrul Alim	Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai

Sumber: *Hasil Olahan Peneliti, 2017*

#### **4.4.2 Partai Pendukung Petahana**

##### **a. Partai Demokrat : Partai Nasionalis Religius**

Berdasarkan AD/ART Partai yang bersumber dari Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Nomor 5/KLB/PD/III/2013 Bab I Pasal 3, ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis-religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memerhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

##### **b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Partai Dakwah Islamis**

Berdasarkan AD/ART Perubahan Hasil Majelis Syuro (MS) ke-VII Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, Partai Keadilan Sejahtera dijelaskan sebagai partai yang berasaskan Islam, dilanjutkan dengan Ayat 2 yang berbunyi, partai bercirikan bersih, peduli, dan profesional. Namun pada kenyataannya, PKS cenderung jarang menggunakan wacana penerapan syari'at

Islam dalam arus perjuangannya. Berdasarkan pengamatan penulis, jika bicara konteks kontestasi antar partai politik, arus perjuangan PKS banyak mengarah pada nasionalisme yang diharapkan dapat bersaing dengan partai Nasionalis lainnya. Sehingga, diharapkan dapat memperoleh tambahan suara yang banyak.

Selain itu, PKS juga menjadi partai terbuka dengan mengharapkan dapat tambahan suara dari golongan di luar Islamis, seperti Nasionalis dan non-Muslim, juga dari massa mengambang (*floatingmass*, atau juga dikenal dengan istilah *swing voters*). Hal ini disetujui oleh Ketua DPD PKS Kota Blitar, Leo Sudilaksono. Beliau justru mengistilahkan partainya sebagai penarik suara *swing voters* dari berbagai kalangan sebagai salah satu strategi penarikan suara pemilihan kepala daerah Kota Blitar Tahun 2015 (hasil wawancara penulis pada 18 November 2016).

### **c. Partai Nasdem: Partai Nasionalis “Restorasi”**

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasional Demokrat Pasal 2, maka disebutkan partai Nasional Demokrat adalah partai Nasionalis yang resminya berideologi “*Pancasila*” (Pasal 2 AD NasDem). Partai Nasdem merupakan salah satu partai di tanah air yang menggunakan “*Pancasila*” secara resmi sebagai ideologi. Penulis menganalisis bahwa ini dapat diperdebatkan. Penggunaan “*Pancasila*” sebagai ideologi merupakan dampak dari sisa-sisa masa Orde Baru yang kala itu yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Namun terlepas dari diskursus tersebut, Partai Nasdem nampak mencoba mengulangi langkah Soekarno dulu dengan mengusung konsep Restorasi Indonesia, yang pada era Soekarno dikenal sebagai

Revolusi Indonesia. Tokoh sentral partai ini, yakni Surya Paloh, juga memiliki kemampuan orasi dan retorika yang lebih baik dari semua tokoh sentral yang dimiliki partai lain.

**d. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra): Partai Nasionalis-Pancasilais**

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2012 Pasal 5, disebutkan secara resmi dan jelas bahwa Partai Gerindra adalah partai rakyat yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sama halnya dengan Partai Nasdem, Partai Gerindra juga menggunakan Pancasila, namun dengan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai azasnya. Namun yang menjadi pembeda adalah, karakter yang dibawa oleh tokoh sentral partai. Publik sudah mengetahui bahwa tokoh sentral Partai Gerindra adalah bekas militer dari kalangan Kopassus, yang notabene juga merupakan bagian dari *entitas* yang pernah berkuasa pada orde sebelumnya. Sehingga, partai terlihat sangat bergantung dengan tokoh sentralnya.

**e. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)**

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Golkar Tahun 2009, pada pasal 5 disebutkan partai Golkar berazaskan Pancasila. Partai Golkar bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaan.

Dalam pandangan Partai Golkar, Pancasila adalah deologi, falsafah, dan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila bukan ideologi yang dogmatik, tertutup/statis, melainkan ideologi yang hidup, terbuka dan



dinamis, yang mampu menyerap dan merespon berbagai dinamika, tantangan/tuntutan dan perubahan (serta dalam konteks menyikapi reformasi, Golkar dengan paradigma barunya tetap menempatkan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar negara serta jati diri bangsa yang tidak berubah). Dalam analisis sistem kepartaian, Partai Golkar secara ideologi politik dapat dikelompokkan sebagai “partai tengah” yang berciri moderat dan tidak ekstrim dan berorientasi program. Hal ini selaras dengan posisi dan titik berat Golkar sejak awal merupakan organisasi sosial politik yang di dalam perjuangannya memperhatikan keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual.

#### **f. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)**

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura Tahun 2015, disebutkan pada pasal 11 partai Hanura berazaskan Pancasila. Partai Hanura memiliki ciri yang bersifat religius, terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan *gender*.

Dalam keikutsertaan partai dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, Partai Hanura menjalani debut pertama-nya dengan tampil dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009 lalu, Partai Hanura mampu mendapat suara sebanyak 3.922.870 suara atau sekitar 3,8%. Partai Hanura terus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar partai yang antara meliputi *ketaqwa-an*, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kesederhanaan.

#### 4.4.3 Aanalisis Ideologi Partai Politik Pengusung dan Pendukung

##### Samanhudi Anwar

Partai Politik mungkin bisa berterima kasih pada era orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Bouchier dan Hadiz,<sup>63</sup> menyatakan bahwa Pancasila dijadikan Soekarno pada tahun 1945 sebagai sebuah formula untuk mempersatukan bangsa yang terpecah menjadi tiga entitas besar, yakni nasionalis, Islamis, dan sosialis komunis. Sedangkan oleh Soeharto, Pancasila diinvestasikan sebagai 'status yang hampir keramat' sebagai ideologi era Orde Baru.

"Diciptakan oleh Soekarno pada tahun 1945 sebagai formula untuk mempersatukan bangsa. Pancasila diinvestasikan dengan status sakral, ideologi dari Orde Baru. Soeharto sendiri menjadi semakin terobati dengan Pancasila, dan di awal tahun 1980-an ia mendorongnya sebagai 'azas tunggal' atau fondasi tunggal. Kebijakan 'azas tunggal' menjadi undang-undang pada tahun 1985, Soeharto melihatnya sebagai pencapaian besar pada pemerintahannya. Menyatukan semua kekuatan politik di bawah Pancasila, dia yakin, memungkinkan Indonesia untuk menempatkan di belakangnya ideologis dan religius agar jauh dari konflik yang telah merobek di masa lalu ".<sup>64</sup>

Selama Orde Baru, diberlakukan kebijakan asas tunggal Pancasila. Partai politik dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai ideologi mereka. Partai kemudian difusi ke dalam dua kelompok yaitu Islam (PPP) dan Nasionalis (PDI). Pasca Orde Baru kebijakan asas tunggal kemudian dihapus. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 mengenai partai politik disebutkan pada pasal 9 ayat 1 dan 2 bahwa asas dan ciri partai politik tidak

---

<sup>63</sup>Bouchier, David, Vedi R. Hadiz, 2003, *Indonesian Politics and Society: A Reader*, Routledge, London and New York, hal.13

<sup>64</sup>*Ibid.*

boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Implikasinya partai politik sebenarnya diperbolehkan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, partai-partai justru banyak yang mengidentifikasi ideologi mereka adalah Pancasila.

Azas tunggal yang digemakan era Soeharto kemudian menjadi sebuah warisan dari meleburnya tiga kelompok ideologi pada masa kemerdekaan, yakni Nasionalis, Islamis, dan Sosialisme ke dalam satu ideologi yakni Pancasila. Pancasila sebagai Hal ini akhirnya menjadikan banyak organisasi termasuk partai politik yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau azas yang dianut.

Penulis menganalisis bahwa, warisan ini pada akhirnya menjadi alat untuk memudahkan partai politik untuk ‘menasionalisasikan’ dirinya dengan nasionalisme dangkal, dengan tujuan untuk memudahkan posisinya agar mendapat suara yang banyak dari berbagai kalangan. Terbukti sejumlah partai menyatakan dirinya ‘terbuka’ bagi setiap pihak yang mau bergabung bersama partainya, apapun latar belakangnya selama memiliki visi misi *klise* yang sama yakni membangun Indonesia (berdasarkan hasil wawancara penulis kepada tujuh partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda).

Namun, Anthony Smith (2003) memiliki pandangan lain. Smith merumuskan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan memertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk aktual atau bangsa yang potensial.<sup>65</sup> Senada

---

<sup>65</sup>Smith, D. Anthony, 2003, *Nationalism and Modernism*, Routledge, New York, hal 11

dengan Smith, Ernest Gellner memakai nasionalisme sebagai ‘ideologi politik dan kebudayaan modernitas’ (Gellner, 1996).

Akhirnya, dalam konteks kartelisasi partai, ideologi Nasionalisme partai ini kerap kali dijadikan candu bagi partai untuk melakukan kartel. Penggabungan banyak partai dengan tidak mengedepankan ideologi dengan asumsi sentimen nasionalisme, dan disertai keuntungan politis dan finansial dari salah satu kandidat politik, kerap kali membuat partai enggan bersaing untuk merebutkan porsi kekuasaan. Pada konteks penelitian, partel kartel teridentifikasi melalui mekanisme pemilihan kepala daerah Kota Blitar Tahun 2015.

**BAB V**

**POLITIK KARTEL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**KOTA BLITAR TAHUN 2015**

Melihat pola struktur dan kekuatan partai politik, pada dasarnya sangat mungkin persaingan antar partai berjalan serentak pada kontestasi pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2015. Namun, terbatasnya kualitas calon diluar petahana yang akan maju di pemilihan kepala daerah, serta cenderung hanya beberapa partai saja yang sangat kuat dan berpengaruh pada daerah tersebut membuat persaingan antar partai dan calon hanya berporos tunggal. Dalam bab ini penulis menunjukkan salah satu persaingan kontestasi pilkada di salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak Tahun 2015, yakni Kota Blitar.

**5.1 Meleburnya Basis Ideologi dan Perilaku Koalisi Serba Bisa**

Sistem kepartaian yang berbentuk kartel ditandai oleh mundurnya persaingan antar partai dalam ranah kontestasi pemilu atau pilkada. Di Kota Blitar partai-partai memang pernah memperlihatkan persaingan berdasarkan ideologi dan program partai di arena pemilu. Namun, persaingan itu gagal bertahan, dan oposisi gagal hadir begitu mereka memasuki pilkada serentak Tahun 2015 lalu. Hal tersebut tidak lain karena majunya kembali calon petahana yang kuat sehingga akan sangat sulit untuk di goyahkan. Petahana Samanhudi Anwar merangkaul hampir seluruh partai politik di Kota Blitar untuk mendukungnya kembali maju menjadi Walikota Blitar. Hampir seluruh partai kabinet, tidak peduli ideologi dan program kerja partai seluruhnya dirangkul demi menguatkan posisinya kembali sebagai Walikota Blitar. Kartel bukanlah kelompok mafia yang

dibuat secara ilegal dan rahasia. Kartel adalah koalisi yang dibangun secara pragmatis oleh partai-partai yang ikut pemilu dengan dasar transaksional. Proses transaksi inilah yang dilakukan secara diam-diam dan hanya diketahui oleh anggota kartel. Rakyat hanya akan mengetahui bahwa telah terjadi proses transaksi ketika keputusan politik dibuat dan hanya partai anggota kartel yang diuntungkan, sedangkan rakyat harus menerima apa pun keputusan tersebut.<sup>66</sup>

Sebelumnya, temuan penulis sempat memperlihatkan adanya persaingan antar partai jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2015. Sejumlah partai politik kala itu sempat ingin mendeklarasikan calon mereka masing-masing yang akan maju dalam pilkada sebagai calon Walikota Blitar. Sebut saja Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, dan PKS. Akan tetapi, warna pola interaksi mereka sesaat menjelang diselenggarakannya pilkada serentak berangsur mulai hilang. Partai politik memperlihatkan kecenderungan tidak berani maju untuk melawan petahana Walikota Blitar Samanhudi Anwar, yang kala itu diusung oleh partai PDIP. Melalui perhitungan sistematis dari beberapa partai politik, pada akhirnya membuat mereka tidak berani untuk bertarung dalam pilkada melawan petahana. Jika partai politik mampu bersaing di arena politik pilkada serentak Tahun 2015 di Kota Blitar, barangkali tentu kita akan menyaksikan adanya tautan elektoral atau sebagaimana dimaksud adanya pola interaksi yang kompetitif sebagaimana harusnya ditunjukkan oleh partai politik.

---

<sup>66</sup> <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2010/06/14/page/2/>. Diakses pada 10 Januari 2018. Pukul 09.45 WIB.

### 5.1.1 Partai Politik dan Arus Ideologi

Orientasi ideologi menyangkut identitas kolektif, platform, dan rumusan program partai politik dalam mendefinisikan relasi negara dan agama, sedangkan pragmatisme terkait erat dengan kecenderungan sikap dan perilaku politik aktual dan konkret yang ditunjukkan oleh elit dan atau aktivis partai politik yang cenderung tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan orientasi ideologis partai politik dimana mereka bernaung. Pudarnya orientasi ideologis dan menguatnya kecenderungan pragmatisme dipicu oleh banyak faktor seperti lemahnya pelembagaan dan rendahnya disiplin partai, biaya politik yang tinggi, politik uang (*money politics*), rendahnya identitas kepartaian di kalangan konstituen, dan menguatnya tuntutan populisme di media dan pemilih.

Pada akhirnya, permasalahan mengenai ideologi partai muncul. Terutama menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal.<sup>67</sup> Hal ini bisa dibuktikan dari jumlah *swing voters* pada pemilu 2009 di Kota Blitar. Yang mana, PDIP pada pemilu Tahun 2004 sempat memenangkan perolehan kursi legislatif Kota Blitar dengan jumlah 7 kursi (28%) terbanyak dari partai lain. Namun, pada pemilu Tahun 2009 perolehan kursi legislatif PDIP menurun menjadi 6 kursi (24%) menjadikannya memperoleh hasil yang sama dengan Partai Demokrat. *Swing voters* adalah pemilih yang tidak memiliki kepastian terhadap pilihannya dan peluang untuk berpindah dari satu partai ke partai lain sangat besar. Berpindahnya pemilih

---

<sup>67</sup> <https://news.detik.com/opini-anda/1051826/gus-dur-golput-dan-swing-voter>. Diakses pada 11 November 2017. Pukul 20.00 WIB

loyalis PDIP juga disebabkan oleh situasi Pilpres yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat dengan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. Inilah bagaimana cara *swing voters* bekerja. Padahal semestinya ideologi bisa menjadi jembatan antara partai dengan pemilih.

Hal tersebut bisa disebabkan tidak jelasnya perbedaan antara satu ideologi partai dengan partai lain. Peningkatan jumlah partai tidak diimbangi dengan peningkatan fungsi ideologi sebagai identitas. Partai baru yang lahir misalnya lebih banyak berasal dari pecahan partai lama. Contohnya pada 2004 muncul Partai Benteng Nasional Kemerdekaan (PBNK) yang merupakan pecahan dari PDI Perjuangan, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pecahan dari Partai Golkar, dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan pecahan dari PPP.<sup>68</sup> Pada akhirnya ideologi tidak dapat berfungsi menjadi identitas partai politik karena tidak adanya perbedaan yang signifikan pada masing-masing partai politik.

#### **a. PDI Perjuangan**

Secara historis, ideologi PDI Perjuangan memiliki kedekatan hubungan dengan ideologi PNI. PDI Perjuangan merupakan partai yang terbentuk akibat adanya konflik struktural dalam tubuh PDI. Konflik tersebut menghasilkan dualisme kepemimpinan antara Soerjadi dan Megawati. Sehingga kelompok yang pro terhadap Megawati membentuk PDI Perjuangan. Dalam PDI ideologi yang dominan adalah ideologi PNI. Dominannya ideologi PNI dalam PDI juga disebabkan hasil pemilu 1971, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat suara

---

<sup>68</sup>Paige Johnson Tan, "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy," *Institute of Southeast Asian Studies: Contemporary Southeast Asia* 28, No. 1 (April 2006), hlm. 91.



paling banyak diantara empat partai lain yang tergabung dalam PDI. Hal ini bisa dilihat ketika awal deklarasi Fusi PDI disepakati bahwa watak dan ciri ideologis PDI adalah demokrasi Indonesia, berkeadilan sosial, dan kebangsaan Indonesia yang sebenarnya merupakan asas marhaenisme dari PNI yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.<sup>69</sup>

Sejarah PDI Perjuangan yang kerap dihubungkan dengan PNI membawa citra serupa bahwa partai ini mendukung *wong cilik*. Kelompok ini, antar lain, terdiri atas penduduk kota yang terpinggirkan, kaum buruh, petani, dan para pelaku ekonomi di sektor informal. Dan citra PDIP yang lain, yakni partai orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi, social, dan politik.

Penurunan jumlah perolehan kursi legislatif pada Pileg 2009 Kota Blitar, membuat DPC PDIP Kota Blitar saat itu memperbaiki kembali arah kerja partai. Penurunan perolehan jumlah kursi tersebut merupakan teguran rakyat agar partai kembali menjadi sarana dan wadah perjuangan rakyat. Karena itu, kader partai diminta untuk kembali ke jati diri sebagai partai para wong cilik, yang tidak berbangga diri karena kekuasaan, melainkan bangga karena selalu bersama-sama dengan rakyat, baik dalam suka maupun duka. Kebutuhan akan perubahan paradigma ini tidak hanya terkait dengan eksistensi partai, yaitu bahwa PDIP akan semakin ditinggalkan rakyat jika tidak mau mengabdikan dirinya kepada kepentingan rakyat. Lebih dari itu, penegasan jalan ideologis yang memihak pada rakyat kecil juga sangat fundamental bagi masa depan Partai dan Kota Blitar.

---

<sup>69</sup><https://www.pdiperjuangan.id/article/category/detail/289/Berita/Ideologi-PDI-Perjuangan>, diakses pada 11 November 23.00 WIB.

PDIP pun berbenah, pada pemilu legislatif tahun 2014 PDIP Kota Blitar berhasil memperoleh 10 kursi (42%) dewan legislatif. Tak ayal, apa yang menjadi bahan evaluasi di pileg tahun 2009 menjadi kan PDIP Kota Blitar kembali menang pada pileg 2014. Meskipun saat ini PDIP memiliki jumlah kursi yang besar di DPRD Kota Blitar, nyatanya hal ini tak lantas membuat PDIP nyaman untuk main sendiri pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Melalui intruksi ketua DPC PDIP Kota Blitar Samanhudi Anwar yang sekaligus sebagai petahana meyakinkan kepada pengurus kemenangan partai untuk mengajak partai politik Kota Blitar ikut mendukung petahana pada pilkada serentak Tahun 2015 di Kota Blitar. Hal ini ditujukan oleh Samanhudi Anwar agar penyelenggaraan pilkada Kota Blitar aman dan kondusif. Ia ingin mengajak seluruh partai politik di Kota Blitar tanpa memandang ideologi dan program partai untuk sama-sama duduk di pemerintahan guna mengurus dan mensejahterakan masyarakat Kota Blitar.

Perangkulungan hampir seluruh partai politik di Kota Blitar oleh Samanhudi Anwar bukan tanpa alasan. Ia menginginkan berlangsungnya pilkada yang tepat waktu atau sesuai prosedur pilkada serentak dan terciptanya stabilitas politik yang aman pada saat pilkada berlangsung. Sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan politik yang dapat timbul pra maupun pasca pilkada serentak diberlangsungkan.

Namun, merapatnya dukungan hampir seluruh partai politik di Kota Blitar kepada petahana Samanhudi Anwar tak ayal membuat sebagian partai politik yang tidak ikut mendukung petahana memilih untuk diam dan tidak mengukung calon lain untuk melawan Samanhudi di pilkada Kota Blitar. Sehingga pada saat

itu Samanhudi-lah calon kuat yang bakal kembali menjabat sebagai Walikota Blitar Tahun 2015-2019. Kendati demikian, agar pelaksanaan pilkada Kota Blitar terselenggara sesuai jadwal, maka muncullah pada saat itu calon Independent yang akan maju menantang petahana pada pilkada Kota Blitar.

Tak ada persyaratan apapun bagi para partai politik untuk bisa masuk dan mendukung Samanhudi Anwar pada pilkada Kota Blitar. Perbedaan ideologi dan arah kebijakan masing-masing partai musti dikesampingkan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pilkada dapat berlangsung secara aman dan kondusif, kata salah satu kader PDIP Pak Sugeng prpto.<sup>70</sup> Sebenarnya dari PDIP ingin sekali mengajak seluruh partai politik untuk duduk bersama-sama di pemerintahan dengan mendukung pasangan Samanhudi-Santoso untuk memenangkan pilkada serentak di Kota Blitar, pungkasnya.

Ini tidak berbeda jauh dari pernyataan Samanhudi Anwar selaku calon Walikota petahana pada saat itu. Samanhudi mengungkapkan:

“Koalisi partai-partai politik yang kita lakukan sifatnya jangka pendek, yaitu bagaimana caranya agar dapat meneruskan kepemimpinan. Arah program kerja dan landasan ideologi partai musti kita kesampingkan dulu. Tidak ada persyaratan apapun bagi partai politik untuk bergabung. Apapun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan.”<sup>71</sup>

Memang ada kenyataan bahwasanya partai politik tidak berani melawan petahana Samanhudi Anwar Pada Pilkada Kota Blitar. Faktor-faktor elektabilitas dan integritas dari sosok petahana yang telah menjabat satu periode sebelumnya dirasa sulit untuk dikalahkan. Apalagi selama satu periode memimpin, Samanhudi

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara bersama Sugeng Prpto Kader Fraksi PDI Perjuangan di PDAM Kota Blitar pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 80:00 WIB

<sup>71</sup>Hasil wawancara bersama Samanhudi Anwar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Kantor Walikota Kota Blitar pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 10:00 WIB

juga menuai berbagai prestasi sebagai Walikota Blitar. Dari kasus ini parpol cenderung meletakkan basis eksis-tensinya pada pengelompokan sosial dan politik aliran daripada klusterisasi ideologis.<sup>72</sup> Melihat proses politik yang berkembang selama ini, kita justru dihadapkan pada semangat pragmatisme yang dianut mayoritas parpol di Kota Blitar. Kondisi ini tentu saja hampir serupa dengan kondisi menjelang pemilu di Indonesia Tahun 1999. Kita bisa melihat partai politik ber-kompetisi dan diberikan kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya dan pemilih tidak lagi diintimidasi dalam menentukan partai pilihannya.

Sebagai partai penguasa di Kota Blitar PDIP sangat leluasa mengendalikan partai-partai lain yang ada di Kota Blitar. Melalui ketua DPC nya yang sekaligus Walikota Blitar Samanhudi Anwar, ia telah meletakkan *partner* politik-nya dimasing-masing partai. Seperti pada partai Golkar, Samanhudi memiliki pak Dodok, sedangkan di Partai Demokrat ada pak Ito Tubagus Aditya. Para loyalis Samahudi ini berhasil mengacaukan internal partai. Sehingga partai yang tadinya berpegang teguh pada prinsip untuk tidak mendukung pasangan Samanhudi-Santoso, akhirnya berlabuh-lah dukungan para partai ini. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya loyalis ini, Samanhudi mengungkapkan,

“Saya memiliki beberapa sahabat maupun rekan kerja saya yang aktif di kelembagaan partai. Mereka selalu mendukung dan mensuport arah kebijakan dan kinerja saya ketika saya masih menjadi anggota DPRD, tepatnya mulai tahun 2004 hingga terpilih kembali menjadi Walikota Blitar. Nah, teman-teman saya dari partai lain ini lah saya minta untuk menggerakkan partai politik mereka untuk dapat bisa bekerja sama

---

<sup>72</sup>Daniel Dhakidae, 1999. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Dalam tim Litbang Kompas, *Edisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Litbang Kompas, hal 5.

bersama saya di pemerintahan. Dengan begitu kita dapat membangun Kota Blitar bersama-sama. Dengan adanya mereka tentu saya tidak begitu sulit untuk mengkoordinasikan partai politik yang lain.”<sup>73</sup>

Pembentukan nilai ideologi partai PDIP lemah dalam praktik politik keseharian. Partai PDIP sebagai partai penguasa cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Kota Blitar saat penyelenggaraan Pilkada serentak adalah berlomba-lombanya partai politik untuk meng-*inklusifkan* diri dan mewadahi semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai.<sup>74</sup> Ini merupakan sebuah fenomena menarik, ketika partai berbasis religius (Islam) dan merupakan partai doktriner, semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai berideologi sekuler atau pun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis.

#### **b. Partai Golongan Karya (Golkar)**

Golkar jelas layak menjadi perhatian. Golkar adalah partai politik yang sempat mendominasi panggung politik selama masa Orde Baru dan terus bertahan dalam dua pemilu sejak Tahun 1998.<sup>75</sup> Di Kota Blitar, Partai Golkar tidak terlalu memiliki basis massa yang kuat seperti yang ditunjukkan Partai Golkar dalam jumlah suara Nasional. Meski hanya memiliki 1 (satu) perwakilan legislatif di

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara bersama Samanhudi Anwar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Kantor Walikota Kota Blitar pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 10:00 WIB

<sup>74</sup>Parakitri TSimbolon, 2006. *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, hlm 48

<sup>75</sup> Kuskridho Ambardi, *Op Cit*, hlm. 129

DPRD Kota Blitar dan dengan tidak begitu mencolok-nya basis dukungan partai ini, nyatanya Golkar tetaplah partai yang musti tetap harus diperhitungkan gerakan politiknya.

Pada pelaksanaan pilkada serentak di Kota Blitar Tahun 2015, Partai Golkar tidak mengusung calon baik dari kader maupun dari non-kader sebagai calon Walikota Blitar. Saat itu Partai Golkar lebih memilih untuk ikut mendeklarasikan diri secara kelembagaan untuk ikut dengan PDIP mendukung petahana Samanhudi Anwar sebagai calon Walikota Blitar. Padahal, bila kita melihat sejarah dari perpolitikan negara ini, Partai Golkar dan PDIP merupakan dua partai dengan basis massa yang besar dan sangat jarang mau melakukan koalisi untuk mendukung calon dalam penyelenggaraan pemilu. Lantas, kepentingan kolektif macam apa yang hendak diwakili oleh Golkar pada pilkada Kota Blitar? Sehingga partai Golkar mau untuk sama-sama dengan PDIP mendukung petahana Samanhudi Anwar pada pilkada serentak Kota Blitar Tahun 2015. Untuk menelusuri permasalahan tersebut, penulis melakukan observasi lapangan.

Sebagai partai pendukung, Golkar mendapat apresiasi khusus dari petahana Samanhudi Anwar yang nota bene juga sebagai ketua DPC PDIP Kota Blitar pada masa kampanye pilkada serentak Kota Blitar. Bapak Drs. Muh. Hardihusodo atau yang biasa disapa Pak Dodok selaku ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar secara resmi ditunjuk langsung oleh Samanhudi Anwar untuk membuka acara sambutan kemenangan pasangan Samanhudi Anwar – Santoso pasca pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Ditunjuknya Pak Dodok oleh Samanhudi

bukan tanpa alasan, mengingat Pak Dodok sendiri merupakan rekan maupun sahabat semasa kecil Pak Samanhudi hingga berkarir di dunia politik khususnya di Kota Blitar.<sup>76</sup>

Selain itu, Golkar dibawah kepemimpinan Pak Dodok ini juga sangat pro terhadap Samanhudi, namun tidak untuk PDIP-nya itu sendiri. Karena dimata Pak Dodok Samanhudi dan PDIP merupakan dualisme hal yang berbeda. Dibawah kepemimpinan Pak Dodok ini juga SK (surat keputusan) dari dualisme kepemimpinan Partai Golkar pusat kala itu, antara Agung Laksono (versi munas ancol) dan Aburizal Bakrie (versi munas bali) untuk menyatakan dukungan kepada petahana Samanhudi Anwar pada pilkada serentak Kota Blitar didapatkan. Konflik dualisme kepengurusan ini lah yang membuat dilema internal partai Golkar. Sehingga Golkar juga memutuskan untuk mendukung PDIP bergabung di pemerintahan. Terkait mengapa Golkar susah-susah untuk ikut masuk mendukung pemerintahan Samanhudi, sedangkan bila dilihat dari sejarah bahwa PDIP dan Golkar merupakan partai besar yang sangat sulit untuk disatukan.

Faktor utama yang penulis berhasil pantau disini adalah adanya sosok Pak Dodok. Inilah mengapa Samanhudi ingin menarik Golkar untuk ikut bergabung. Semenjak Pak Dodok dinobatkan menjadi ketua DPD Golkar Kota Blitar periode 2015-2019, Samanhudi langsung bergerak cepat untuk mendekatkan diri ke Golkar. Hal ini tak terlepas karena Pak Dodok ini merupakan salah satu orang-orang yang pro terhadap Samanhudi. Itu juga tidak terlepas dari pergantian kepengurusan sebelumnya, yang mana pengurus sebelumnya sangat tidak pro

---

<sup>76</sup> Penjelasan hasil dari wawancara bersama Hardihusodo/Dodok Ketua Fraksi Golkar di DPD Kota Blitar pada tanggal 25 November 2016 pukul 13:00 WIB

terhadap Samanhudi. Bahkan sebelum Golkar dipimpin oleh Pak Dodok, Samanhudi sangat tidak menyukai hal-hal yang berbau kuning (partai Golkar). Tentunya dengan adanya kedekatan antar ketua pengurus partai ini ada keuntungan yang diperoleh Partai Golkar. Pak Dodok mengungkapkan:

“Jika kita bisa dekat dengan para penguasa, maka kita juga sangat dekat dengan kekuasaan tersebut. Banyak hal yang bisa kita peroleh dan dapatkan dengan kedekatan ini. Dan ini sangat membantu sekali bagi kita.”<sup>77</sup>

Sebenarnya jika tidak adanya pergantian kepengurusan DPD Partai Golkar, mungkin akan berbeda hasilnya. Potensi koalisi kemenangan PDIP dan Golkar bisa menjadi mustahil karena pendukung kedua partai tersebut sangat rentan gesekan konflik. Pembentukan koalisi dengan PDIP memaksa Golkar mengorbankan reputasinya sebagai partai besar yang sempat menguasai Orde Baru. Sebab Golkar tetap merupakan representasi Orde Baru. Ketua DPD Golkar Kota Blitar sebelumnya Pak Widjianto dikenal sangat tidak menyukai Samanhudi Anwar. Bahkan pra persiapan pilkada Kota Blitar, partai ini digerakkan oleh Pak Dodok. Jika bukan karna Pak Dodok, mungkin partai Golkar tidak akan mendeklarasikan dukungannya untuk Samanhudi.

Alasan kenapa juga Golkar ikut mendukung Samanhudi pada pilkada Kota Blitar adalah karena saat itu betapa sulitnya harus melawan petahana Samanhudi. Partai Golkar hanya memiliki satu kursi di DPRD tidak mungkin bisa mencalonkan calon pada pilkada. Selain itu kondisi Samanhudi yang sudah mengakar rumput pada hati masyarakat Kota Blitar tidak mungkin untuk bisa

---

<sup>77</sup>*Ibid.*,



dilawan. Golkar memiliki hitung-hitungan sistematis untuk menyikapi hal tersebut. Akibatnya secara kelembagaan kolegal Partai Golkar mau tidak mau ikut mendukung Samanhudi. Belum adanya kader potensial, persiapan menuju pilkada yang tidak matang, hingga konflik dualisme kepemimpinan pusat membuat saat itu Partai Golkar ikut menyatakan dukungannya kepada calon pasangan Samanhudi-Santoso. Padahal jika kembali ke masa-masa sejarah penyelenggaraan pemilu maupun pilkada Partai Golkar dan PDIP sulit sekali untuk menyelaraskan dukungannya menjadi satu kepada satu pasangan calon. Namun, apa yang kali ini terjadi di Kota Blitar salah satu yang berbeda.

Tentu kita mudah mengingat sikap Golkar pada setiap penyelenggaraan pemilu, yakni enggan untuk membentuk koalisi dengan PDIP. Adanya konflik, serta gesekan yang kerap terjadi antar pendukung dan anggota kabinet dari masing-masing partai ini-lah yang menjadi alasannya. Namun, Golkar kini mau bergandeng tangan dengan PDIP untuk membentuk tim pemenangan Samanhudi Anwar sebagai calon Walikota Blitar. Bukti ini memperlihatkan partai bersikap *permisif* dalam membangun koalisi.

Menyangkut pandangan ideologi dan arus perjuangan partai melalui ketua DPD Partai Golkar Hardi Husodo atau biasa disapa Dodok mengatakan, bahwa ide dasar kelahiran Golongan Karya adalah respon menguatnya politik aliran yang berkembang pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, kata pak Dodok, struktur sosial masyarakat seolah terbagi berdasarkan berbagai aliran dan ideologi. Lanskap politik juga lebih diwarnai pertarungan ideologi dari pada konsep pembangunan untuk rakyat. “Jadi, Golkar saat itu memilih sebagai golongan

fungsional dan menjadi pijakan untuk “berkarya nyata” terhadap daerah,” tutur pak Dodok yang ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Kota Blitar Kamis (25/11/2016).<sup>78</sup> Dalam pilihan tersebut, pak Dodok juga mencoba menawarkan gerakan yang menitik-beratkan pada sumbangsih nyata dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar dalam menjalankan tugas-tugas sosial.

Secara historis, Golkar tidak pernah dekat dengan kaum buruh semasa jayanya. Partai ini hanya menghubungkan diri dengan kelas buruh melalui serikat buruh yang direstui oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Golkar tidak pernah menjadi pilihan sejati kaum buruh dalam menyalurkan kepentingannya. Dan mustahil bagi Golkar untuk melakukan lompatan ideologis menjadi partai kiri pembela kaum buruh. Namun faktor-lah yang menjadi pertimbangan Golkar lebih bersifat pragmatis. Dalam pandangan Golkar, publik umumnya kurang bersimpati terhadap gerakan kaum buruh karena dalam banyak kasus gerakan dan demonstrasi mereka menjadi tidak terkendali dan berubah menjadi kekerasan.<sup>79</sup>

### **c. Partai Nasdem**

Partai Nasdem pun terjebak pragmatisme untuk sekedar mendulang suara pemilih ke pasangan calon petahan Samanhudi Anwar, sehingga membuat ideologi menjadi hanya sebatas jargon. Bergabung-nya Partai Nasdem ke dalam koalisi pragmatis ini juga dikarenakan Partai Nasdem Kota Blitar ingin mendekatkan diri dengan Pemerintah. Pasalnya, sebelum Samanhudi terpilih kembali untuk dua periode sebagai Walikota Blitar, Partai Nasdem sangat sulit untuk memasuki akses di Pemerintahan maupun daerah. Sulitnya untuk memiliki

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Kuskrido Ambardi, *Op Cit*, hlm 168.

kantor DPD secara legal juga mereka rasakan kala itu. Namun kini, dengan mendekatkan diri kepada Pemerintah Partai Nasdem-pun menuai keuntungan. Mereka kini memiliki kantor DPD yang disewakan langsung oleh Samanhudi Anwar kepada Partai Nasdem.

Sebagai partai baru yang masuk di Kota Blitar, Partai Golkar juga cukup baik dalam pergerakan politiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan kursi DPRD-nya. Pada Pemilu Tahun 2014, Partai Golkar berhasil meraih 1 kursi (4%) Legislatif Kota Blitar. Sebagai partai pendatang baru, perolehan hasil ini juga lebih dari cukup. Meskipun pendapat lain berbeda diungkapkan oleh Pak Muchson selaku Ketua DPD Partai Nasdem. Dia mengungkapkan:

“sebagai Paratai baru, kami sangat berkomitmen untuk membesarkan DPD Partai Nasdem Kota Blitar. Melalui intruksi DPP Partai Nasdem, sebenarnya kami berambisi pada Pemilu Tahun 2014 kemarin memperoleh 3 kursi di DPRD. Namun hasil berkatalain, kami harus puas dengan hanya memperoleh satu kursi di DPRD. Akan tetapi, akan berupaya untuk menambah kursi di DPRD pada Pemilu Tahun 2019 mendatang.”<sup>80</sup>

Masuknya Partai Nasdem kedalam poros koalisi besar ini didasarkan bukan atas kesepemahamannya Partai Nasdem dengan PDIP Kota Blitar. Melainkan akan sosok petahana Samanhudi yang kala itu mustahil untuk ditandingi. Pola pikir masyarakat untuk Samanhudi sudah melekat akan kinerjanya selama satu periode kepemimpinannya sebagai Walikota Blitar. Apa lagi jumlah kualitas dari kader Partai Nasdem masih dalam peningkatan. Muchson mengatakan:

“Kami mendukung bukan karena partainya, jadi yang kami lihat pasti orangnya. Sosok Samanhudi Anwar menjadi alasannya kami untuk

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara bersama Muchson Ketua Fraksi Nasdem Kota Blitar di DPD Nasdem, pada tanggal 25Oktober 2016 pukul 90:40 WIB

mendeklarasikan dukungan untuk kemenangan pilkada kemarin. Jadi kami melihat individunya, meskipun dia sendiri menjabat sebagai ketua DPC PDIP dan PDIP menjadi partai penguasa tetapi kami hanya mengukur dari kekuatan sosok Samanhudi. Saat ini bodah rasanya jika berani melawan Samanhudi bila tidak ada persiapan matang dan dukungan dari partai lain. Untuk itu merapatkan barisan kepada mereka satu-satunya jalan aman untuk menetapkan arah kebijakan partai saat pilkada berlangsung.”<sup>81</sup>

Terkait cibiran ketidak samaan dasar ideologi partai dan program kerja serta kebijakan partai, Partai Nasdem tidak begitu mempersoalkan. Kami hanya mengukur pada situasi rasionalitas, ungkap Pak Muchson saat penulis temui di DPD Partai Nasdem. Tidak rasional bila kita sebagai partai politik tidak mau main aman bila bertarung melawan lawan kuat pada penyelenggaraan pilkada. Estimasi pengeluaran biaya musti kita perhitungkan bila mau melawan calon kuat. Namun, akibat tiadanya pertimbangan ideologi yang jelas, maka yang menjadi ukuran ketika menggalang suatu koalisi atau memilih menjadi oposisi hanyalah kepentingan sesaat, berupa jabatan menteri maupun imbalan materi. Ini yang menyebabkan partai-partai koalisi pendukung pemerintah kadang malah tampak lebih garang ketimbang partai yang beroposisi.

Tindakan yang dilakukan Partai Nasdem tentu tidak sesuai dengan konsep Restorasinya. Nasdem menawarkan restorasi karena pertarungan politik sejatinya adalah ide, dan bukan figur. Tapi, apa yang dilakukan Partai Nasdem dengan tidak menerapkan ide-ide bagaimana cara untuk melawan calon petahana, justru terjebak kedalam sosok figur calon petahana. Nasdem bingung, cacat konsep restorasi yang telah dibangun.

---

<sup>81</sup>*Ibid.*,

#### **d. Partai Demokrat**

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon Wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Partai Demokrat menganut paham nasionalis-religius. Sebagai wujud dari semangat nasionalisme, keanggotaan partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki komitmen untuk membangun masa depan bangsa berhak memperoleh perhatian dari partai dan berhak untuk bergabung di dalam wadah perjuangan partai Demokrat.<sup>82</sup>

Melalui instruksi ketua DPD Partai Demokrat, Sutrisno, Partai Demokrat menyatakan dukungannya secara kelembagaan kepada pasangan Samanhudi-Santoso pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Hal ini disampaikan langsung oleh Pribadi Utomo selaku Sekretaris II yang penulis temui di kantor DPD Partai Demokrat. Demokrat bergabung dikarenakan pada saat itu perencanaan pencalonan dari kader batal yang disebabkan rencana membangun koalisi dengan Partai Gerindra, PPP, dan PKS tidak tercapai.

Partai Demokrat, Gerindra, PPP, dan PKS awalnya ingin membentuk koalisi guna mengusung calon Walikota dan calon Wakil Walikota Blitar pada pilkada Tahun 2015. Jika koalisi ini bisa terbentuk, akan memiliki 9 kursi

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara bersama Pribadi Utomo Kader Fraksi Demokrat di kediamannya Kota Blitar pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 10:00 WIB

yakni, Partai Gerindra 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PKS 1 kursi dan PPP 3 kursi. Sementara syarat yang ditentukan untuk bisa mengusung calon Walikota dan wakil Walikota adalah minimal 6 kursi. Jika partai politik ini ikut bergabung, koalisi ini menjadi 9 kursi dari 25 kursi di DPRD Kota Blitar. Namun sayangnya koalisi ini gagal yang menyebabkan partai politik yang lain terpecah, yang mayoritas lebih memilih ikut mendukung pasangan petahana Samanhudi dalam pilkada Kota Blitar Tahun 2015.

Sebenarnya, bila koalisi ini dapat terbentuk maka akan timbul ranah persaingan dalam kontestasi pilkada di Kota Blitar. Persaingan mungkin akan menjadi ketat. Pengawasan antar partai-pun akan terjadi guna mempertahankan asas demokrasi itu sendiri. Namun sayang, persaingan ini mati tatkala hasil survey di beberapa lembaga survey di Kota Blitar mengeluarkan pernyataannya. Hasil mengatakan bahwa petahana Samanhudi memiliki angka popularitas yang sangat tinggi di mata masyarakat Kota Blitar. Masyarakat pada saat itu hanya mengetahui sosok Samanhudi-lah pemimpin yang mengerti akan masyarakatnya sendiri.

Tingginya hasil survey lapangan dari petahana Samanhudi Anwar menjelang pemilu menjadi godaan bagi Partai Demokrat. Koalisi tanpa ideologi menjadi jebakan untuk membangun pemerintahan Kota Blitar kedepan. Hal ini diperlihatkan tatkala koalisi ini selesai dibangun ketika pilkada usai. Partai Demokrat yang sebelumnya hanya membangun koalisi jangka pendek pada kemenangan petahana, justru harus berlanjut pada tautan elektoral pemerintahan. Padahal, hal ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki dari Partai Demokrat. Permasalahannya ada pada konflik pengurus internal partai antara Ketua DPC

Demokrat Sutrisno dengan Wakil Ketua I Ito Tubagus Aditya. Sebagai orang yang pro terhadap Samanhudi, Ito Tubagus Aditya kala itu ingin mengontrol Demokrat agar supaya tetap meneruskan dukungannya untuk Pemerintahan Samanhudi pada periode kedua. Namun, apa yang dilakukan oleh Ito tidak sejalan pemikirannya dengan Sutrisno. Sutrisno menginginkan kerjasama koalisi ini hanya dibangun jangka pendek untuk mengamankan situasi Demokrat terkait arah dukungannya menjelang pelaksanaan pilkada. Tak ayal, apa yang dilakukan Ito Tubagus membuat internal Partai Demokrat mencari celah agar bisa mendepak Ito Tubagus dari kepengurusan internal Partai.

Koalisi yang dibangun Partai Demokrat dengan PDIP penuh dengan pragmatisme kekuasaan. Partai Demokrat dengan paham nasionalisnya cenderung tidak memiliki fanatisme ideologi. Semenjak Pemilu Indonesia Tahun 2004, langkah Partai Demokrat membangun koalisi tidak memberi perhatian pada permasalahan ini.

#### **e. Partai Gerindra**

Berbicara mengenai Partai Gerindra mustinya orang sudah tahu akan sosok sentral yang ada di tubuh partai ini. Pembawaan Prabowo *centric* oleh Gerindra menjadikannya sebagai partai yang dalam situasi apapun sangat tergantung dari kebijakan Prabowo. Gerindra sendiri, untuk di Kota Blitar cukup banyak memiliki basis massa. Ini terlihat dengan jumlah perolehan kursi legislatif-nya dengan 3 kursi (12%) pada pemilu Tahun 2014.

Partai Gerindra sebagai salah partai dengan perolehan 3 kursi Legislatif dan partai yang memperoleh (12%) dalam Pemilu Legislatif 2014 ini memang

menyatakan tidak memilih di antara dua pasang calon, tetapi memberikan kesempatan yang luas kepada anggota-anggotanya untuk menentukan pilihan atas poros koalisi. Langkah ini, menunjukkan keanehan Partai Gerindra dalam berpartai, malah terkesan bahwa Partai Gerindra tidak lagi sebuah partai yang tegas. Berbicara skema dari sistem pemilu maka sebagai institusi Partai Gerindra bukanlah bersikap netral. Tetapi Partai Gerindra sebagai Partai yang memperoleh 3 kursi di Pemilu 2014 dapat dikatakan tidak memiliki posisi tawar untuk bergabung diantara koalisi itu, ini ditunjukkan oleh pemberitahuan dari KPU Kota Blitar. Menurut Mashudi, anggota komisioner KPU Kota Blitar:

“Langkah dari anggota-anggota kader Partai Gerindra yang mendukung salah satu pasangan calon tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah langkah resmi dari Partai Gerindra. Sebab berbicara Partai Politik maka berbicara organisasi secara kelembagaan dari partai, pengambilan keputusannya juga bertingkat dari pusat hingga ke daerah-daerah. Sehingga demikian, jika melihat langkah dari Partai Gerindra tanpa diikuti pencabutan sikap dari Partai Gerindra yang memilih netral maka ini hanya menunjukkan langkah orang-perorang yang bersikap pragmatis”.<sup>83</sup>

Pada perencanaan-nya, Gerindra ingin mencoba berkoalisi dengan partai lain, namun dengan pertimbangan internal partai akhirnya Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan PDIP mendukung pasangan Samanhudi Anwar dan Santoso. Pada saat itu Pak Tan Ngi Hing selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra mengungkapkan:

“saat ini sulit untuk memunculkan kader untuk melawan pak Samanhudi pada Pilkada Kota Blitar. Kinerja dari kepemimpinan pak Samanhudi sudah dirasakan betul oleh masyarakat. Dan pastinya masyarakat ingin beliau kembali memimpin Kota Blitar. Berangkat dari tolak ukur kekuatan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara bersama Mashudi, Anggota Komisioner KPU Kota Blitar pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 09:15 WIB



pak Samanhudi-lah, kita dari partai gerindra lebih memilih mendukung pak Samanhudi.”<sup>84</sup>

Partai Gerindra tidak sungguh-sungguh mempunyai niatan untuk menjalin koalisi dengan Partai Demokrat, PPP, dan PKS. Hal ini diperlihatkan terlalu normatifnya pertemuan yang mereka lakukan. Sehingga tidak menemukan hasil yang menggembirakan dari pertemuan partai politik tersebut. Tadinya diharapkan perencanaan koalisi ini bisa terealisasi, namun kenyataan bahwa krisis kepercayaan diri partai terkorbankan, dengan terkorbankannya ideologi dan arah program kerja hanya untuk main aman dalam kontestasi Pilkada.

#### **f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Potret ideologi dilematis, itu lah yang menggambarkan situasi PKS tatkala situasi pra dan pilkada berlangsung. PKS cenderung jarang menggunakan wacana penerapan syari’at Islam dalam arus perjuangannya. Berdasarkan pengamatan penulis, jika bicara konteks kontestasi antar partai politik, arus perjuangan PKS banyak mengarah pada nasionalisme yang diharapkan dapat bersaing dengan partai Nasionalis lainnya. Sehingga, diharapkan dapat memperoleh tambahan suara yang banyak.

Ide dalam koalisi yang dibangun pihak elite Partai PKS dan PDIP penuh dengan pragmatisme kekuasaan. Ideologi berseberangan antara keduanya dihapus sementara untuk meningkatkan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Blitar. Ideologi kedua belah pihak, PKS dan PDIP, sangat bertolak belakang. PDIP cenderung ke sosio-nasionalis-demokrasi dan PKS

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara bersama Tan Ngi Hing Kader Fraksi Gerindra di kediamannya Kota Blitar pada tanggal 18Desember 2016 pukul 12:00 WIB

cenderung Islam. Dua ideologi yang berbeda seharusnya memastikan kedua partai untuk berada dalam jalur politik yang berbeda. Namun kepentingan perolehan suara memastikan mereka untuk bekerja sama. "Dari ideologi inilah nampak jelas bahwa kedua partai sudah bersikap pragmatis.

Di sisi lain PKS tergoda untuk merapat ke pemerintahan ke depan. Menurut Said Novandi,<sup>85</sup> perolehan suara PD mampu menarik elite PKS untuk menanggalkan ideologi mereka. "Masalah ideologi bagi elite PKS takkan pernah jadi masalah. Bagi mereka (elite PKS) yang terpenting adalah bagaimana menggapai kekuasaan," jelasnya.

Alasan internal PKS ikut serta dalam mendukung pasangan petahana Samanhudi Anwar belum adanya kader yang memiliki integritas dan kualitas, serta hanya memiliki 1 kursi Legislatif di Kota Blitar dijadikan alasan untuk tidak mengusung calon lain pada pilkada Kota Blitar. Namun, PKS tetap ikut mendukung calon petahana secara kelembagaan. Seperti yang di sampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Blitar Leo Sudilaksono:

“Kita mendukung petahana Samanhudi berdasarkan atas rapat persetujuan dari kader PKS terkait hasil survei petahana dan kualitas dari kader. Kita setuju untuk mendukung program kerja petahana kedepannya. Dengan asumsi evaluasi dakwak PKS tetap dapat dijalankan di Kota Blitar.”<sup>86</sup>

Menyangkut permasalahan koalisi besar ini, PKS tidak begitu mempersoalkan. Bagi PKS, selagi program kerja dari calon petahana sesuai dengan arah kebijakan partai maka kita akan mendukung. Namun, pengawasan

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara bersama Said Novandi, Kader Fraksi PDIP di DPC PDIP Kota Blitar pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

<sup>86</sup> Hasil wawancara bersama Leo Sudilaksono Ketua Fraksi PKS di kediamannya Kota Blitar pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

akan tetap PKS jalankan. Pengawasan ini bertujuan untuk memonitoring program-program petahana nantinya, ungkap Leo Sudilaksono.

#### **g. Partai Hanura**

Tak banyak yang bisa penulis jelaskan terkait arah ideologi maupun kebijakan partai dari Partai Hanura. Sulitnya untuk menemui para kader membuat minimnya informasi yang penulis dapatkan. Contoh ini saja sudah memperlihatkan bagaimana sikap partai terhadap masyarakat. Bersikap acuh dan tidak peduli memperlihatkan benar bahwa karakter partai hampir semua mementingkan kepentingan internal partai. Namun yang jelas, dari data yang dihimpun di KPU Kota Blitar, benar secara keembagaan Hanura ikut mendukung Samanhudi dalam penyelenggaraan pilkada Kota Blitar.

#### **5.1.1.1 Strategi Penentuan Koalisi**

Pilkada langsung dan pembentukan koalisi lintas partai di Indonesia seringkali tidak mengikuti pola baku pengelompokan ideologis. Pratikno juga menyatakan sejatinya bahwa era Pilkada langsung kini membuat partai politik seringkali mengenyampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis seperti uang dan kekuasaan sebagai dasar pembentukan koalisi.<sup>87</sup>

Pembentukan koalisi bukan hanya ditentukan oleh jumlah mereka yang bergabung tapi juga agenda kebijakan macam apa yang ingin diwujudkan oleh partai politik. Partai politik dan pembentukan koalisi di Kota Blitar ada dengan beberapa modifikasi. Salah satu modifikasi yang penting untuk dipertimbangkan

---

<sup>87</sup>Pratikno. *Political Parties in Pilkada: Some Problem for Democratic Consolidation.*, 2009. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb. *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. hlm 53

adalah soal orientasi lain di luar hasyrat pencarian kekuasaan dan menjaga garis kebijakan, seperti soal ideologi di dan pragmatisme elit parpol di tingkat lokal. Jika partai politik di Kota Blitar di kategorisasi, maka terdiri dari partai Islam, nasionalisme, sosialisme-demokrat, tradisionalisme Jawa. Kategorisasi ideologis ini dipakai untuk menjelaskan kecenderungan pembentukan koalisi berbasis politik aliran yang berlangsung pada Pilkada serentak di Kota Blitar Tahun 2015.

Koalisi partai politik merupakan keniscayaan bagi negara dengan sistem multipartai, karena hasil pemilu kerap menunjukkan konfigurasi suara yang tidak mampu memenuhi suara mayoritas untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri. Dampaknya perlu ada koalisi partai. Dalam sistem pemerintahan yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakekat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Namun sering kali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realitis dan layak.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Bambang, 2010, *Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*, hal 22

**Tabel 5.1**  
**Tipologi Koalisi Partai Politik**

<b>Orientasi Kebijakan</b>	<b>Ukuran Anggota</b>	
	<b>Kecil</b>	<b>Besar</b>
<b>Ideologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &lt;30% dan atau partai pendukung ≤3</li> <li>• Satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan</li> <li>• Tidak ada partai dominan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &gt;30% kursi dan atau partai pendukung &gt;3</li> <li>• Satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan</li> <li>• Tidak ada partai yang dominan</li> </ul>
<b>Pragmatik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &gt;30% dan atau partai pendukung ≥3</li> <li>• Lintas ideologi dan orientasi kebijakan</li> <li>• Satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi</li> <li>• Adanya figur kuat struktural/non struktural partai sebagai sponsor/penyanggah dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &gt;30% kursi dan atau parpol</li> <li>• Lintas ideologi dan orientasi kebijakan</li> <li>• Satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi</li> <li>• Figur kuat non struktural partai sebagai sponsor/penyanggah dana</li> </ul>

Sumber: Michael Laver<sup>89</sup>

Setidaknya, ada dua skema yang sedang disiapkan oleh partai-partai dalam Koalisi sebagai strategi memenangkan Pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Kedua skema tersebut memiliki ketergantungan terhadap partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kota Blitar, yaitu PDI Perjuangan. "Skema pertama yaitu (Koalisi Kemenangan) bersama PDIP," ujar Sugeng Prapto Kader PDIP Kota Blitar, yang penulis temui di Kantor PDAM Kota Blitar, 11 Desember 2016). Koalisi Kemenangan diikuti oleh delapan partai politik yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai

<sup>89</sup>Michael Laver. (1989). *Theories of Coalition Formation and Local Government*. In Colin Mellors and Bert Pijnenburg (eds). *Political Parties and Coalitions in European Local Government*. London: Routledge.

Demokrat, PAN, PKS, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem. Namun, terbentuknya koalisi ini hanya berada pada pengurus di tingkat Kota Blitar saja.

Sugeng mengatakan:

“Jika Partai Politik bergabung dengan Koalisi Kemenangan, maka PDIP memiliki hak untuk menentukan calon Wakil Walikota yang akan diusung. PDIP mendapatkan keistimewaan itu karena merupakan partai pemenang atau pemilik jumlah kursi terbanyak di DPRD Kota Blitar. Pada saat itu, PDIP memiliki satu nama calon Wakil Walikota untuk disepakati internal partai, yaitu Drs. H. Santoso. M.Pd. Santoso sendiri adalah mantan Sekretaris Daerah Kota Blitar pada saat Samanhudi menjabat sebagai Walikota Blitar Tahun 2010”.<sup>90</sup>

Meski demikian, Koalisi Kemenangan memahami bahwa PDIP merupakan partai yang bisa mengusung calon Walikota dan calon Wakil Walikota sendiri, tidak perlu berkoalisi, pada Pilkada Kota Blitar 2015. Sugeng mengatakan Koalisi Kemenangan ini-pun mengantisipasi jika partai politik memisahkan diri dari koalisi dan membentuk koalisi besar lain guna mengusung calon mereka sendiri. Jika hal itu terjadi, maka PDIP harus terus berjalan. Skema tanpa adanya dukungan dari partai politik lain juga telah disiapkan oleh PDIP.

Kota Blitar sempat dikejutkan dengan koalisi besar antar partai politik. PDIP dan sejumlah Partai di Kota Blitar bertemu, sepakat mendeklarasikan dukungan kepada petahana Samanhudi Anwar. Pertemuan ini ditanggapi secara beragam oleh politisi dan pengamat. Ada yang menilai pertemuan itu positif dan merupakan hal yang wajar - tidak perlu diributkan. Sementara ada yang menyesalkan adanya pertemuan itu karena seakan menga-burkan posisi masing-masing partai. koalisi PDIP dan Partai politik di Kota Blitar itu akan digunakan

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara bersama Sugeng Prapto Kader Fraksi PDI Perjuangan di PDAM Kota Blitar pada tanggal 11Desember 2016 pukul 80:00WIB

untuk kepentingan praktis memenangkan Pilkada. PDIP bisa bekerjasama dengan membentuk koalisi dan mengusung calon yang sama agar bisa memenangkan Pilkada. Strategi dari PDIP sendiri menginginkan agar partai politik yang ada di Kota Blitar dapat sepenuhnya bergabung dengan mereka, mendukung pasangan calon Walikota Samanhudi Anwar. Hal ini di upayakan agar nantinya penyelenggaraan pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan kondusif.

Sampai disini penulis melihat lemahnya apa yang disebut sebagai pengawasan (*oposisi*). Perilaku partai yang berbasis ideologi dan program seharusnya muncul bukan hanya dimasa pemilu, melainkan terus berlanjut setelah pemilu. Ideologi menjadi faktor yang menentukan perilaku partai begitu mereka memasuki arena elektoral. Namun, pada saat yang sama, oposisi tidak terbentuk karena ke-delapan partai tersebut bergabung. Fakta ini sesuai dengan kriteria sistem kepartaian yang terkartelisasi. Kini penulis beralih berupaya mengulas perilaku partai di arena berikutnya.

## **5.2 Orientasi *office-seeking* dalam Perekrutan Kandidat**

Pendekatan *office-seeking* berangkat dari kerangka teoretik pilihan rasional dan teori permainan. Pendekatan *office-seeking* berangkat dari asumsi bahwa partai adalah entitas yang tunggal (*single entity*), memiliki kecenderungan kalkulatif, dan hanya peduli pada usaha mendapatkan jabatan/kekuasaan.<sup>91</sup> Pendekatan ini menggunakan jumlah kursi dan atau jumlah partner kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi dan perekrutan kandidat.

---

<sup>91</sup>Hanna Back. (2005). Intraparty Politics and Coalition Formation: Evidence from Swedish Local Government. *Paper presented at the ECPR Joint Session*, Granada, 14-19 April 2005, hal 1

#### **a. Pertimbangan dalam Melakukan Rekrutment Kontestan Pilkada**

Dominasi kekuatan PDIP dalam Pemilu Legislatif juga berlanjut pada tingkat kemenangan Pilkada. Hal ini karena dominasi partai menunjukkan basis massa yang kuat dan kekuatan dari mesin politik dari partai politik. Partai memperoleh suara besar dalam Pemilu Legislatif 2014 (dengan perolehan suara sebesar 40%) menggambarkan basis massa yang kuat dari PDIP. SEMenggambarkan basis massa yang kuat dari partai itu, sekaligus juga memperlihatkan mesin politik yang bekerja keras secara optimal di Kota Blitar. Hasil pada Pilkada memperlihatkan bahwa hubungan antara dominasi kemenangan partai dalam pemilu juga akan berimplikasi pada hasil dari pilkada itu. Dengan perolehan suara dominan selama pemilu mulai dari Tahun 2004, membuat potensi kemenangan PDIP pada pilkada menjadi besar.

Dari serangkaian hasil dominasi kemenangan tersebut tentu ada pertimbangan mekanisme PDIP dalam merekrut kontestan yang akan diusung dalam pemilu maupun pilkada. Ketika pilkada langsung diselenggarakan pada tahun 2005 PDIP kala itu melihat sosok petahana yang sekaligus kader partai Djarot Saiful Hidayat layak untuk dipertimbangkan maju kembali dalam pencalonan Walikota Blitan Tahun 2005. Hal ini berdasarkan dari perhitungan elektabilitas dan integritas sosok Djarot selama memimpin Kota Blitar satu periode. Hasilnya pun tak mengecewakan, justru PDIP berhasil mengang pada pilkada tahun 2010 dengan mengusung Djarot Saiful Hidayat kembali.

Setelah masa kepemimpinan dua periode Djarot Saiful Hidayat, PDIP kembali gerilya mencari suksesor Djarot untuk kembali dicalonkan sebagai



Walikota Blitar Tahun 2010. Merujuk kepada nama Samanhudi Anwar. Kala itu Samanhudi Anwar menjabat sebagai anggota DPRD Kota Blitar. Seakan tidak ada putusnya, PDIP pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2010 kembali memenangkan pilkada dengan mengusung Samanhudi Anwar. Pada pilkada serentak Kota Blitar Tahun 2015, PDIP kembali mengusung Samanhudi Anwar untuk maju sebagai calon Walikota Blitar dengan menggandeng sejumlah partai politik Kota Blitar.

Dalam penetapan calon kepala daerah oleh partai politik tentu memiliki kriteria dan persyaratan tertentu serta pertimbangan yang matang dengan kalkulasi politik yang sangat hati-hati. Berikut ini diuraikan dan dijelaskan pandangan dari partai pendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso tentang alasan mereka untuk mendukung mereka:

- i. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS yang mendudukkan 1 orang wakilnya di DPRD Kota Blitar. Menurut penuturan Leo Sudilaksono sebagai Ketua DPD PKS Kota Blitar, PKS mendukung pencalonan Samanhudi Anwar karena dinilai adalah pasangan yang mempunyai komitmen dan punya nilai jual tinggi. Bahkan Leo dengan secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pasangan Samanhudi Anwar - Santoso sudah yakin bakal menang sebelum pemilukada Kota Blitar berlangsung. Hal ini katanya di dasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Tim pemenangan PKS sebelumnya.
- ii. Partai Demokrat. Partai Demokrat yang memiliki 2 orang wakil di DPRD Kota Blitar mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso

adalah karena keinginan anggota partai. Disamping itu Demokrat menilai pasangan Samanhudi Anwar – Santoso lebih punya pengalaman tentang pemerintahan dan pembangunan. Alasan ini diungkapkan oleh Pribadi Utomo dikediamannya Kota Blitar.

- iii. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai Gerindra mempunyai 3 orang wakilnya di DPRD Kota Blitar. Partai Gerindra mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso dengan alasan : Pertama, visi misi dan program Samanhudi Anwar – Santoso dengan Partai Gerindra mempunyai kesamaan. Kedua, pasangan Samanhudi Anwar – Santoso lebih punya kapabilitas dan peluang untuk menang dibandingkan dengan pasangan independent. Alasan ini disampaikan oleh Tan Ng Hing sebagai Sekretaris Partai Gerindra Kota Blitar 2016.
- iv. Partai Nasdem mempunyai satu orang wakil di DPRD Kota Blitar. Melalui Ketua DPD Partai Nasdem Muchson, beliau mengatakan mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso karena dinilai lebih layak memimpin Kota Blitar disebabkan kedua figure tersebut sudah teruji sebagai sosok yang punya integritas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat. Apalagi menurutnya, pasangan incumbent yang akan melawan Samanhudi Anwar – Santoso adalah pasangan rekayasa yang sengaja dibuat agar pelaksanaan pilkada serentak Kota Blitar dapat terlaksana sesuai jadwal.

- v. Partai Golongan Karya (Golkar). Dengan hanya memiliki 1 kursi legislatif, Golkar mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso berdasarkan hasil penjangkaran dan survey terhadap beberapa figure yang masuk nominasi ternyata pasangan Samanhudi Anwar – Santoso sangat mengakar rumput di hati masyarakat. Teruji dan memiliki kemampuan serta berpengalaman dibandingkan pasangan lainnya.
- vi. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mempunyai 1 orang wakil di DPRD Kota Blitar. Partai ini mendukung pasangan Samanhudi Anwar – Santoso dengan alasan pasangan Samanhudi Anwar – Santoso dinilai lebih bermasyarakat dan punya peluang untuk menang. Bahkan menurut Atto Urrohman mantan ketua DPD Hanura periode 2010-2015 yang penulis hubungi via telfon menambahkan pasangan Samanhudi Anwar – Santoso dinilai lebih dapat diterima kalangan masyarakat Kota Blitar.

**b. Mekanisme Partai dalam Melakukan Penetapan Kandidat Kontestan Pilkada**

Kiprah perpolitikan Samanhudi Anwar sebelum ia menjadi seorang Walikota adalah benar-benar berasal dari bawah, bahkan jauh dari kesan sebagai orang bedasi. Perjalanan Samanhudi Anwar yang kemudian memilih untuk masuk kedalam ranah perpolitikan sangatlah berliku-liku. Mulai dari petugas karcis bioskop sampai dengan hidup dijalan dan bergaul dengan para pemabuk dan penjudi. Hal tersebut semata-mata ia lakukan hanya untuk merasakan bagai mana rasanya posisi sebagai orang bawah dalam strata kemapanan ekonomi. Sehingga

tatkala ia memantapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif pada Tahun 1999 di Kota Blitar, ia mengerti akan apa yang diharapkan masyarakat kecil kepada pemimpin daerahnya.

Awal mula Samanhudi Anwar memulai karir kepolitikannya ia bergabung bersama PDIP dengan tujuan agar dapat mengokohkan perjuangannya. Yang mana imbas dari bergabungnya Samanhudi Anwar ke PDIP membuahkan hasil pertamanya. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Blitar periode Tahun 1999-2004. Setelah periode tersebut selesai, dan berkat kinerjanya yang baik kemudian Samanhudi Anwar terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2004-2009 sekaligus dipercaya oleh PDIP menjadi ketua DPC PDIP Kota Blitar hingga saat ini. Jabatan yang Samanhudi Anwar dapatkan setiap adanya penyelenggaraan pemilu hingga saat ini menjadi toak ukur bahwasanya ia adalah sosok pemimpin sejati. Kinerja selama ia menjabat sebagai anggota dewan lantas membuat ia direkomendasikan oleh PDIP mencalonkan diri sebagai Walikota Blitar periode 2009-2010 yang saat itu didampingi oleh Purnawan Bukhori.

Selama menjabat sebagai Walikota Blitar satu periode, ternyata kinerja dari Samanhudi Anwar sangatlah baik. Ia benar-benar menjadikan ADPD Kota Blitar sangat pro rakyat. timbal balik Kebijakan ini secara umum bertujuan menyejahterakan masyarakat Kota Blitar melalui pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan efisien. Tujuan akhirnya adalah Kota Blitar memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintelektual tinggi, berbudi pekerti, serta

mengetahui wawasan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan.<sup>92</sup> Secara khusus memiliki target untuk menyejahterakan kader PDIP di Kota Blitar. yang ia berikan selama menjabat satu periode adalah pendidikan gratis bagi rakyat kecil. Said Novandi sebagai ketua bidang pemenangan pemilu Tim Kampanye Samanhudi Anwar memberikan penjelasan terkait kebijakan Pemerintah Kota Blitar dibawah kepemimpinan Samanhudi Anwar yang mencetuskan pendidikan gratis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Orang bodoh itu pasti dekat dengan kemiskinan, dan orang PDI Perjuangan itu kebanyakan orang miskin. Maka melalui Pak Samanhudi Anwar seluruh kader PDI Perjuangan dapat merasa sejahtera dan nyaman, terutama dengan pendidikan gratis sehingga teman-teman kader merasa sangat terbantu”.<sup>93</sup>

Dari hasil serangkaian kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat, lantas PDIP Kota Blitar bergerak cepat dengan kembali mencalonkan Samanhudi Anwar sebagai calon Walikota Blitar untuk periode 2015-2020. Sebenarnya, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh PDIP Kota Blitar, kandidat yang diajukan untuk maju di pilkada Kota Blitar Tahun 2015 sebanyak 4 calon. Namun, hasil survey dari serangkaian hasil yang didapat lapangan memunculkan Samanhudi Anwar yang mendapatkan respon tertinggi. Hal tersebut didasari oleh kinerja selama satu periode yang dirasa baik dan membawa arah perubahan baik bagi Kota Blitar. Tidak hanya itu, popularitas Samanhudi Anwar juga tinggi dan elektabilitasnya sebagai pemimpin sangatlah baik.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, *Pintar Tak Harus Bayar*, Blitar: CV Mandiri Jaya, 2014, hal 63

<sup>93</sup>Hasil wawancara bersama Said Novandi Kader Fraksi PDIP di kediamannya Kota Blitar pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

<sup>94</sup>*Ibid.*,

Mekanisme PDIP dalam melakukan penetapan calon kandidat untuk mendampingi Samanhudi Anwar sebagai calon Walikota Blitar pada pilkada serentak 2015 sangatlah ketat. Pada saat itu PDIP mencari sosok individu non-kader yang mereka cari untuk dipersiapkan sebagai pendamping Samanhudi Anwar. Beberapa *public figure* didata dan dimonitoring sehingga agar mendapatkan kandidat yang sesuai dengan arah dari kinerja partai. Seperti diketahui, figur tersebut adalah Santoso. Santoso sendiri berlatar belakang seorang birokrat. PDIP pada saat itu melalui Pak Sugeng Prapto sebagai Ketua Bidang Kaderisasi, mengajukan Santoso sebagai calon Wakil Walikota didasarkan pada latar belakang serta kinerjanya sebagai birokrat. Santoso dirasa memahami betul akan permasalahan birokrasi yang ada di Kota Blitar. Ini menjadikannya sangat cocok berdampingan dengan Samanhudi Anwar untuk kedepannya membangun Kota Blitar.<sup>95</sup>

### 5.3 Kampanye yang *Capital Intensive*

Demokrasi meletakkan kekuasaan ditangan rakyat, bukan pada segelintir elit. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kekuasaan, setiap politisi harus menemui rakyat. semakin banyak rakyat yang harus di jangkau dan di yakinkan, maka akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Iklan politik menjadi sangat efektif untuk menjangkau rakyat pemilih. Apa lagi media televisi sudah menjangkau ke seluruh rumah warga. Namun, konsekuensi dari iklan politik ini adalah menjadi mahalnya ukuran suatu syarat bagi calon kepala daerah agar dirinya dikenal masyarakat serta visi – misinya diketahui masyarakat daerahnya.

---

<sup>95</sup>*Ibid.*,

Meningkatnya peran media dalam kampanye yang terdiri dari dua hal. Pertama, aktivitas berkampanye kian banyak direkayasa dan dikemas agar sesuai format media. Kedua, porsi dana kampanye untuk media kian meningkat. Namun, apa yang terjadi bila kampanye sepenuhnya dilakukan oleh media? Kian terfokusnya kampanye pada individu kandidat atau tokoh wakil partai yang membuat Pemilu menjadi semacam kontes antarkandidat, bukan lagi kontes antar partai.<sup>96</sup>

Sejatinya dalam pelaksanaan kampanye Partai Politik hendaknya yang bergerak dan menyampaikan kualitas akan kadernya yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Tapi apa yang terjadi kini dari fungsi partai politik tak lepas hanya sebagai penjual jasa bagi anggota non kader untuk menyewa jasanya maju dalam pemilihan kepala daerah. Tak sedikit akhirnya partai politik di Indonesia menjadi partai *rent seeking*.

#### **a. Preferensi Kampanye**

Dua pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakilwali kota Blitar menyepakati besaran dana kampanye Pilkada Kota Blitar 2015 sebesar Rp3 miliar. Angka Rp. 3 miliar itu merupakan nominal maksimal yang berlaku bagi masing-masing paslon. "Telah disepakati bersama kedua paslon bahwa dana kampanye maksimal Rp3 miliar," ujar Anggota Komisioner KPU Kota Blitar Mashudi kepada peneliti.<sup>97</sup> Pilkada di Kota Blitar diramaikan dua pasangan calon, yakni pasangan petahana Samanhudi Anwar-Santoso yang diusung koalisi

---

<sup>96</sup>Anthony mughan, media and the presidentialization of parliamentary elections, (Basingstoke: Plagrave, 2000)

<sup>97</sup>Hasil wawancara bersama Mashudi Komisioner KPU Kota Blitar pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 08:30 WIB

PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Sementara lawan adalah pasangan Muhsin-Dwi Sumardianto berangkat dari jalur perorangan (independen). Secara aturan sebagian besar kampanye paslon dibiayai oleh penyelenggara pemilu (KPU) di antaranya terkait pemasangan sejumlah alat peraga, yakni mulai wilayah desa, kecamatan, hingga kabupaten/ kota. Sesuai jadwal kampanye berlangsung mulai tanggal 27 Agustus dan berakhir pada 5 Desember 2015.

Menurut Mashudi anggota Komisioner KPU Kota Blitar, usulan awal dana kampanye paslon adalah Rp. 800 juta. Namun dalam perjalanannya diralat menjadi Rp. 3 miliar. "Dalam hal ini penyelenggara hanya sebagai fasilitator. Penentuan kesepakatan nominal berada di tangan paslon," katanya.<sup>98</sup>

Setelah dilakukan rapat mengenai batas dana kampanye, untuk publikasi calon dilakukan pelaporan dan audit dana kampanye. Pelaporan dan audit dana kampanye dimulai pada tanggal 26 Agustus 2015. Mekanisme pelaporan dana kampanye dilakukan tiga tahap yaitu: LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Berikut ini adalah LPPDK pasangan petahana Samanhudi Anwar – Santoso:

---

<sup>98</sup>*Ibid.*,



**Tabel 5.2**  
**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye**  
**Samanhudi Anwar**

No	Uraian	Rp
A	Saldo per 24 Agustus 2015	100.000
B	Penerimaan	100.185.436
1.	Pasangan Calon	100.000.000
2.	Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)	-
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	-
6.	Lain – lain Komitmen	185.436
C	Pengeluaran	97.540.087
	Pengeluaran Operasi	
a.	Pertemuan Terbatas	7.462.500
b.	Pertemuan Tatap Muka	1.625.000
c.	Pembuatan Iklan di Media Cetak dan Elektronik	-
d.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60.000.000
e.	Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	-
f.	Rapat Umum	26.560.000
g.	Kegiatan Lain yang tak melanggar aturan Perundang-Undangan	-
h.	Lain-lain	44.585

Sumber: Hasil Rekapitulasi Penulis dari KPU Kota Blitar 2016

Jika dilihat dari laporan tersebut maka terlihat adanya pengeluaran yang sangat sedikit sekali dibanding persetujuan batas maksimal dana kampanye sebesar 3 Milyar. Terlihat jelas bahwa kampanye mahal akan terhalang oleh peraturan KPU. Namun disini partai politik justru memperlihatkan *back to traditional campaign*. Dengan PDIP menjaring hampir seluruh partai politik Kota

Blitar, maka biaya kampanyepun dapat ditekan.karena tidak adanya persaingan yang terjadi antar partai untuk memenangkan calon pada pilkada Kota Blitar. Justru disini, pasangan Muchsin – Dwi Sumardianto lah yang mengeluarkan dana ekstra untuk kampanyenya agar visi-misinya tersampaikan oleh masyarakat. Kecilnya pengeluaran pasangan Samanhudi Anwar – Santoso dalam kegiatan Novandi:

“Waktu penyelenggaraan kampanye itu, pengeluaran kita tidak banyak. Yang tercatat dalam buku keuangan kurang lebihnya sebesar 100 juta. Kita menerapkan strategi meminimalisir biaya. Kita tidak mengadakan kampanye besar-besaran yang mengerahkan massa seperti yang banyak dilakukan oleh partai politik di daerah pada umumnya. Dengan modal sosok pak Samanhudi saja kita cukup. Apa lagi partai politik mayoritas juga ikut mendukung kita dan pak Samanhudi. Dengan hanya mengumpulkan massa sebanyak satu kali, dan itu efektif. Itu yang disebut strategi meminimalisir biaya.”<sup>99</sup>

Konsolidasi internal partai utamanya PDIP pada saat itu memang mencoba agar sebisa mungkin kampanye ini bebas dari politik uang. Ini dijaga agar pelaksanaan kampanye bebas dari *money politic* yang mana bagi PDIP itu akan sangat mencederai citra baik masyarakat kepada PDIP Kota Blita. Seperti apa yang diungkapkan oleh pak Sugeng Praptono:

“PDIP ingin menjaga kepercayaan masyarakat Kota Blitar terhadap kinerja partai politik beserta para kadernya. Hal ini ditujukan untuk persiapan pemilu ke depannya. Agar kampanye bebas dari kampanye mahal maka PDIP melakukan jaringan modal dengan menggandeng mayoritas partai politik yang ada di Kota Blitar. Hal ini bertujuan untuk menekan persaingan antar partai yang akan banyak menghabiskan dana untuk kampanye. Juga agar kampanye itu sendiri tercipta kondusif dan aman. Karena tidak ada gesekan antar partai politik.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara bersama Samanhudi Anwar Ketua Fraksi PDIP di Kantor Walikota Kota Blitar pada tanggal 10Desember 2016 pukul 09:40 WIB

<sup>100</sup>Hasil wawancara bersama Sugeng Prapto Kader Fraksi PDIP di Kantor PDAM Kota Blitar pada tanggal 11Desember 2016 pukul :0820 WIB

Samanhudi Anwar pada Pilkada 2015 di Kota Blitar mengakui tidak melakukan politik uang dalam kampanyenya. Diakuinya bahwa telah membantu lawan pasangan calon yakni Mochsin – Dwi Sumardianto. Bantuan tersebut berupa 82 tim kampanye beserta dananya dalam melakukan pendataan syarat administrasi pencalonan jalur perorangan pasangan Mochsin – Dwi Sumardianto. Syarat administrasi tersebut adalah pendataan jumlah suara dukungan melalui pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari masyarakat Kota Blitar.<sup>101</sup>

Dana yang diberikan Samanhudi Anwar digunakan untuk membeli suara dukungan melalui pendataan KTP sebagai syarat administrasi pencalonan Mochsin – Dwi Sumardianto sebagai pasangan jalur perorangan atau independen. Pembelian KTP tersebut dilakukan oleh tim kampanye Samanhudi Anwar sebesar Rp. 25.000/KTP. Menurut Samanhudi Anwar dari hasil pembelian tersebut banyak masyarakat yang menolak pembelian KTP dan memberikan secara sukarela.<sup>102</sup> Hal ini dikarenakan masyarakat mengetahui Mochsin – Dwi Sumardianto merupakan “pasangan boneka” bentukan Samanhudi Anwar agar dapat terselenggara Pilkada 2015 di Kota Blitar. Atas dasar tersebut masyarakat memberikan KTP secara sukarela karena menginginkan Samanhudi Anwar menjabat kembali sebagai Walikota Blitar 2016-2021.

Berikut merupakan pernyataan Samanhudi Anwar terkait berita di masyarakat Kota Blitar yang memberikan predikat “pasangan boneka” kepada

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara bersama Muh. Samanhudi Anwar Walikota Blitar tahun 2010-2015 pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 09.14 WIB di

<sup>102</sup> *Ibid.*,

pasangan calon Mochsin – Dwi Sumardianto pada Pilkada 2015. Samanhudi

Anwar mengatakan bahwa:

“Masyarakat ada yang mengatakan Pak Mochsin adalah pasangan boneka bentukan saya itu juga benar. Saya memang meminta tim saya untuk membantu timnya Pak Mochsin untuk mengumpulkan KTP. Saya memberikan dana kampanye untuk membeli KTP di masyarakat Rp. 25.000 per KTP. Tapi realitanya masyarakat menolak uang tersebut. Masyarakat tahu jika uangnya dari saya, mereka merasa kasihan kepada saya kalau mau mengambil uangnya. Sudah saya bantu sekolahnya anaknya sehingga diberikan sukarela KTP mereka kepada Pak Mochsin sebagai balas budi ke saya. Uangnya sama tim dikembalikan ke saya tapi saya berikan lagi ke tim sebagai bonus”.<sup>103</sup>

Pemberian dana sebagai proses membantu pengumpulan syarat administrasi KTP yang dilakukan Samanhudi Anwar kepada pasangan calon Mochsin – Dwi Sumardianto merupakan timbal balik antara kedua pihak tersebut dan saling menguntungkan. Dengan memfasilitasi Mochsin untuk mencalon sebagai lawan pasangan calon pada Pilkada 2015 sehingga Kota Blitar dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2015 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak dapat dilakukan dengan calon tunggal. Keuntungan yang diperoleh Samanhudi Anwar adalah dapat menyelenggarakan Pilkada Kota Blitar tahun 2015 dan mencalonkan diri menjadi calon Walikota Blitar 2016-2021. Popularitas yang sudah dimiliki Samanhudi Anwar merupakan motivasinya untuk memperoleh kemenangan Pilkada 2015. Keuntungan yang didapat oleh Mochsin ialah dengan mudah mencalonkan diri sebagai calon walikota melalui jalur perorangan pada Pilkada 2015.

---

<sup>103</sup>*Ibid.*,

Mochsin selaku calon walikota pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2015 memberikan penjelasan terkait predikat “pasangan boneka” yang diberikan masyarakat kepadanya. Calon Walikota Blitar 2016-2021 jalur independen itu mengatakan bahwa:

Berita terkait pasangan boneka merupakan hak masyarakat Kota Blitar dalam menanggapi Pilkada tahun 2015. Saya dan Pak Samanhudi itu sudah dekat sejak dulu mungkin dari kedekatan saya itu masyarakat menilai saya boneka Pak Samanhudi. Padahal bukan, saya ini maju karena sudah sejak satu tahun yang lalu memang ingin mencalonkan diri sebagai walikota Blitar. Dan saya mengambil jalur independen itu karena saya memiliki peran dalam pembangunan pendidikan di Kota Blitar dan organisasi LSM lainnya. Saya juga merupakan pendiri Forum Peduli Pendidikan Kota Blitar. Saya mencalonkan diri karena ingin mensukseskan Pilkada dan melanjutkan pembangunan Kota Blitar yang sudah besar. Waktu jika saya tidak maju Pilkada Kota Blitar pasti diundur dan pembangunan Kota Blitar akan berhenti. Kalau saya pasangan bonekanya Pak Samanhudi kenapa saya bisa dapat suara dukungan 7000 sekian suara. Itu menunjukkan bahwa saya juga dikenal di masyarakat Kota Blitar. Namun, memang setelah pencoblosan saya mendapatkan 3000 sekian suara, itu mungkin karena pengaruh tim kampanye Pak Samanhudi yang lebih besar. Meskipun tidak menjadi walikota saya tetap akan terus membangun Kota Blitar

Samanhudi Anwar memberikan pernyataan bahwa Mochsin merupakan pasangan bentukannya dengan didanainya. Bantuan dana diberikan ketika melakukan pendataan syarat administrasi melalui KTP sebagai suara dukungan

pasangan calon independen tersebut. Pro dan kontra antara Mochsin dan Samanhudi ini telah dibuktikan dengan realita pada masyarakat bahwa diketahui dari tim kampanye yang menyatakan bahwa dana pembelian KTP secara tidak langsung memang dari Walikota Blitar periode 2010-2015 tersebut. Sehingga, hal ini menyimpulkan bahwa memang terjalin hubungan kerja sama antara Samanhudi Anwar dengan Mochsin selaku calon Walikota Blitar Pilkada 2015 jalur independen atau perorangan tersebut agar pilkada tetap terselenggara.

Pada saat kampanye berlangsung Partai Golkar menjadi satu-satunya partai yang diberi kehormatan oleh PDIP untuk membuka acara tatkala Samanhudi Anwar berhasil memenangkan pilkada Kota Blitar. Dahulu memang sempat PDIP dan Partai Golkar yang ada di Blitar mengalami gesekan yang disebabkan adanya perbedaan pandangan yang buruk antar para pemimpin partai ini. Tatkala PDIP yang dipimpin oleh Samanhudi sangat tidak menyukai Partai Golkar yang sebelumnya dipimpin oleh H.S. Widjianto. Ketidak sukaan Samanhudi dengan partai berwarna kuning ini juga berimbas tatkala ia menjabat sebagai Walikota Blitar Tahun 2010. Pada saat itu Samanhudi memerintahkan apapun yang ada berwarna kuning untuk disingkirkan. Ia sangat tidak menyukaian, salah satu pernyataan dari ketua Partai Nasdem pak Muchson.

Lantas hal ini berbeda tatkala Partai Golkar mengalami pergantian struktur kepengurusan internal partai. Semenjak pergantian kepengurusan pada bulan Agustus 2016, kini partai Golkar dipimpin oleh pak Hardihusodo atau bisa dipangging pak Dodok. Pak Dodok sendiri adalah sahabat sekaligus rekan kerja masa-masa muda pak Samanhudi di Kota Blitar. Beliau sama-sama terjun ke dunia

politik pada Tahun 1999, namun nasib kesuksesan membedakannya. Kala itu Samanhudi berhasil meraih predikat sebagai anggota DPRD Kota Blitar.

Dikarenakan pak Dodok adalah teman kaib satu perjuangan pak Samanhudi Anwar itu lah mengapa kini pak Samanhudi akrab dengan Partai Golkar. Pak Dodok juga merupakan salah satu pion utama Samanhudi dalam mengontrol partai politik di Kota Blitar. Itu mengapa kini Partai Golkar berada dibawah kendalinya dikarenakan adanya sosok pak Dodok. Saat kampanye pilkada berlangsung, memang pada saat itu pak Dodok belum menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Blitar, namun pak Samanhudi sendiri juga menunjuk pak Dodok sebagai Tim sukses pemenangan Samanhudi – Santoso.

Pendekatan ini dilakukan Samanhudi untuk dapat menjaring suara loyalis Partai Golkar. Samanhudi sendiri seolah tahu, bahwa Dodok akan diangkat sebagai ketua DPD Golkar. Dengan demikian ia dapat sesuka hati mengontrol Golkar dari luar, sedangkan urusan dalam dilakukan oleh pak Dodok sendiri. Saat dualisme kepengurusan partai Golkar berlangsung pak Widjianto selaku ketua DPD saat sebelum pak Dodok tidak dapat meminta surat pernyataan Partai Golkar pusat atas sikap yang akan diambil pada pilkada Kota Blitar saat itu. Namun, ditangan pak Dodok surat pernyataan dari kedua pemimpin Pusat Partai Golkar atas pernyataan dukungan untuk Samanhudi Anwar pada pilkada Kota Blitar berhasil di dapatkan. Yang mana surat pernyataan tersebut kemudia langsung diserahkan ke kantor DPC PDIP.

### b. Agenda Kampanye

Partai pengusung dan partai pendukung Samanhudi Anwar – Santoso terdiri dari satu (1) partai pengusung dan enam (6) partai pendukung. Kemudian membentuk sebuah tim kampanye yang bekerja bersama-sama bersatu untuk melancarkan kemenangan Samanhudi Anwar pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015. Adapun susunan tim kampanye Samanhudi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3**

#### **Tim Kampanye Samanhudi Anwar - Santoso**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Basuki Rachmat, S.H</li> <li>➤ M. Atok Urohman</li> <li>➤ Sutrisno</li> <li>➤ Tan Ngi Hing</li> <li>➤ Joko Nurbatin</li> <li>➤ Said Novandi</li> </ul>	Penasehat
2.	Drs. Siswandi Irianto	Ketua
3.	Drs. M. Ardi Usodo	Wakil Ketua I
4.	Dodik	Wakil Ketua II
5.	Sukardji	Sekretaris I
6.	Muchson, S.E	Sekretaris II
7.	Dr. Syahrul Alim	Bendahara
8.	Henri Pradipta Anwar	Lintas Partai
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nur Ali</li> <li>➤ Bayu Setyo Kuncoro</li> <li>➤ Galih Hendra Asmara</li> </ul>	Penggalang Massa
10.	Bidang-Bidang: Glebot Catur Arjitano, S.H Sutanto, S.H	Hukum/Advokasi



Dedik Hendrawanto	Humas
Yohanes Pujianto	Keamanan
Leo Surya	Transportasi
Suyatno	Logistik
Lili Sri Sumiarsih	Konsumsi
Indri Kusnawati	
Dr. Syahrul Alim	Tim Kesehatan

Sumber: *Hasil Olahan Penulis Dari Rekapitulasi Data KPU Kota Blitar, 2017*

Dua pasangan calon kepala daerah Kota Blitar tak menggunakan kesempatan kampanye yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat. Mereka justru memilih sarapan bersama tiap hari seperti tak sedang berkompetisi. Komisioner KPU Kota Blitar Mashudi mengatakan,<sup>104</sup> sudah memberi jadwal dan kesempatan kepada para pasangan calon itu untuk melakukan kampanye mulai 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Namun pada saat itu, momentum kampanye tidak digunakan kedua pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah Kota Blitar diikuti dua pasangan calon, yakni Muhsin–Dwi Sumardiyanto dari calon perseorangan dan petahana Samanhudi Anwar–Santoso, yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, NasDem, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat. Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar yang menggantikan Djarot Syaiful Hidayat sekaligus Ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP Kota Blitar. Sedangkan wakilnya Santoso adalah bekas Sekretaris Daerah Kota Blitar.

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara bersama Mashudi Komisioner KPU Kota Blitar pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 08:30 WIB

Mashudi mengatakan saat itu tidak ada satu pun dari pasangan calon yang melakukan kampanye terbuka. Hal ini diketahui dari belum adanya surat pemberitahuan kegiatan kampanye yang disampaikan kepada kepolisian dan KPU. “Saya tidak tahu alasan mereka tak mau kampanye, tapi mudah-mudahan partisipasi masyarakat tinggi,” katanya.

Samanhudi yang dikonfirmasi mengakui belum pernah melakukan kegiatan kampanye. Dia berdalih masih menghormati momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang diikuti banyak kegiatan di masyarakat pada Bulan Agustus 2015. Selain itu, dia juga lebih menyukai kegiatan kampanye tertutup dengan berdiskusi dari hati ke hati kepada masyarakat. “Cara ini saya kira lebih efektif daripada kampanye dengan panggung,” katanya.<sup>105</sup>

Uniknya, Samanhudi juga mengklaim kondisi politik di Kota Blitar selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini sangat kondusif. Bahkan nuansa permusuhan baik di tingkat pasangan calon maupun pendukung disebutkan sama sekali tak ada. “Setiap pagi saya sarapan bareng dengan calon satunya, buat apa musuhan,” katanya, yang optimistis bisa menang.

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara bersama Samanhudi Anwar Ketua Fraksi PDIP di Kantor Walikota Kota Blitar pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 09:40 WIB

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, di antaranya:

1. Telah ditemukan indikasi kartel politik yang dilakukan oleh partai politik pengusung dan pendukung petahana Samanhudi Anwar, maupun petahana sendiri.

Kartel politik yang diciptakan terjadi dalam beberapa wujud, di antaranya:

- a. Meleburnya basis ideologi partai dan koalisi serba bisa, yang salah satunya diakibatkan karena rendahnya penghayatan dan pemahaman partai terhadap nilai-nilai *platform* partai. Koalisi tujuh partai dengan ideologi berbeda ini merupakan pilihan paling rasional yang dilakukan baik partai politik maupun petahana Samanhudi Anwar.
- b. Pertimbangan orientasi *office-seeking* dalam merekrut kandidat kontestan politik. Modus *office-seeking* dalam konteks ini adalah “keberpihakan” partai kartel yang tinggi pada calon calon dari kalangan pemerintah (birokrasi), maupun mereka yang memiliki potensi kemenangan maksimal dilihat dari hasil survei elektabilitas dan popularitas.
- c. Kampanye yang *capital intensive* adalah ciri khas partai kartel. Namun, PKPU Nomor 7 Tahun 2015 telah membatasi kampanyekampanye mahal dan tidak mendidik. Sehingga, kampanye padat modal yang biasanya menggunakan media tidak dilakukan oleh partai politik. Kendati

demikian, partai masih memiliki peluang kampanye melalui *new campaign technology* berupa hasil survei yang juga mahal harganya.

2. Sikap pragmatis partai politik dalam mengangkat calon kepala daerah disebabkan karena dua hal:

- a. Analisis internal: aplikasi pilihan rasional dari aspek pendekatan *collective action* dan kegagalan fungsi partai politik. Sikap pragmatisme partai didukung atas keengganan partai untuk mengambil resiko, namun ingin memaksimalkan potensi kemenangan. Selain itu, gabungan partai politik yang mendukung petahana “sekuat” Samanhudi Anwar, sejatinya tidak bekerja dengan keras untuk memenangkan kandidat. Hal ini disebabkan Samanhudi Anwar sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Blitar. Sehingga, sekecil apapun kontribusi partai di dalam koalisi, masing-masing partai akan tetap mendapatkan distribusi manfaat yang sama besar. Inilah yang dikenal sebagai *free-rider* dalam istilah *collective-action theory*. Selain itu, partai juga mengalami kegagalan dalam fungsi rekrutmen dan *training elites*.
- b. Analisis eksternal: pragmatisme masyarakat dan produk hukum. Selain karena pilihan rasional, pragmatisme yang tumbuh dalam diri masyarakat Kota Blitar yang modern mengakibatkan bagimasyarakat yang terpenting adalah bukti praktis, bukti nyata daripembangunan yang dapat menyelesaikan permasalahan publik. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 juga menjadi instrumen yang bias petahana dari aspek kampanye.

## B. Saran

Penelitian ini menghasilkan sejumlah saran, di antaranya:

- a. Memangkas kartel politik yang dilakukan oleh partai, artinya harus memotong sikap pragmatis partai yang enggan bersaing dan hanya mengandalkan calon dengan potensi kemenangan tertinggi. Partai politik mengeliminasi hakikat partai politik, yakni sebagai organisasi yang menempatkan kadernya ke dalam pemerintahan. Sehingga, penulis menyarankan bahwa mekanisme survey popularitas dan elektabilitas kandidat haruslah dihapuskan. Partai politik sebaiknya fokus mempromosikan kader terbaiknya untuk maju ke dalam kontestasi pilkada.
- b. Guna menciptakan iklim demokrasi yang kompetitif, maka penulis menyarankan pemerintah perlu memberikan pengaturan terkait laporan akuntabilitas yang akuntabel dan transparan tentang penggunaan subsidi partai politik yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Subsidi tersebut seharusnya dipergunakan semata-mata untuk perbaikan kualitas kader partai. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kebingungan rekrutmen kandidat politik ketika pilkada dan orientasi *office seeking* yang dimiliki oleh partai kartel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG.
- Ambardi, Kuskridho. 2008. *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*, Dissertation, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, The Ohio State University.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Diamond, Lary. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta : IRE Press.
- Dunleavy, Patrick. 1991. "Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science," UK: Harvester Wheatsheaf.
- Gaus, F Gerald et. 2012. All, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Nusa Media
- Horizon, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

- Maleong, J Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marijan, Kacung. 2012. "*Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*", Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki. 1997. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Graha Indonesia.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: PolGovUGM.
- Salang, Sebastian. 2007. *Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: ForumPolitisi-Federich Naumann Stiftung.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarjadi, Soegeng dan Rinakit, Sukardi. 2004. *Meneropong Indonesia 2020*, Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate.
- Suryawan, Muhammad Lutfi. 2014. *Peran Partai Politik Dalam Memenangkan Calon Walikota (Studi pada partai Demokrat dan PDI-P dalam mobilisasi pemilih pada pemilihan Walikota Kediri 2013)*, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet.
- Sujatmiko, Ananda Putri. 2016. Ananda Putri Sujatmiko, *Kartelisasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun*

2015, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Sumule, Verayanti. 2012. Verayanti Sumule, *Strategi Politik Incumben Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010*, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Suyatno. 2008. *Menjelajah Demokrasi*, Bandung: Humaniora.

Wahid, Makmun. 2011. *Analisa Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

## JURNAL

Jati, Wasisto Rraharjo, 2014, “*Pemilu 2014: Kartelisasi Elite Versus Representasi Publik*”, LIPI, Volume II No. 1, pp. 45-58.

Katz, Richard. S, Peter Mair, 1995, *Changing Model of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*, Sage Publication, The Journal of Politics, Vol.1, No. 1, pp. 5-28

Slater, Dan 2004, *Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition*, Indonesia 78: 61-92



Stone, Walter J., et al. 2010. *Incumbency Reconsidered: Prospects, Strategic Retirement, and Incumbent Quality in U.S. House Elections*, The Journal of Politics, Volume 72, No. 1, pp. 178-190

## **MEDIA dan INTERNET**

<http://kpu.blitarkota.go.id/berita-pengumuman-penetapan-paslon-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-2015.html>.

[Sindonews.com/read/2015/07/27/519/1185742/duet-samson-pede-menangi-pilwalkot-blitar](http://Sindonews.com/read/2015/07/27/519/1185742/duet-samson-pede-menangi-pilwalkot-blitar).

[Sindonews.com/read/10677929/23/19/-kabupaten-kota-di-jawa-timur-gelar-pilkada-serentak](http://Sindonews.com/read/10677929/23/19/-kabupaten-kota-di-jawa-timur-gelar-pilkada-serentak).

<https://m.tempo.co/read/kolom/2010/06/14/191/pelebagaan-kartel-politik>.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/02/058697350/pilkada-sepi-dua-calon-wali-kota-di-blitar-menolak-kampanye>

<http://blitar.memo-x.com/27/01/2016/sosok-wakil-walikota-terpilih-kota-blitar.html>

## **LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN**

**Pertanyaan untuk Muh. Samanhudi Anwar selaku petahana Walikota Blitar**

- 1. Bagaimana strategi bapak dalam menjadi Walikota Blitar dari tahun 2010-2015 sehingga dapat memimpin Pemerintahan Kota Blitar dan pendukung bapak?** Pertama yang saya lakukan adalah revolusi mental dengan mendisiplinkan PNS yang suka bolos kerja dan menata ke lembaga agar sesuai dengan visi misi saya. Kalau untuk memimpin rakyat Kota Blitar saya pendidikan karakter. Sayauntut harus bisa baca Al-Qur'an untuk seleksi masuk sekolah.
- 2. Bagaimana dukungan PDIP kepada bapak sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** Saya sebenarnya ingin mencalonkan sebagai Walikota Blitar sejak 2005. Pada awal pilkada itu sebenarnya PDIP tidak siap memimpin. Hasil rakercab dari 29 yang hadir 27 memilih saya untuk tetap menjadi ketua dewan untuk menguatkan parlemen. Keputusannya Pak Djarot tetap mencalonkan lagi sebagai Walikota Blitar karena dianggap orang pintar. Ternyata malah mengingkari janji partai tidak melaksanakan pendidikan gratis. Maka dari itu tahun 2010 saya maju dengan dukungan penuh tim partai.
- 3. Bagaimana pendapat bapak terkait isu dimasyarakat bahwa Pak Mochsin merupakan pasangan boneka di Pilkada 2015?** Memang saya memberikan dana dan tim saya untuk membantu Pak Mochsin dalam mengumpulkan KTP. Tapi realitanya banyak masyarakat yang menolak uang sebagai pengganti KTP Rp. 25.000/KTP, karena mereka tahu uang itu dari saya. Dan saya sudah membantu menyekolahkan anaknya, otomotif memiliki rasa balas budi kepada saya. Uangnya akhirnya saya berikan ke tim yang membantu di lapangan itu.
- 4. Bagaimana dukungan DPRD Kota Blitar dari Fraksi PDIP kepada bapak sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** DPRD semua solid dengan program pemerintahan saya. Teman-teman fraksi merupakan tim sukses saya di

Pilkada 2015. Karena waktu pileg saya juga membantu dengan dana dan tenaga.

5. **Apa tujuan bapak menggandeng seluruh partai politik pada pilkada Kota Blitar Tahun 2015?** Tujuan saya menggandeng seluruh partai politik agar ikut mendukung saya supaya terciptanya penyelenggaraan pilkada yang aman dan kondusif.
6. **Apakah dengan bergabungnya hampir seluruh partai politik di Kota Blitar tidak menyebabkan gagalnya persaingan dalam pilkada lalu?** Persaingan dalam pilkada lalu memang ada yang berpendapat sedemikian rupa, namun bagi kita adalah bagaimana agar kepemimpinan ini dapat berlanjut sehingga Blitar dapat kembali melanjutkan program-program rakyat jilid II.
7. **Adakah partai politik yang ikut mendukung bapak meminta persyaratan khusus?** Mungkin bisa dibilang beberapa permohonan kecil dan itu ada beberapa partai yang menyapaikan kepada saya.
8. **Dengan kuatnya integritas serta elektabilitas bapak sebagai petahana, apa benar tidak ada partai politik yang berani bertarung secara terbuka pada pilkada lalu?** Kenyataan bahwa partai politik sepertinya masih menunggu peluang di tahun 2020. Saat dimana saya tidak menjabat lagi.

**Pertanyaan untuk Drs. Sugeng Praptono selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Kota Blitar**

1. **Bagaimana proses bapak sebagai pengurus DPC PDIP Kota Blitar?** Saya 1982 masih sebagai penggembira, 2001 sebagai kader 2002 sebagai pengurus bagian Litbang DPC, 2005 wakil bidang organisasi, 2015 wakil kaderisasi.
2. **Bagaimana dukungan bapak terhadap bapak Samanhudi Anwar sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** 2010 Pak Hudi sebagai ketua DPC dan ketua dewan itu merupakan kader terbaik di DPC. Tapi banyak masyarakat yang tidak menghendaki beliau mencalonkan sebagai Walikota. Masih terbawa Pak Djarot, memang sebagai negarawan bagus tapi sebagai politisi tidak, akhirnya tetap memperjuangkan Pak Hudi. Upaya yang dilakukan survey 2 masyarakat tetap rendah ke Pak Hudi. Terus saya perintahkan untuk sosialisasi

setiap hari sehari 6x selama 7 bulan dan tentunya bawa uang. Saya yang mengurus mendesak ke DPP bersama Pak Zainal untuk menyetujui Pak Hudi mencalonkan diri. Selain itu saat itu lawannya berat, saya juga melakukan lobby ke pak Anang ternyata beliau tetap mengotot untuk mencalonkan juga sebagai Walikota, dan ke Pak Heru juga sama. Tapi Pak Hudi malah sudah menemukan pasangan yaitu Pak Pur. Alasannya orangnya aneh suka tertawa dan Pak Hudi sering melihatnya di depan Kawula Alit. Akhirnya saya menghubungkan dengan PKB. Hasilnya kita harus memberikan mahar untuk PKB yaitu kantor.

- 3. Apa yang diberikan Samanhudi Anwar ketika menjabat sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** Kader diberikan lapangan pekerjaan karena itu tanggungjawab Pak Hudi. Pekerjaan outsurching, penyapu jalan, kesehatan, dll. Saya sebagai Kepala PDAM Kota Blitar atas perintah Pak Hudi. Saya ditunjuk oleh beliau tahun 2014, tepatnya SK saya turun September 2014.
- 4. Bagaimana pendapat bapak terkait isu Pak Mochsin sebagai pasangan boneka Samanhudi Anwar pada Pilkada 2015?** Sebenarnya seluruh masyarakat Kota Blitar menghendaki Pak Hudi mencalon kembali, tapi karena PKPU tidak memberlakukan calon tunggal akhirnya partai mengeluarkan kebijakan calon boneka. Kita mencari orang yang mau diajak dan mau dipermalukan. 30 September 2015 kita rapat di rumah dinas walikota dengan keputusan Pak Mochsin sebagai pasangan boneka. Pak Mochsin juga merupakan simpatisan PDIP.

#### **Pertanyaan untuk Mochsin selaku calon Walikota Blitar pada Pilkada 2015**

- 1. Apa motivasi bapak mencalonkan diri sebagai Walikota Blitar pada Pilkada 2015?** Karena saya warga Kota Blitar dan ingin mensukseskan Pilkada. Karena semua partai tidak mencalonkan pada Pilkada 2015. Saya ingin melanjutkan pembangunan di Kota Blitar.
- 2. Bagaimana pendapat bapak terkait isu di masyarakat bahwa bapak merupakan pasangan boneka Samanhudi Anwar pada pilkada 2015?** Terserah itu hanya gagasan masyarakat saja. Saya mencalonkan diri karena

saya ingin mendorong pendidikan gratis. Saya mencalonkan diri karena 1 tahun lalu saya bermimpi jadi Walikota Blitar. Saya juga merekrut tim sukses. Tidak pakai uang saya. Kampanye saya juga door to door. Masalah menang kalah bukan prinsip yang pasti karena cinta Kota Blitar. Saya mendapatkan 17.000 sekian suara dukungan sebagai syarat administrasi. Tapi dengan hasil 8% kemarin mungkin karena lebih besar kampanyenya Pak Samanhudi dan takutnya semua partai terhadap beliau.

**Pertanyaan untuk Said Nofandi, ST selaku Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Blitar**

- 1. Bagaimana pendapat bapak terkait pemerintahan Samanhudi Anwar sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** Hudi itu bagus cara memimpinnya selaras semauanya antara parlemen, birokrasi, dan masyarakat. Kebijakan raskin itu yang bagus karena tidak mungkin dikorupsi soalnya mudah ketahuan. Juga ada nikah gratis mencegah prostitusi. Maka Hudi dapat 5x WTP dengan predikat tidak korupsi. Cita cita Hudi itu besar membangun universitas negeri dan sekolah sampai sarjana gratis.
- 2. Bagaimana pendapat bapak terkait isu di masyarakat bahwa bapak merupakan pasangan boneka Samanhudi Anwar pada pilkada 2015?** Memang boneka, dicarikan KTP hingga 17.000 suara. Tapi hasilnay cuma 3000 sekian suara. Partai yang tidak mendukung Hudi PPP dan PKB itu juga karena masalah intern nasional.
- 3. Bagaiman hubungan bapak dengan Samanhudi Anwar sebagai Walikota Blitar tahun 2010-2015?** Saya tidak pernah meminta proyekan kepada Hudi, karena saya menghindari balas budi. Saya hanya ikut lelang proyek PLN itu pun juga sesuai prosedur profesional dan dibawah pusat langsung kontraknya. Sayahanya diminta Hudi untuk menjadi caleg lagi padahal saya sudah capek tapi katanya saya figur partai. Hudi juga tidak membantu saya waktu caleg padahal yang lainnya dibantu. Katanya saya dan dr. Syahrul sudah mampu. Saya kenal dekat Hudi sejak 1980an.

**4. Bagaimana peran bapak pada struktur DPC PDIP Kota Blitar?** Saya tim penasehat Hudi di Pilkada 2015 dan Ketua Babinlu selama 2 periode.

## LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI



Bersama Muh. Samanhudi Anwar,  
SH, selaku Walikota Blitar Tahun  
2016-2020 di Kantor Walikota Blitar



Bersama Drs. Santoso, selaku Wakil  
Walikota Blitar Tahun 2016-2020 di  
Kantor Walikota Blitar



Bersama Drs. Sugeng Praptoselaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Kota Blitar di kediamannya Kota Blitar.



Bersama Mahsudi (Kiri), anggota Komisioner KPU Kota Blitar di KPUD Kota Blitar





Bersama Ridho Handoko, anggota DPRD Fraksi Demokrat di Kantor DPRD Kota Blitar.



Bersama Leo Sudilaksono, Ketua DPD PKS Kota Blitar di Kediannya, Kota Blitar.



Bersama Muchson, Ketua  
DPD Partai Nasdem di  
Kantor DPD Partai Nasdem  
Kota Blitar



Bersama Tan Ngi Hing, Sekretaris  
DPC Partai Gerindra di  
Kediamannya, Kota Blitar



Bersama Hardi Husodo/Dodok,  
Ketua DPD Partai Golkar di DPD  
Partai Golkar Kota Blitar.



Bersama Mochsin, calon Walikota Blitar Tahun 2015  
jalur perseorangan, di kediamannya Kota Blitar.



Bersama Said Novandi, Ketua tim pemenang pasangan Samanhudi-Santoso di DPC PDIP Kota Blitar.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : **1840/UN10.F11.14.12/PP/2017**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Perpanjangan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si.  
NIP. : 2012096704091002  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A.  
NIP. :  
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama : Rizki Adi Nugroho  
NIM : 125120600111034  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Peminatan : Reformasi

Demikian perpanjangan surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 14 Juli 2017.

Malang, 14 AUG 2017  
a.n. Dekan:  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si  
NIP. 197509182005012001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : ~~4084~~ /UN10.11/AK/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, pada tanggal dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Dr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si.  
NIP. : 2012096704091002  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.,M.A.  
NIP. :  
Tugas : Pembimbing II

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):

Nama : Rizki Adi Nugroho  
NIM : 125120600111034  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Peminatan : Reformasi

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 1 semester terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.

25 JUL 2017

Malang,  
a.n. Dekan:  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Maya Diah Nirwana, S.Sos., M.Si  
NIP. 19770611 200912 2 001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran Surat No : /UN10.11/AK/2016

NO.	MAHASISWA		PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
	NAMA	NIM	NAMA	NIK	NAMA	NIK
1	Dheya Putri Ardhana	115120601111023	Ratnaningsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev	20140586092112001	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP	2013 04810825 1001
2	Arga Prakoso	115120601111017	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si	2013 048708 211001
3	Miftachul Helmi	105120600111033	Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	792410111110413	Ratnaningsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev	20140586092112001
4	Dicki Aditya Saputra	105120607111013	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	67040911120434	Ratnaningsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev	20140586092112001
5	Risky Wahyu Irawan	115120600111007	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP	2013 04810825 1001	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002
6	Rizki Adi Nugroho	125120600111034	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	2012 09670409 1002	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA	19830817 2015 04 2002
7	Gilang Adiana Wicaksana	115120600111024	Fathur Rahman, S.I.P., M.A	20110982042910 01	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002
8	Adityas Cahya Ramadhan	115120607111021	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002	Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	792410111110413
9	M Nur Ubaidillah	105120600111029	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	2013 0488110 42001	Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	792410111110413
10	Rica Aprilia	125120600111015	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	2012 09670409 1002	Fathur Rahman, S.I.P., M.A	2011098204291001
11	Rindra Citra Oktavia	125120601111007	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	2012 09670409 1002	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si	2013 048708 211001
12	Septyana Tri Rahayu	115120607111005	Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	792410111110413	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002
13	Sukmy Dewi Puspitorini	125120607111015	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	2012 09670409 1002	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	19830817 2015 04 2002
14	Nuraini Wina Fiskarini	125120607111019	Fathur Rahman, S.I.P., M.A	20110982042910 01	Dr. M.Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	792410111110413
15	M. Akbar Satria Wicaksono	125120600111010	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP	2013 04810825 1001	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	2013 0488110 42001

33	Nanda Anji Darmawan	125120600111023	Dr. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	67040911120434	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	2013 048708 211001
34	Sophia Syifa Fauzia	125120607111013	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	2013 0488110 42001	Fathur Rahman, S.IP., M.A	2011098204291001
35	Diestavia Dhahana	125120601111006	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	2013 0488110 42001	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	2013 04810825 1001
36	Endi Septianda Putra	125120607111014	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	19830817 2015 04 2002	Fathur Rahman, S.IP., M.A	2011098204291001
37	Dito Kurniawan	12512060111019	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	2013 0488110 42001	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	20140586092112001
38	Rizky Dwi Armada	125120607111033	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si	79241011110413	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	2013 0488110 42001
39	Septian Haris M	125120607111022	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si	79241011110413	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	20140586092112001
40	Ferdi Abadi	125120607111004	Dr. M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si	79241011110413	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	20140586092112001
41	Dwi Setya Ainul Yaqin	125120606111002	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	19830817 2015 04 2002	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	2013 04810825 1001
42	Syarif Hidayatullah	125120601111021	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	20140586092112 001	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	2013 048708 211001

Mengetahui  
K.P.S. Ilmu Pemerintahan <

Aswin Priyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 19780220 2010 12 1001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : 4087 /UN10.11/AK/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini untuk menjadi Pembimbing Skripsi dengan nama terlampir. Surat perihal Pembimbing Skripsi disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang diadakan pada :

Tanggal : 18 Februari 2016  
Tempat Pelaksanaan : Ruang rapat prodi. Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan ini berlaku selama 1 semester terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.

Malang, 01 Maret 2016

a.n. Dekan:

Pembantu Dekan I,

Maya Diah Nirwana, S.Sos., M.Si  
NIP. 19770611 200912 2 001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Nomor : /UN10.F11.14.12/PP/2018

No	Nama	NIM	Judul SKRIPSI	Ketua Penguji	Sekretaris Penguji	Penguji I	Penguji II
1	Roy Ramadhana	135120607111056	Partai Politik dan Kebijakan Publik (Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan di DKI Jakarta)	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Tia Subekti, S.I.P., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA	Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev
2	M. Yussron Nur Ikhsani	105120600111017	Strategi Penanganan Kemiskinan Pedesaan Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorego Tahun 2014	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si
3	Mohamad Amiruddin	135120601111009	Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Tugas Daerah Lingkungan Pondok Sosial Untuk Lansia Terlantar di Kabupaten Sidoarjo)	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si	Tia Subekti, S.I.P., MA	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
4	Awanda Rizki Ananta	135120600111029	Pengelolaan Wisata Gunung Beruk Di Desa Wisata Karangpaitan Kecamatan Balong Ponorego	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Irma Fitriana Ulfah, S. P., M.Si	Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev
5	Sofyan Huda	125120600111011	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Usaha Sapi Perah (Studi di Gabungan Kelompok Tani Mayang Sari Desa Pesanggaran)	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP
6	IWAN SETIADI	135120601111020	Implementasi Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di Kabupaten Pulang Pisau	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si	Dr. M.Lukman Hakim S.I.P., M.Si
7	Tika Rizky Aryanti	135120601111053	Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM (Studi Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Oleh Pemerintah Kota Surabaya)	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Tia Subekti, S.I.P., MA	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si
8	Rizky Dwi Septi Ambarwati	145120601111068	Analisis Problematika Perizinan Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Pasuruan)	Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Dr. M.Lukman Hakim S.I.P., M.Si
9	Irma Kurnia Santoso	145120600111003	Analisis Pembentukan City Branding "The Heart Of East Java" di Kabupaten Malang	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si
10	Revienda Anita Fitrie	145120600111014	Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Desa Tangguh Bencana	Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	Barqah Prantama, S.A.P., M.A.P
11	Lely Naryani Novita Sari	105120607111003	Pengembangan Karir Pegawai Perempuan Berbasis Entry Position dan Promotion di Dinas Sosial Kota Malang	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si
12	Ersanda Praptining Sela	135120607111029	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (pulau merah)	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA
13	Ratna Dwita Febrianti	115120607111040	Formulasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Malang	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP	Tia Subekti, S.I.P., MA	Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si
14	Rizki Adi Nugroho	125120600111034	Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Barqah Prantama, S.A.P., M.A.P	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA
15	Muhamad Yuhda Irawan	135120607111033	Kebijakan dan Tata Kelola Industri Susu Koperasi SAE Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Tia Subekti, S.I.P., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.I.P., MA	Rachmad Gustomy, S.I.P., M.IP
16	Reffamia Yufinda	135120607111041	Implementasi City Branding "Shining Batu" oleh Pemerintah Kota Batu	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Ratnangsih Damayanti S.I.P., M.Ec.Dev	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si
17	R. A. EKA AYUWANGI	135120607111061	Relasi Aktor Dalam Pelaksanaan Program Festival Bedah Rumah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kecamatan Banyuwangi)	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.I.P., M.Si	Dr. M. Lukman Hakim, S.I.P., M.Si
18	Puspa Indah Pratiwi	145120601111042	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Peserta Pengguna JAMKESMAS di Puskesmas Beji, Kota Batu)	Dr. George Towar Ikbal T, S.I.P., M.Si	Barqah Prantama, S.A.P., M.A.P	Dr. Dra. Alifulahin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.I.P., M.Si
19	Satria Atma Prayoga	135120607111019	Manajemen Kepegawaian dan Instansi Pemerintahan di Kab. Pamekasan	Restu Karlina Rahayu, S.I.P., M.Si	Laode Machdani Afala, S.I.P., MA	Fathur Rahman, S.I.P., MA	Ratnangsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev.



20	Lindakusuma wardani	125120601111005	marketing politik teman ahok dalam menaikkan citra politik ahok dipilkada DKI Jakarta 2017	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Tia Subekti, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
21	Erryan Hadisto	135120607111003	Film Jagal: Melawan Propaganda Hitam Terhadap PKI Pada Masa Rezim Orde Baru	Fathur Rahman, S.IP., MA	Laode Machdani Afala, S.IP., MA	Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si	Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev
22	Laras Saraswati	145120601111015	Strategi Perumusan City Branding Kabupaten Tulungagung "The Beginning of Life"	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP, M.Si
23	Shobaqoel Hafidz	135120601111054	Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem SIAP-LAPOR (Penyelesaian Laporan masyarakat di Bidang Pertanian Tahun 2016)	Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev.	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Dr.Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA
24	Aditya Tamara	115120607111026	Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Kaltim Prima Coal Pada Program Desa Mandiri Di Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Bargah Pranamama, S.AP., M.AP	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., M/A

10 JAN 2018

Malang.  
a.n. Dekan.  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Kholifah, S.Sos., M.Si, Ph.D  
NIP. 197509182005012001



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

Jalan Kalimantan No. 93 Blitar Telp./Fax (0342) 804063  
email : bakesbangpol-pb@blitarkota.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomer : 070/284/410.204/2016

**UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH**

Memperhatikan : Surat dari Ketua Prodi S- 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang Tanggal, 23 September 2016 Nomor : 245/UN/10.11/ak/PM/Peng Skripsi /2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survey/Research.  
Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan Penelitian/Survey/Research yang dilakukan oleh :

Nama : **RIZKI ADI NUGROHO**  
NIM : 125120600111034  
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan  
Jurusan : Reformasi Pemerintahan  
Alamat : Dsn.Sidodadi RT... RW.. Desa.Kinali. Kec.Kinali. Kab.Pasaman Barat Prov. Sumbar  
Tempat Pelaksanaan : Kota Blitar  
Judul : "Kartelisasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2015"

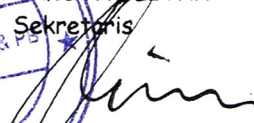
Waktu Pelaksanaan : 26 September 2016 s/d 26 Oktober 2016

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian.
- 2 Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
- 3 Tidak di perkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
- 4 Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar ) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 5 Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar , 25 September 2016

An KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA BLITAR

Sekretaris  
  
**Drs. TRIPUDJO DUMADI**

Pembina Tingkat. I

NIP. 19590124 198608 1 001

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Umum Setda Kota Blitar.
2. Ketua Komisioner Pemilihan Umum Kota Blitar
3. Ketua Prodi S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang
4. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038

<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Nomor : 246 / UN10.11 / AK / IPM / Pengantar Skripsi / 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pengumpulan Data dan Wawancara  
Kepada : Yth. Walikota Blitar

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Berkaitan dengan hal di atas, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa kami:

Nama : Rizki Adi Nugroho  
NIM : 125120600111034  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Untuk dapat melakukan Permohonan Pengumpulan Data dan Wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi: **Koalisi Besar dalam Pemenangan Petahana Samanhudi Anwar pada Pilkada Kota Blitar Tahun 2015** di tempat/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Malang, 22 November 2016

Menyetujui

K.P.S. Ilmu Pemerintahan


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202010121001

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *H. SATRIANO ST*

Umur : *53 TAHUN*

Pekerjaan/Jabatan : *KETUA*

Menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016



*(H. SATRIANO ST)*

Responden/Narasumber

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TATI NDI HING, S.SOS

Umur : 28 Th

Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA / SEKRETARIS DPC P. GERINDRA Kota Blitar

Menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016



TATI NDI HING, S.SOS  
Responden/Narasumber



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Bnuh. Hardi Susodo / DOBOK

Umur : 52

Pekerjaan/Jabatan : ketua DPP Partai GOLKAR

Menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016



Responden/Narasumber



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *MASHUDI, SH*

Umur : *38*

Pekerjaan/Jabatan : *ANGGOTA KOMISIONER, KPU KOTA BLITAR.*

Menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHSON, SE

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD. Partai NasDem Kota Blitar

Menerangkan bahwa:

Nama :

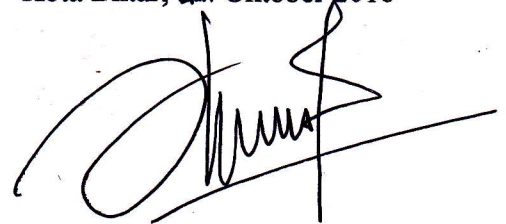
NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 1. Oktober 2016



(MUCHSON, SE)

Responden/Narasumber



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukardji

Umur : 49 tahun

Pekerjaan/Jabatan : Wira swasta / wakil ketua bidang Polhukam

Menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :


Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016

  
( Sukardji )  
Responden/Narasumber





## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LED SUDILAKSONO

Umur : 46

Pekerjaan/Jabatan : KETUA DPD PKS KOTA BLITAR

Menerangkan bahwa:

Nama :

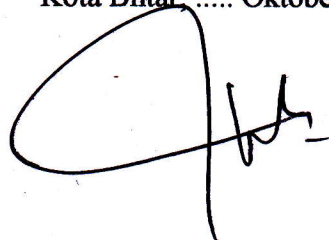
NIM :

Fakultas/ Jurusan :

Menerangkan Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, ..... Oktober 2016



( LED SUDILAKSONO )

Responden/Narasumber



BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR

diadakan pada hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Juli tahun dua ribu lima. Komisi  
Umum Daerah Kota Blitar mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala  
Wakil Kepala Daerah dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Blitar, dihadiri oleh saksi  
calon Kepala Daerah, Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di:

: Blitar  
: Jawa Timur

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPUD Kota yang bersangkutan;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPUD Kota yang bersangkutan;
- Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPUD Kota yang bersangkutan;
- Jumlah pemilih dari TPS lain;
- Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan)
- Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPUD Kota;
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPUD Kota yang bersangkutan;
- Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPUD Kota yang bersangkutan;
- Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPUD Kota yang terdiri dari suara sah dan suara Tidak sah.

Penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing  
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kejadian / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB 2 – KWK

Berita Acara dibuat dalam .....5..... (... Lima...) rangkap yang masing-masing rangkap ditanda  
Kelua, dan Anggota – anggota KPUD Kota serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan  
Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

an pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
ah di tingkat Kota ( Model DB 1 – KWK )

kapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kota (lampiran 1 Model DB 1 – KWK)

kapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota  
pran 2) Model DB 1 – KWK)

nyalaan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan  
a pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota (Model DB 2 – KWK)

masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

atau) rangkap untuk KPUD Kota;

atau) rangkap untuk KPUD Provinsi;

atau) rangkap untuk saksi yang hadir;

atau) rangkap untuk KPUD sebagai tembusan.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR

No.	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Airlanis Edison	(.....)
Anggota	Rita Triana, S. Sos	(.....)
Anggota	T.H. Widiyanto Nugroho, SH	(.....)
Anggota	H.M. Soehartadji, RA	(.....)
Anggota	Moh. Arif Majid, S. Ag.	(.....)

### Saksi – Saksi Dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanda Tangan
Drs. H. M. Zamuckin, M. Pd – Soelwoko, ST		(.....)
H Istijono Sunarto, SH – H. A. Wawan Badi Santoro, SH		(.....)
Drs. H. Djorot Saiful H, MS – Ir. Endro Hermono		(.....)



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TINGKAT KOTA BLITAR

: Blitar  
: Jawa Timur

Rekapitulasi Data Pemilihan dan TPS

URAIAN 2	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH 3		
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1. pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari no. 1 lampiran 1 Model DB 1 - KWK )	32.895	36.678	69.573
2. pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari no. 2 lampiran 1 Model DB 1 - KWK )	13.108	12.560	25.668
3. Pemilih dari TPS lain di Wilayah KPUD Kota ( diisi dari no. 3 lampiran 1 Model DB 1 - KWK )	706	259	965
4. Pemilih Terdaftar ( 1 + 2 + 3 )	46.709	49.497	96.206
5. TPS dan PPS, PPK di wilayah KPUD Kota	TPS 344	PPS 20	

Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah KPUD Kota

URAIAN 2	JUMLAH SURAT SUARA 3
1. surat suara yang rusak / keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari no. 4 lampiran 1 Model DB 1 - KWK )	231
2. surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari no. 5 lampiran 1 Model DB 1 - KWK )	27.117
3. surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari huruf A, lampiran Model DB 1 - KWK )	68.379
4. surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam Wilayah KPUD Kota ( diisi dari huruf B, Lampiran 2, Model DB1 - KWK )	2.159
5. surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam Wilayah KPUD Kota	--
6. surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam Wilayah KPUD Kota ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	97.886

Blitar, 12 Juli 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
BLITAR  
Drs. Andrius Erlisen



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TINGKAT KOTA BLITAR

Kota : Blitar  
Provinsi : Jawa Timur

Lampiran 1  
MODEL DB 1 - KWK

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH
2	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH
3	Jumlah pemilih dan TPS lain di Wilayah Kota Blitar	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6	Jumlah surat suara yang terpakai												
7	Jumlah seluruh TPS, PPS dan PPK di Wilayah Kota Blitar	TPS	PPS	JUMLAH	TPS	PPS	JUMLAH	TPS	PPS	JUMLAH	TPS	PPS	JUMLAH

Catatan : \*) Jumlah akhir angka 1 s/d 7 pada kolom 13, dipindahkan ke formulir Model DB 1 - KWK  
\*\*) Tulis nama Kecamatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KOTA BLITAR

2005





REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI TINGKAT KOTA

Kota : Blitar  
Provinsi : Jawa Timur

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										JUMLAH AKHIR
		PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	PPK Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Drs. H.M. Zainuddin, M.P.d dan Soewoko, ST	4.543	3.277	5.429								13.249
2	H. Istijono Sunarto, SH dan H. Agus Wawan Budi Santoso, SH	2.427	2.620	2.203								7.714
3	Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS dan Ir. Endro Hermono	15.257	14.275	17.284								47.416
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												68.379

\*) diisi nama Kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

[illegible]

Catatan :

\*) Diisi Nama Kecamatan

#) Pada kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPUD Kota Blitar

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BLITAR

No.  
TANDA TANGAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

Mrs. Johnnie Edson  
 B. H. Thomas, S. S.  
 Th. Williams, Negro, SH  
 T. M. Schoenfeld, B.  
 Alon. E. E. Moul, S. Ag.

Tanda Tangan

~~Indicando a~~

Saksi – Saksi Dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nama

Nama \_\_\_\_\_

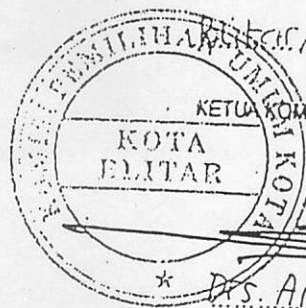
1. Syahrul Dhotir Ricki
2. Akbar Fajar
3. F. X. Gunesti

Irs. HAN Zaiduddin, MPd - Sewako, ST  
H Istijono Sunarto, Sri - H A. Walwan Budi Santoso, SH  
Irs H Dikret Saiful H, AIS - Ir. Engro Hermene

Tanda Tangan

~~10~~ 10

dan Khusus (Peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan  
ngan suara



Butar, 12 Juli 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KOTA BUTAR

Drs. Andrias Edison

atau tidak ada keberatan agar dicatat





**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BLITAR  
TINGKAT KOTA**

KABUPATEN/KOTA : KOTA BLITAR  
PROVINSI : JAWA TIMUR

LAMPIRAN 2  
MODEL DB.1- PKWK-KPU



A	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010			JUMLAH
		KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SANANWETAN	
1	Ir. H. ENDRO HERMONO dan dr. AZHAR ANWAR, MM	1.966	2.137	3.265	7.368
2	MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH dan PURNAWAN BUCHORI	12.469	9.216	10.309	31.994
3	Drs. ANANG TRIONO, MM dan Ir. BAMBANG GUNAWAN	4.767	6.194	6.723	17.684
4	Dr. HM. ZAINUDDIN, M.Pd dan MASRUKIN, S.Sos	477	410	749	1.636
5	HERU SUNARYANTA, SH dan Dr. SHOLIH MU'ADI, SH., M.Si	6.575	4.257	6.009	16.841
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		26.254	22.214	27.055	75.523

B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	893	640	995	2.528
---	--------------------------------	-----	-----	-----	-------

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR			
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. ABD BASYID	Ketua	1. ....
2.	Drs. ANDRIAS EDISON	Anggota	2. ....
3.	WIDIANTO NUGROHO, SH	Anggota	3. ....
4.	SETYO BUDIONO, SE	Anggota	4. ....
5.	MASHUDI, SHI	Anggota	5. ....

SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
No.	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1.	AGUS SUPROJO	Ir. H. ENDRO HERMONO - dr. AZHAR ANWAR, MM	1. ....
2.	TATOK S	MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH - PURNAWAN BUCHORI	2. ....
3.	ATYO URROHMAN	Drs. ANANG TRIONO, MM - Ir. BAMBANG GUNAWAN	3. ....
4.	ABTYO S	Dr. HM. ZAINUDDIN, M.Pd - MASRUKIN, S.Sos	4. ....
5.	DIDIK FADJAR	HERU SUNARYANTA, SH - Dr. SHOLIH MU'ADI, SH., M.Si	5. ....



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BLITAR  
DI TINGKAT KOTA BLITAR

KOTA : BLITAR  
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN		JUMLAH PEMILIH			
			KECAMATAN SUKOREJO	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	KECAMATAN SANANWETAN	Jumlah Akhir
1	2		3	4	5	12
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Lk	13.216	10.751	13.169	37.136
		Pr	13.915	12.063	14.858	40.836
		Jml	27.131	22.814	28.027	77.972
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Lk	3.967	3.449	4.845	12.261
		Pr	3.652	3.048	4.675	11.375
		Jml	7.619	6.497	9.520	23.636
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kota	Lk	9	30	14	53
		Pr	7	10	9	26
		Jml	16	40	23	79
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru di coblos		11	9	66	86
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		8.482	7.181	10.402	26.065
6	Jumlah surat suara yang terpakai		27.147	22.854	28.050	78.051
7	Jumlah surat suara tambahan		0	0	0	0
8	Jumlah Seluruh TPS, PPS, dan PPK di wilayah Kota	TPS	73	78	82	233
		PPS	7	7	7	21
		PPK	1	1	1	3
		Jml				

Blitar, 01 Juni 2010  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
KETUA,



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BLITAR  
DI TINGKAT KOTA BLITAR**

MODEL DB1-  
PKWK.KPU



Kota : **Blitar**  
Provinsi : **Jawa Timur**

**I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS**

NO	URAIAN	REKAPITULASI		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3		
1	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi no. 1 Lampiran 1 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	37.136	40.836	77.972
2	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi no. 2 Lampiran 1 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	12.261	11.375	23.636
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi no. 3 Lampiran 1 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	53	26	79
4	Jumlah Pemilih Terdaftar <i>(1+2)</i>	49.397	52.211	101.608
5	Jumlah TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kota Blitar	TPS	PPS	PPK
		233	21	3

**II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam Wilayah KPU Kota Blitar**

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi dari no. 4 Lampiran 1 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	86
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi dari no. 5 Lampiran 1 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	26.065
3	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi dari huruf A, Lampiran 2 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	75.523
4	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(diisi dari huruf B, Lampiran 2 Model DB1-PKWK.KPU)</i>	2.528
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar	0
6	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Blitar <i>(jumlah 1+2+3+4+5)</i>	104.202

Blitar,01 Juni 2010  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
KETUA,**

**Drs. H. ABD BASYID**

**KOTA BLITAR  
JAWA TIMUR**

--

[illegible]



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BLITAR**

Jl. Veteran No. 67 Telp. (0342) 801 065 Fax.(0342) 814529 Blitar

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

NO	NAMA PARTAI	SUKOREJO (1)	
		SUARA	KURSI
1	2	3	4
1	PARTAI NASIONAL MARHAENISME	173	0
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	536	0
3	PARTAI BULAN BINTANG	169	0
4	PARTAI MERDEKA	0	0
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1338	1
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	110	0
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	198	0
8	PARTAI NASIONAL BANTENGA KEBANGSAAN	277	0
9	PARTAI DEMOKRAT	2130	1
10	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	482	0
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	125	0
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	36	0
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	509	0
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	147	0
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3821	2
16	PARTAI Keadilan Sejahtera	637	0
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	40	0
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8388	3
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	947	1
20	PARTAI GOLKAR	3661	1
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	505	0
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	19	0
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0
24	PARTAI PELOPOR	241	0
	J U M L A H		9





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

Jl. Veteran No. 67 Telp. (0342) 801 065 Fax.(0342) 814529 Blitar

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

NO	NAMA PARTAI	KEPANJENKIDUL (2)	
		SUARA	KURSI
1	2	3	4
1	PARTAI NASIONAL MARHAENISME	621	0
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	218	0
3	PARTAI BULAN BINTANG	128	0
4	PARTAI MERDEKA	0	0
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1861	1
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	62	0
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	135	0
8	PARTAI NASIONAL BANTENGA KEBANGSAAN	220	0
9	PARTAI DEMOKRAT	2345	1
10	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	152	0
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	61	0
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	92	0
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	637	0
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	66	0
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3802	2
16	PARTAI Keadilan Sejahtera	536	0
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	32	0
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	6151	2
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	494	0
20	PARTAI GOLKAR	3310	1
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	46	0
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	111	0
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0
24	PARTAI PELOPOR	88	0
	J U M L A H		7



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BLITAR**

Jl. Veteran No. 67 Telp. (0342) 801 065 Fax.(0342) 814529 Blitar

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

NO	NAMA PARTAI	SANANWETAN (3)	
		SUARA	KURSI
1	2	3	4
1	PARTAI NASIONAL MARHAENISME	238	0
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	315	0
3	PARTAI BULAN BINTANG	251	0
4	PARTAI MERDEKA	0	0
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	919	1
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	52	0
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	143	0
8	PARTAI NASIONAL BANTENGA KEBANGSAAN	600	0
9	PARTAI DEMOKRAT	3516	1
10	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	632	0
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	57	0
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	125	0
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	847	0
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	906	1
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2906	1
16	PARTAI Keadilan Sejahtera	1177	1
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	0	0
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	6577	2
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	501	0
20	PARTAI GOLKAR	5486	2
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	147	0
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	56	0
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	46	0
24	PARTAI PELOPOR	565	0
	J U M L A H		9



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

Jl. Veteran No. 67; Telp. (0342) 801065; Fax. (0342) 814529; Blitar

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO URUT	NO PARTAI	NAMA PARTAI	KOTA BLITAR	
			SUARA	KURSI
1	1	PARTAI HANURA	3920	2
2	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1026	0
3	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0	0
4	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	167	0
5	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1256	0
6	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	104	0
7	7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1295	0
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2506	1
9	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1823	0
10	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0
11	11	PARTAI KEDAULATAN	305	0
12	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	42	0
13	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6889	3
14	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	187	0
15	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	172	0
16	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	0	0
17	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	0	0
18	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0	0
19	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	0
20	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0	0
21	21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0	0
22	22	PARTAI PELOPOR	195	0
23	23	PARTAI GOLKAR	4252	3
24	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3831	3
25	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1663	0
26	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	1502	0
27	27	PARTAI BULAN BINTANG	349	0
28	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	17876	6
29	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	634	0
30	30	PARTAI PATRIOT	657	0
31	31	PARTAI DEMOKRAT	16527	6
32	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	183	0
33	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	0
34	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1742	1
35	40	PARTAI MERDEKA	0	0
36	41	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0
37	42	PARTAI SARIKAT INDONESIA	0	0
38	44	PARTAI BURUH	84	0
		J U M L A H	69187	25



MODEL EB-1

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

**KOTA : BLITAR**  
**PROVINSI : JAWA TIMUR**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3		
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	387	2.117	892	-	3.396
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.259	2.072	3.108	-	7.439
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	581	596	1.669	-	2.846
4	PDI Perjuangan	10.253	11.346	13.312	-	34.911
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.049	419	1.498	-	2.966
6	PARTAI GERINDRA	6.884	3.315	1.656	-	11.855
7	PARTAI DEMOKRAT	1.998	874	2.232	-	5.104
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.025	1.116	1.232	-	3.373
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.601	1.556	2.124	-	6.281
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	814	412	1.762	-	2.988
14	PARTAI BULAN BINTANG	78	29	116	-	223
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	55	87	295	-	437
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.984</b>	<b>23.939</b>	<b>29.896</b>	<b>-</b>	<b>81.819</b>

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK

81.819

BLITAR , 13 Mei 2014

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

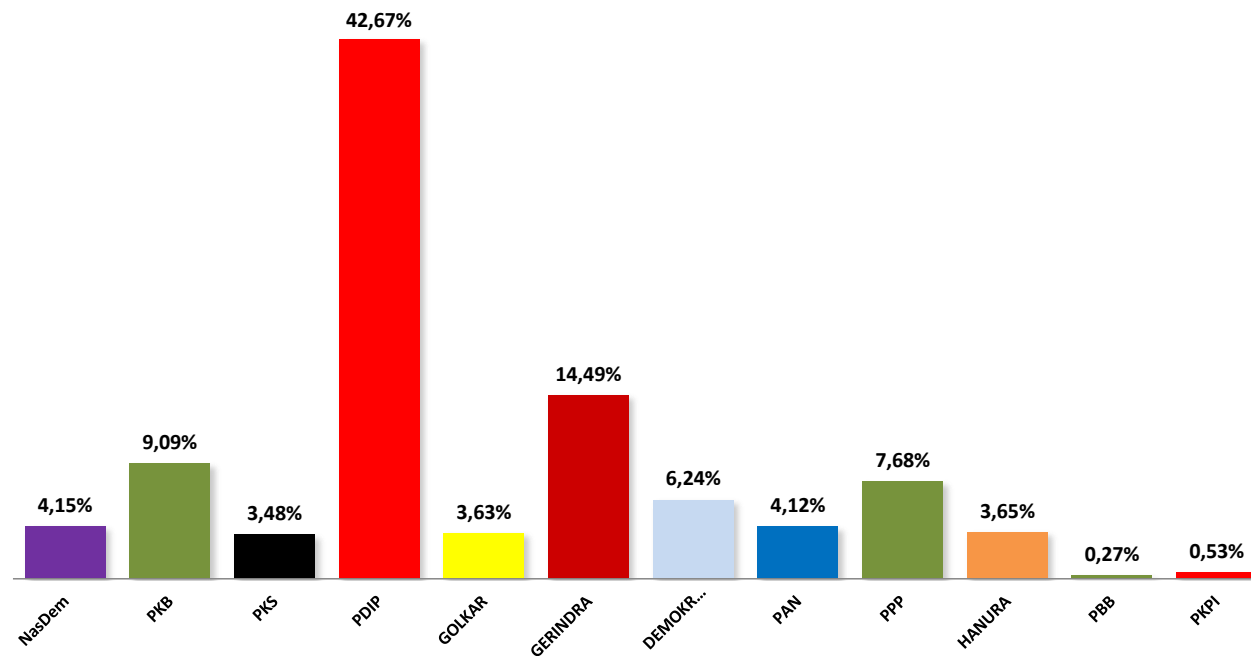
1. Drs. H. ABD. BASYID	Ketua	_____	
2. Drs. ANDRIAS EDISON	Anggota	_____	_____
3. WIDIANTO NUGROHO, SH	Anggota	_____	
4. SETYO BUDIONO, SE	Anggota	_____	_____
5. MASHUDI, S.HI	Anggota	_____	



**GRAFIK REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KOTA : BLITAR  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Partai	Suara Sah	%
1	NasDem	3.396	4,15%
2	PKB	7.439	9,09%
3	PKS	2.846	3,48%
4	PDIP	34.911	42,67%
5	GOLKAR	2.966	3,63%
6	GERINDRA	11.855	14,49%
7	DEMOKRAT	5.104	6,24%
8	PAN	3.373	4,12%
9	PPP	6.281	7,68%
10	HANURA	2.988	3,65%
14	PBB	223	0,27%
15	PKPI	437	0,53%
Total		81.819	



**DATA GAKIN & JANDA SE- KECAMATAN SUKOREJO TH. 2015 ( S/D TGL 30 SEPTEMBER 2015 )**

NO	KELURAHAN	RASKIN PUSAT 2016			RASKINDA 2016				RASJANDA 2016			JUMLAH JANDA SEMUAANYA	JUMLAH JANDA MAMPU	JUMLAH JANDA MISKIN
		GAKIN	JANDA MISKIN	JUMLAH	GAKIN	JANDA MISKIN	TAMBAHAN JANDA MISKIN	JUMLAH	JANDA MAMPU 2015 ( DARI RASKINDA 2015 )	TAMBAHAN JANDA MAMPU	JUMLAH			
1	PAKUNDEN	406	98	504	378	372	38	788	33	128	161	669	161	508
2	BLITAR	118	29	147	404	143	1	548	77	6	83	256	83	173
3	TLUMPU	81	21	102	271	147	11	429	22		22	201	22	179
4	TURI	129	30	159	164	141		305	27	2	29	200	29	171
5	KARANGSARI	139	31	170	261	159	10	430	142		142	342	142	200
6	SUKOREJO	484	169	653	819	577	13	1.409	103	6	109	868	109	759
7	TANJUNGSARI	156	139	295	344	259	20	623	20	10	30	448	30	418
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.513</b>	<b>517</b>	<b>2.030</b>	<b>2.641</b>	<b>1.798</b>	<b>93</b>	<b>4.532</b>	<b>424</b>	<b>152</b>	<b>576</b>	<b>2.984</b>	<b>576</b>	<b>2.408</b>



**PERKEMBANGAN DATA PENERIMA RASKIN PUSAT DAN RASKINDA KOTA BLITAR  
TAHUN 2006 - 2015**

NO	TAHUN	DATA RTS PUSAT	DATA RTS-PM DAERAH DAN SKPD PELAKSANA			KETERANGAN/ PENJELASAN
			KESRA	DINSOSNAKER	KECAMATAN	
1	2006	<b>4.689</b> (PPLS -BPS tahun 2005)	<b>539</b> <i>Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemkot Blitar dengan DPRD No. 10 tahun 2006 dan No: 050/1037/422.030.1/2006 tgl 30 Nov 2006</i>	<b>734</b>	-	- Raskin pusat 15kg dibeli Rp. 1.000/kg/RTS & setor ke Bulog - Raskin pendamping 15kg di Kesra dibeli Rp.1.000/kg/RTS & setor ke Kasda - Raskir di Dinsosnaker diberikan gratis 15 kg
2	2007	<b>4.689</b>	<b>539</b> (data RTS Pendamping)	<b>734</b> (data penerima Raskir)	-	--- " ---
3	2008	<b>4.689</b>	<b>539</b> (data RTS Pendamping)	<b>+/- 1.200</b> (data penerima Raskir)	-	Mekanisme sama dgn atas, tapi harga 1.600/kg/ RTS sebanyak 15kg, sedangkan Raskir tetap diberikan gratis
4	2009	<b>4.288</b> (PPLS -BPS tahun 2008)	<b>537</b> (Berkurang karena meninggal/pindah)	<b>+/- 1.200</b> (data penerima Raskir)	-	--- " ---
5	2010	<b>4.288</b>	<b>537</b> (data RTS Pendamping)	-	<b>+/- 1.200</b> (data penerima Raskir)	Mekanisme sama dgn atas, dan untuk Raskir 15 kg gratis di Dinsosnaker dialihkan ke kecamatan yang jg diberikan secara gratis
6	2011	<b>4.288</b>	<b>537</b> (data RTS Pendamping)	-	<b>1.637</b> (Hasil penambahan data penerima Raskir baru)	--- " ---
7	Jan - Mei 2012	<b>4.288</b>	-	-	<b>4.703</b> (Sesuai hasil pendataan Bappeda tahun 2011) (data penerima Raskinda)	- Raskin pusat 15kg di beli Rp. 1.600/kg/RTS & disetor ke Bulog - Raskin Pendamping di Kesra 537 RTS dijadikan satu di kec. menjadi Raskinda yg diberikan gratis 10 kg
8	Juni - Des 2012	<b>5.462</b> (PPLS -BPS tahun 2011 dari TNP2K)	-	-	<b>5.669</b> (Hasil penambahan data baru penerima Raskinda)	--- " ---
9	2013	<b>4.555</b>	<b>810</b> (Merupakan Pendampingan dr data pusat yang dikeluarkan)	-	<b>5.577</b> (Data penerima Raskinda berkurang karena meninggal dan pindah)	--- " --- Mekanisme pendampingan sama dg raskin pusat yg dari Bulog, sedangkan harga subsidi di tanggung Pemkot
10	2014	<b>4.555</b>	-	-	<b>8.554</b> (Penambahan data dari 810 dan dari janda/duda)	Raskin pusat 15kg dibeli Rp.1.600/kg/RTS dan disetor ke Bulog, sedangkan Raskinda gratis
11	2015	<b>4.555</b>	-	-	<b>12.986</b> (Meningkatnya jumlah RTS karna bertambahnya jumlah Janda)	- Raskin pusat 15kg dibeli Rp.1.600/kg/RTS dan disetor ke Bulog, sedangkan Raskinda gratis - Rencananya utk Raskin pusat akan di subsidi Pemkot
12	2016	.....	.....	.....	.....	



REKAPITULASI DAFTAR PENERIMA MANFAAT

PROGRAM RASKINDA

KEC. KEPANJENKIDUL TAHUN 2015

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH JANDA	JUMLAH GAKIN NON JANDA	JUMLAH DUDA	JUMLAH DPM 2015
1	KEPANJENKIDUL	379	190	82	651
2	KAUMAN	274	211	84	569
3	KEPANJENLOR	351	264		615
4	SENTUL	323	204	73	600
5	BENDO	343	157	23	523
6	TANGGUNG	239	200		439
7	NGADIREJO	190	128	32	350
	<b>JUMLAH</b>	<b>2099</b>	<b>1354</b>	<b>294</b>	<b>3,747</b>

**DATA RASKIN DAERAH  
KECAMATAN SANANWETAN  
TAHUN 2016**

NO	NAMA KELURAHAN	RASKIN DAERAH 2014	JANDA YANG DIUSULKAN TAHUN 2015	JUMLAH RASKIN DAERAH 2015	TAMBAHAN JANDA TAHUN 2016	JUMLAH SEMUA YANG DIUSULKAN
1	2	3	4	5 = ( 3+4)	6	7 = ( 4+6 )
1	REMBANG	317	40	357	15	55
2	KLAMPOK	247	102	349	35	137
3	PLOSOKEREP	357	141	498	15	156
4	KARANGTENGAH	356	126	482	113	239
5	SANANWETAN	650	414	1064	186	600
6	BENDOGERIT	402	533	935	0	458
7	GEDOG	385	300	685	5	305
	<b>JUMLAH</b>	<b>2714</b>	<b>1656</b>	<b>4370</b>	<b>369</b>	<b>1950</b>

CAMAT SANANWETAN

**EDY MULYONO, Bc. Kn**

Pembina

NIP. 19610320 198603 1 008

**Catatan :**

- Yang disetujui di DPA

**2714 RTS + 1656 RTS = 4370 RTS**

**Tim Kampanye**  
**"SAMSON"**  
**Samanhudi – Santoso**

Penasehat	: 1. Basuki rahmat, SH 2. M. Atok Urohman 3. Sutrisno 4. Tan Ngi Hing 5. Joko Nurbatin 6. Said Nofandi
Ketua	: Drs. Siswandi Irianto
Wakil Ketua I	: Drs. Hardi Usodo
Wakil Ketua II	: Dodik
Sekretaris I	: Sukardji
Sekretaris II	: Muchson, SE
Bendahara	: Dr. Syahrul Alim
Hubungan Lintas Partai	: Henry Pradipta Anwar
Koordinator Tim Kecamatan	: 1. Nur ali (Kec. Sukorejo ) 2. Bayu Setyo Kuncoro (kec. Sananwetan ) 3. Galih Hendra Asmara (Kec. Kepanjen Kidul )
Bidang – bidang	:
– Hukum/Advokasi	: 1. Glebot catur Arijanto, SH 2. Sutanto, SH
– Publikasi/Humas/dokumentasi	: 1. Dedik Hendarwanto, ST
– Keamanan	: 1. Yohannes Pujianto
– Transportasi	: 1. Leo Sunarya
– Logistik/Perlengkapan	: 1. Suyatno, ST 2. Leo Sunarya
– Konsumsi	: 1. Lisi Sri Sumiarsih 2. Indri Kuswati
– Tim Kesehatan	: Dr. Syahrul Alim

Blitar 26 Juli 2015

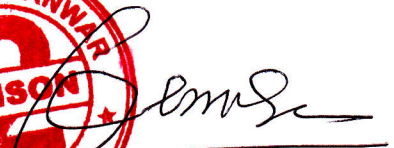
Pasangan calon

**Calon Walikota**



**MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH**

**calon wakil walikota**



**Drs. Santoso M.pd**



Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Nomor: 27.02 /KPTS-DPC/DPP/  /2015  
Tanggal 17 Maret 2015

**STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KOTA BLITAR  
MASA BAKTI 2015-2020**

KETUA	: MUH SAMANHUDI . ANWAR, SH
WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN	: Drs. ZAENAL EFENDI
WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI :	: Drs. SUGENG PRAPTONO
WAKIL KETUA BIDANG ORGANISASI	: HENRY PRADIPTA ANWAR
WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU	: SAID NOFANDI, ST
WAKIL KETUA BIDANG KOMUNIKASI POLITIK	: SUKARDJI
WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI	: ISLAND GATOT IMBATA
WAKIL KETUA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	: DEDIK HENDARWANTO, ST
WAKIL KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK	: INDRI KUSWATI
SEKRETARIS	: GLEBOT ARIJANTO, SH.
WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	: Drs. SISWANDI IRIANTO
WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM	: LISI SRI SUMIARSIH
BENDAHARA	: SUTANTO, SH
WAKIL BENDAHARA BIDANG INVENTARISASI DAN KEKAYAAN	: Drs. SYAHRUL ALIM
PARTAI	

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
Masa Bakti 2010-2015**

**KETUA UMUM**

  
**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**PIH. SEKRETARIS JENDERAL**

  
**HASTO KRISTIYANTO**



## **Kec. Kepanjen Kidul**

### **1. Ngadirejo :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 184 (09.78%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 1698 (90.12%)**

### **2. Tanggung :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 309 (11.44%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2393 (88.56%)**

### **3. Bendo :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 291 (10.24%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2550 (90.12%)**

### **4. Kep.Lor :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 280 (09.94%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2538 (90.06%)**

### **5. Kep.Kidul :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 300 (09.76%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 3567 (90.24%)**

### **6. Sentul :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 278 (09.78%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 3670 (90.12%)**

### **7. Kauman :**

- 1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 324 (10.92%)**
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2643 (89.08%)**



## **Kec. Sananwetan**

### **1. Gedog :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 428(08.80%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 5061(92.20%)

### **2. Bendogerit :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 488(09.63%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 4578(90.37%)

### **3. Sananwetan:**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 588(08.62%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 6237(91.38%)

### **4. Plosokerep :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 156(06.87%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2114(93.13%)

### **5. Karangtengah :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 214(06.48%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 3087(93.52%)

### **6. Klampok :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 134(06.30%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2343(93.70%)

### **7. Rembang :**

1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 95(05.41%)
2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 1440(94.59%)

## **– Hasil Perolehan di desa**

### **Kec. Sukorejo**

#### **1. Tanjungsari :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 341 (07.84%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 4008 (92.16%)**

#### **2. Pakunden :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 397 (07.14%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 5165 (92.86%)**

#### **3. Blitar :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 137 (05.82%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2218 (94.18%)**

#### **4. Tlumpu :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 98 (05.56%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2052 (94.44%)**

#### **5. Turi :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 79 (05.10%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 1471 (94.90%)**

#### **6. Karangsari :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 164 (05.89%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 2619 (94.11%)**

#### **7. Sukorejo :**

**1.Mochsin – Dwi Sumardianto = 398 (05.78%)**

**2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 6482 (94.22%)**



III. Evaluasi Kemenangan PILKADA di Kecamatan tersebut :

i. Jumlah DPT, Jumlah DPTB dan Jumlah TPS.

- Jumlah DPT : 109.413 Orang.
- Jumlah DTPB : 81 Orang.
- Jumlah TPS : 311 TPS.
- Suara Sah : 73617 Suara
- Suara Tidak sah : 3772 Suara

ii. Target kemenangan di masing – masing desa ( % ) dan kecamatan ( % ) :

- Target Kemenangan masing – masing desa 60 %.
- Target Kemenangan ditiap kecamatan 86 %.

iii. Hasil Perolehan Suara serta presentase di masing – masing desa dan total di setiap Kecamatan

– **Hasil Perolehan di Kecamatan**

A. Sukorejo :

- 1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 1614(06.30%)
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 24015(93.70%)

B. Kepanjen Kidul :

- 1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 1966(06.35%)
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 19059(93.65%)

C. Sananwetan :

- 1. Mochsin – Dwi Sumardianto = 2103(07.80%)
- 2. Muh.Samanhudi .A – Santoso = 24860(92.20%)